



WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 130/64/Wk-Pyk-2024
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Surat Pengantar**

Payakumbuh, 28 Maret 2024

Kepada Yth :

- 1. Menteri PAN & RB RI**
 - Menteri Dalam Negeri RI
 - Kepala Bappenas RI
- di

J a k a r t a

Dengan hormat,

Dalam rangka pengimplementasian Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Ket
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh (LKjIP) Tahun 2023	1 (satu) Dokumen	Terlampir
2.	Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2024	1 (satu) Dokumen	Terlampir

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



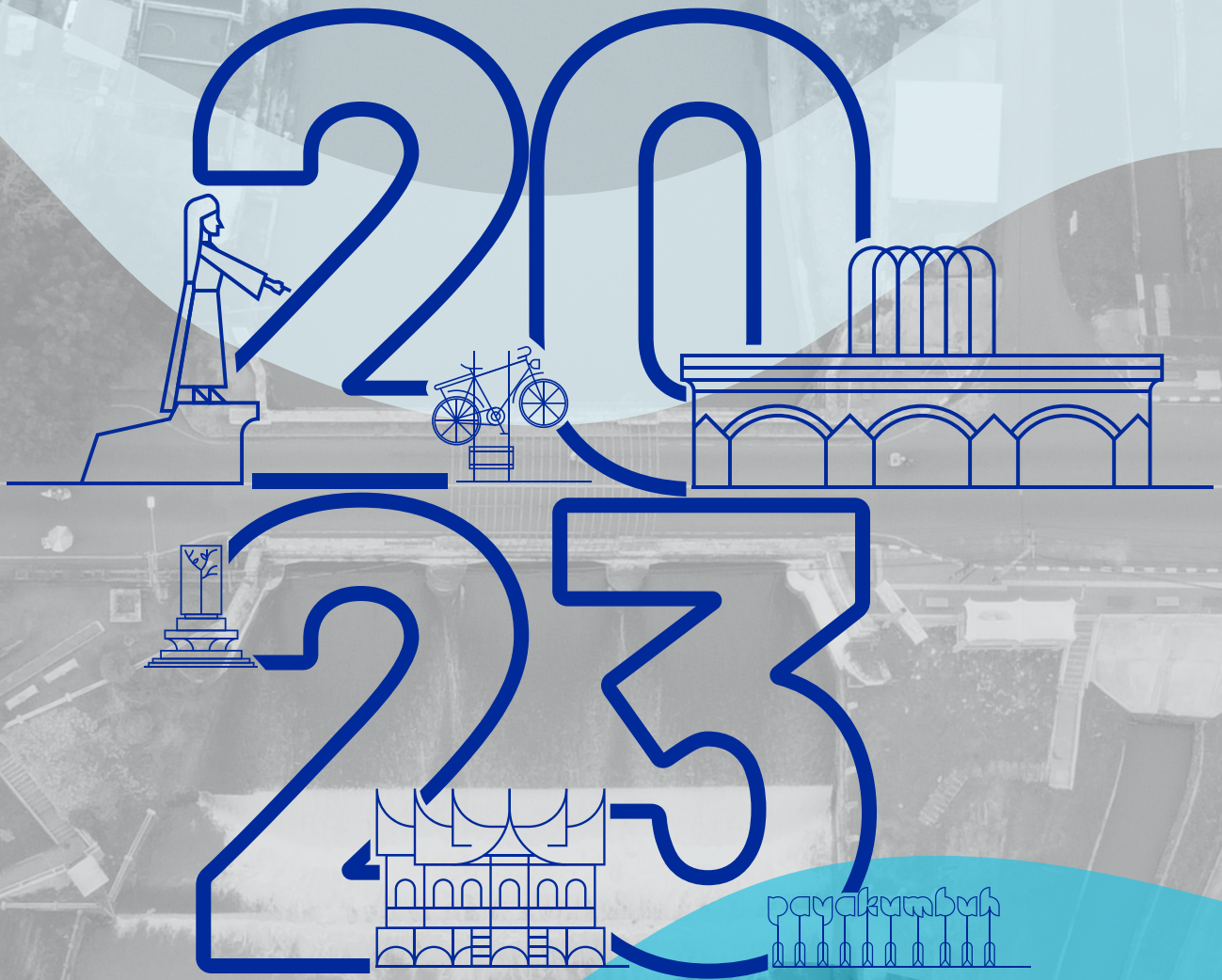
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. JASMAN, M.M



PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH

LKjIP



BERINOVASI DAN BERKOLABORASI
UNTUK PAYAKUMBUH TERUS BERPRESTASI

KATA PENGANTAR



Puji syukur dan ucapan Alhamdulillah, atas kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat dirampungkan. Penyusunan laporan ini berpedoman kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini secara substantif adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan kepada pemerintah sesuai dengan amanah atau mandat yang diterima.

Materi laporan antara lain menguraikan capaian kinerja sasaran dari Pj. Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai alat pengukurnya. Tahun 2023 ini merupakan Tahun pertama dari pelaksanaan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, dan untuk masing-masing indikator telah ditetapkan target yang akan dicapai dari tahun 2023 sampai dengan 2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Payakumbuh telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, dengan adanya laporan ini dapat sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Payakumbuh.



Payakumbuh, 28 Maret 2024
Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. JASMAN, M.M.

IKHTISAR EKSEKUTIF



Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (***Clean and Good Governance***) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan berorientasi kepada hasil (***Result Oriented Government***), sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan melalui Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP ini memuat Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Evaluasi internal sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan.

Merujuk kepada Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, ditetapkan 5 Tujuan, 12 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama. Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran untuk tahun Pertama (tahun 2023) periode perencanaan 2023-2026 adalah sebagai berikut :

**Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas
Tujuan I terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja :**

- Capaian Kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 113,79% kategori sangat Tinggi (lebih dari 91%).

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
Tujuan II terdapat 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja :

- Capaian Kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dengan 5 indikator kinerja, 5 indikator dengan capaian melebihi 100% kategori sangat tinggi, rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 146,91% dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%).

Tujuan III : Terwujudnya pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
Tujuan III terdapat 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja :

- Capaian kinerja sasaran, dari 2 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja dengan capaian melebihi 100 % dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%), dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 107,86% dengan kategori sangat tinggi (melebihi 91%).

Tujuan IV : Meningkatnya keberlanjutan Pembangunan yang berwawasan lingkungan

Tujuan IV terdapat 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja :

- Capaian kinerja sasaran, dari 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja dengan capaian melebihi 100 % dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%), dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,64% dengan kategori sangat tinggi (melebihi 91%).

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan Masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

Misi V terdapat 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :

- Capaian kinerja sasaran, dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja dengan capaian melebihi 100 % dengan kategori sangat tinggi (lebih dari 91%), dan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 105,27% dengan kategori sangat tinggi (melebihi 91%).

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 12 (dua belas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama, semua **indikator kinerja** atau **100,00%** dengan capaian melebihi 100% bermakna **Sangat Tinggi**. Jadi jika

di total Rata-rata capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2023 sebesar **114,20%**, jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar **112,95 %**, mengalami **peningkatan** sebesar **1,25%**.

Peningkatan total rata-rata capaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023 terjadi karena semua indikator Kinerja Sasaran realisasinya tercapai sehingga mempengaruhi hasil capaian rata-rata Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan.

Penyebab dari Peningkatan total rata-rata capaian indikator kinerja tersebut adalah karena Komitmen seluruh stake holder di Kota Payakumbuh untuk mencapai target kinerja yang sudah disepakati, sehingga semua program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan lancar guna menunjang pencapaian target indikator sasaran Pemerintah Kota.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud dan Tujuan	2
	1.3 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja	3
	1.4 Sejarah Kota Payakumbuh	4
	1.5 Gambaran Umum Kota Payakumbuh	6
	1.6 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
	1.7 Sumber Daya Aparatur	13
	1.8 Tinjauan Perekonomian	14
	1.9 Sistematika Penulisan	19
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	21
	2.1 Rencana Strategis	21
	2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2023	24
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	27
	3.1 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	30
	3.2 Realisasi Anggaran	179
	3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan	180
BAB IV	PENUTUP	191

LAMPIRAN

1. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh Tahun 2023 (Penetapan Kinerja Tahun 2023)
3. Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023.
4. LRA

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh.....	7
Tabel 1.2	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	8
Tabel 1.3	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan Kota Payakumbuh Tahun 2023	9
Tabel 1.4	Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	10
Tabel 1.5	Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	15
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstanta 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	17
Tabel 1.7	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	19
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	22
Tabel 2.2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Payakumbuh sebelum direviu Tahun 2023-2026	23
Tabel 2.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	25
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023	28
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023	32
Tabel 3.4	Sasaran dan Indikator Tujuan I Tahun 2023	34
Tabel 3.5	Data Capaian Sasaran Tujuan I Tahun 2023.....	35
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas	36
Tabel 3.7	Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023	37
Tabel 3.8	Harapan lama sekolah di Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2023.....	38
Tabel 3.9	Rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2023.....	39

Tabel 3.10	Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023	40
Tabel 3.11	Jumlah Kelas, Rombel, Murid dan Rata-rata per Kelas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023	41
Tabel 3.12	Rasio Guru dan Murid menurut Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023	42
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.....	44
Tabel 3.14	Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023	44
Tabel 3.15	Jumlah Kepesertaan JKN Kota Payakumbuh Tahun 2018-2023	46
Tabel 3.16	Sarana Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023	49
Tabel 3.17	Sumber daya Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023	49
Tabel 3.18	10 Penyakit terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023.....	52
Tabel 3.19	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	55
Tabel 3.20	Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender.....	55
Tabel 3.21	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023.....	56
Tabel 3.22	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.....	57
Tabel 3.23	Sasaran Strategis dan IKU pada Tujuan II.....	64
Tabel 3.24	Evaluasi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 1-3	67
Tabel 3.25	Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan	69
Tabel 3.26	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023	69
Tabel 3.27	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran.....	77
Tabel 3.28	Perbandingan Tingkat Pengangguran Antar Waktu Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023	78
Tabel 3.29	Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat Tahun 2019-2023	78
Tabel 3.30	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023	80
Tabel 3.31	Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023	80
Tabel 3.32	Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB Kota Payakumbuh tahun 2019-2023	86
Tabel 3.33	Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2010 Kota Payakumbuh tahun 2019-2023.....	87

Tabel 3.34	Perkembangan Penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	88
Tabel 3.35	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022	89
Tabel 3.36	Prasarana dan Fasilitas pendukung di Pasar Tradisional Ibh	89
Tabel 3.37	Prasarana dan Fasilitas Pasar Pusat pertokoan Kota Payakumbuh	90
Tabel 3.38	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023	92
Tabel 3.39	Data Perkembangan Industri Tahun 2019-2023 Kota Payakumbuh	96
Tabel 3.40	Data Industri dan Nilai Produksi Tahun 2023	98
Tabel 3.41	Capaian IKU pada Sasaran Meningkatnya Iklim Usaha dan Investasi di Kota Payakumbuh	102
Tabel 3.42	Perkembangan Capaian Realisasi Investasi tahun 2019-2023 dibandingkan akumulasi 1 tahun RPD Tahun 2023-2026	102
Tabel 3.43	Perkembangan Realisasi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023	103
Tabel 3.44	Daftar Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan Tahun 2023	104
Tabel 3.45	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2023	105
Tabel 3.46	Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Aplikasi OSS RBA 2023	105
Tabel 3.47	Sasaran dan Indikator Tujuan 3 Tahun 2023.....	111
Tabel 3.48	Data Capaian Indkator Sasaran Tujuan 3 Tahun 2023...	111
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan	113
Tabel 3.50	Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2019 s/d 2023.....	114
Tabel 3.51	Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	114
Tabel 3.52	Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023.....	115
Tabel 3.53	Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan 2023.....	115
Tabel 3.54	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 dan 2023.....	122
Tabel 3.55	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaa Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	127

Tabel 3.56	Hasil Pengukuran Indeks Pengelola Keuangan Daerah Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2023.....	128
Tabel 3.57	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	131
Tabel 3.58	Kategori Nilai Indeks SPBE	133
Tabel 3.59	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Payakumbuh Tahun 2019 s.d 2023	134
Tabel 3.60	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Payakumbuh Tahun 2023	134
Tabel 3.61	Nilai Indeks Kematangan SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2023	135
Tabel 3.62	Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023	140
Tabel 3.63	Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2023	141
Tabel 3.64	Kategori Penilaian Kinerja Unit Pelayanan	143
Tabel 3.65	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	144
Tabel 3.66	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2019 s.d 2023	148
Tabel 3.67	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2023	149
Tabel 3.68	Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023	153
Tabel 3.69	Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH	156
Tabel 3.70	Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air	158
Tabel 3.71	Indeks Kualitas Air Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	158
Tabel 3.72	Indeks Kualitas Udara Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	159
Tabel 3.73	Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	160
Tabel 3.74	Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	161
Tabel 3.75	Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	162
Tabel 3.76	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya infrastruktur perkotaan.....	163
Tabel 3.77	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya kualitas penataan perkotaan	165
Tabel 3.78	Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat yang Berlandaskan ABS SBK	174
Tabel 3.79	Kriteria Lembaga Adat yang aktif	175
Tabel 3.80	Capaian Kinerja Indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	177

Tabel 3.81	Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik...	177
Tabel 3.85	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023	179

DAFTAR GRAFIK



Grafik 1.1	Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Tahun 2023	8
Grafik 1.2	Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Tahun 2023	10
Grafik 1.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan ..	13
Grafik 1.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan ..	13
Grafik 3.1	Tujuan pada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026	67
Grafik 3.1	Kasus Kematian Bayi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023	47
Grafik 3.2	Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2019-2023	48
Grafik 3.3	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh Tahun 2019 – 2023	51
Grafik 3.4	Perkembangan Indeks Pemeberdayaan Gender Kota Payakumbuh Tahun 2019-2022	56
Grafik 3.5	Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Payakumbuh Tahun 2012-2023.....	70
Grafik 3.6	Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023	77
Grafik 3.7	Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA Tahun 2022 dan tahun 2023	106
Grafik 3.8	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengurusan NIB Tahun 2023.....	107
Grafik 3.9	Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023	82
Grafik 3.10	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023	82
Grafik 3.11	Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Tahun 2018-2022	95
Grafik 3.12	Proporsi Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan pada Tahun 2022	94
Grafik 3.13	Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2023.....	144
Grafik 3.14	Perbandingan Nilai IKM UPP Kota Payakumbuh Semester I dan II Tahun 2023	146

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Jembatan Ratapan Ibu	5
Gambar 1.2	Peta Administrasi Kota Payakumbuh	7
Gambar 3.1	Puskesmas Padang Karambia di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh	49
Gambar 3.2	Fasilitasi Perdagangan Antar Daerah dan Antar Negara.....	92
Gambar 3.3	Sentra Makanan Ringan dan Kampung Rendang Kota Payakumbuh	95
Gambar 3.3	Pemasangan Sambungan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	63
Gambar 3.4	Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh	100
Gambar 3.5	Kampung Rendang dan perkembangannya menjadi Sentra IKM Kota Payakumbuh	101
Gambar 3.6	Perkembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh ...	101
Gambar 3.7	Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA Tahun 2022 dan Tahun 2023	106
Gambar 3.8	Pelaksanaan bimtek pengurusan NIB tahun 2023.....	107
Gambar 3.9	Penghargaan atas pelayanan investasi terbaik Nasional ...	108
Gambar 3.10	SITARANG (System Informasi Penataan Ruang).....	109
Gambar 3.11	Peningkatan kualitas Pelayanan Investasi melalui aplikasi SITARANG.....	109
Gambar 3.12	Pembahasan Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting Kota.....	117
Gambar 3.13	Penyerahan Reward ASN Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh.....	118
Gambar 3.14	Aplikasi e-Kinerja sebagai Sarana Monitoring Kinerja.....	118
Gambar 3.15	Cascading Kinerja dan SKP pada Sekretariat Daerah.....	119
Gambar 3.16	Rapat Koordinasi dalam Rangka Monev Kinerja PD.....	120
Gambar 3.17	Unggahan Laporan Kinerja Pemerintah di Website Kota dan PD.....	121
Gambar 3.18	Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja PD.....	121
Gambar 3.19	Struktur penilaian Tingkat Kematangan SPBE	133
Gambar 3.20	Tampilan Aplikasi Silakeh SMART & SiPaduko	151
Gambar 3.21	Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.....	152
Gambar 3.22	Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama tahun 2023	168

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan berbagai upaya dilakukan salah satu adalah fokus pada peningkatan capaian pada Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan, dimana salah satunya adalah akuntabilitas kinerja. Terkait dengan itu maka pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya secara rinci dan sistematis. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja tersebut berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi. Sasaran Strategis yang jelas dengan Indikator Kinerja yang SMART merupakan parameter keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan, demi menciptakan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Laporan Kinerja Kota Payakumbuh menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun Pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh periode 2023-2026. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh adalah untuk memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

Selanjutnya sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bertujuan untuk melaporkan tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam membangun budaya kerja yang dimulai dari pimpinan sampai kepada level staf untuk mencapai Tujuan Pemerintah Kota Payakumbuh. Sehingga tujuan mewujudkan masyarakat Kota Payakumbuh yang Maju, Sejahtera, Bermartabat akan tercapai dengan baik. Terakhir tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menyampaikan informasi tentang upaya-upaya Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melakukan perampingan-perampingan program dan kegiatan, sehingga akan terwujud efisiensi anggaran yang akan mengarah pada perampingan struktur organisasi pada kelembagaan Pemerintah Daerah.

Perlu juga dalam Laporan kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini kami informasikan bahwa dalam tahun ini terjadi berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh terkait penanggulangan Kemiskinan ekstrim, Pengendalian Inflasi, Penanganan dan pencegahan stunting, Peningkatan Investasi dan P3DN, dengan melakukan percepatan penerapan Reformasi Birokrasi berdampak dengan menggerakkan semua stake holder terkait.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2020 dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya serta Peraturan Daerah terkait dengan Dokumen Perencanaan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
7. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
8. Dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

1.4 SEJARAH KOTA PAYAKUMBUH

Payakumbuh berasal dari kata Payau dan Kumbuah, dimana berdasarkan literatur lama Payau (Payo) dalam Bahasa Indonesia berarti rawa-rawa, dan Kumbuah adalah sejenis tanaman yang dulunya tumbuh subur di daerah rawa di kanagarian Koto Nan Gadang. Kota Payakumbuh berdiri pada tanggal 17 Desember 1970, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19). Berdasarkan peraturan tersebut Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai daerah tingkat II dengan wilayah pemerintahan sendiri, dan

tanggal 17 Desember ditetapkan menjadi hari jadi Kota Payakumbuh. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka status Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh, berubah menjadi Kota Payakumbuh. Payakumbuh sejak zaman sebelum kemerdekaan telah menjadi pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan terutama bagi Luhak Limo Puluah. Pada zaman pemerintahan Belanda, Payakumbuh adalah tempat kedudukan asisten residen yang menguasai wilayah Luhak Limo Puluah, dan pada zaman pemerintahan Jepang, Payakumbuh menjadi pusat kedudukan pemerintah.

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Menurut tambo setempat, dari salah satu kawasan di dalam kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik. Pada tahun 1840, Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ratanan Ibu.



Gambar 1.1 Jembatan Ratanan Ibu

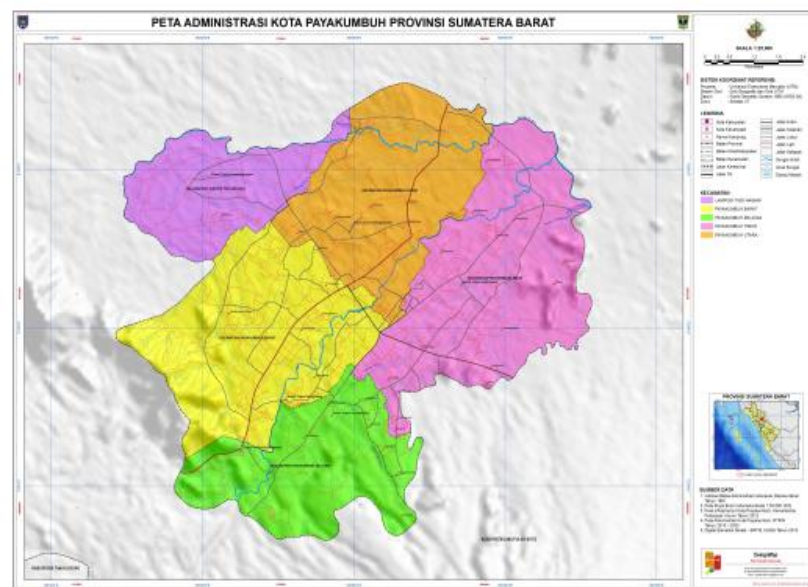
1.5 GAMBARAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

1. Kondisi Geografis

Secara Geografis Kota payakumbuh terletak antara 00°10' - 00°17' Lintang Selatan dan antara 100°35' sampai dengan 100°45' Bujur Timur dengan luas wilayah 80,43 Km². Kota Payakumbuh merupakan dataran sedang dengan ketinggian ±514 m di atas permukaan laut. Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Payakumbuh berada pada rentang 450m-750m.

Pada posisi geografisnya, Kota Payakumbuh berbatasan dengan beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Luhak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Payakumbuh

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Payakumbuh adalah 80,43 km² yang setara dengan 0,19% dari luas propinsi Sumatera Barat dan berbatasan langsung dengan lima Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2008, Kota Payakumbuh dimekarkan dari 3 Kecamatan menjadi 5 Kecamatan, dimana pada tanggal 23 Desember 2008 peresmian Kecamatan Payakumbuh Selatan dan pada tanggal 24 Desember 2008 peresmian Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Pembagian wilayah administratif seperti pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Administratif Kota Payakumbuh

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1	Payakumbuh Barat	Tanjung Pauh	19,06	23,71
2	Payakumbuh Utara	Tigo Koto Diate	14,53	18,06
3	Payakumbuh Timur	Tiakar	22,73	28,26
4	Payakumbuh Selatan	Sawah Padang Aua Kuning	14,68	18,25
5	Lamposi Tigo Nagari	Sungai Durian	9,43	11,72
Total			80,43	100,00

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2023

Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Payakumbuh Timur dengan luas 22,73 km² atau 28,26 persen, sementara Kecamatan Lamposi Tigo Nagari adalah yang paling kecil yaitu seluas 9,43 km² atau 11,72 persen.

Keadaan topografi Kota Payakumbuh bervariasi antara daratan dan berbukit dengan ketinggian 514 m di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata 21°-32° celsius dengan kelembaban udara berkisar antara 63% sampai dengan 85%. Curah hujan di Kota Payakumbuh tergolong sedang yaitu rata-rata 1.797 mm sampai dengan jumlah hari hujan 118 hari setahun. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan November sampai Mei dan musim kemarau pada bulan Juni sampai Oktober.

Penggunaan lahan Kota Payakumbuh tahun 2023 dapat dilihat lebih rinci pada tabel 1. 2 dibawah ini :

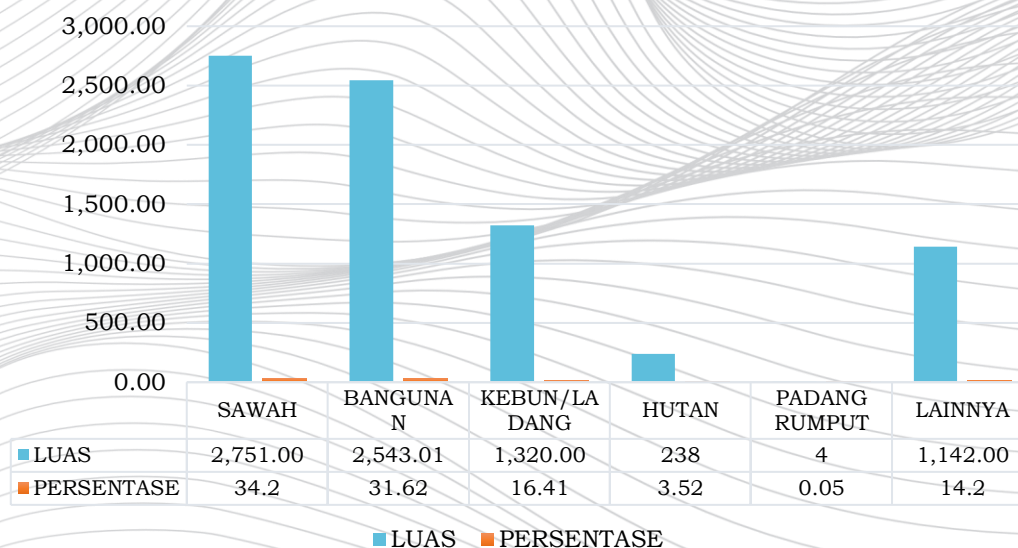
Tabel 1.2
Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya di Kota Payakumbuh
Tahun 2023

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Sawah	2.751,00	34,20
2	Tanah untuk bangunan dan sekitarnya	2.543,01	31,62
3	Kebun/ladang	1.320,00	16,41
4	Kolam/tebat	-	-
5	Ditanami pohon (hutan rakyat)	283,00	3,52
6	Pengembalaan/Padang rumput	4,00	0,05
7	Lainnya	1142,00	14,20
Jumlah		8.043,00	100.00

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2023

Bila dilihat dari segi penggunaan tanah di Kota Payakumbuh, bagian terbesar yaitu 34,20% atau 2.751,00 Ha digunakan untuk sawah. Selanjutnya luas Tanah untuk bangunan dan sekitarnya sebesar 2.543,01 Ha atau 31,62%, sedangkan luas lahan yang paling kecil persentasenya yaitu padang rumput sebesar 0,05%. Pertumbuhan penduduk yang semakin dinamis menjadi alibi perubahan ini. Penggunaan lahan Kota Payakumbuh tahun 2023 dapat dilihat lebih rinci pada grafik dibawah ini :

Grafik 1.1
Luas Penggunaan Tanah Menurut Jenisnya Di Tahun 2023



3. Aspek Demografis

Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Data ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur ruang daerah. Selain itu, informasi mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak/retribusi di masa yang akan datang.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diketahui jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 144.727 jiwa, yang terdiri dari 72.798 laki-laki dan 71.929 perempuan. Dari data tersebut terlihat penyebaran penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Payakumbuh Barat dan terkecil di Kecamatan Payakumbuh Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

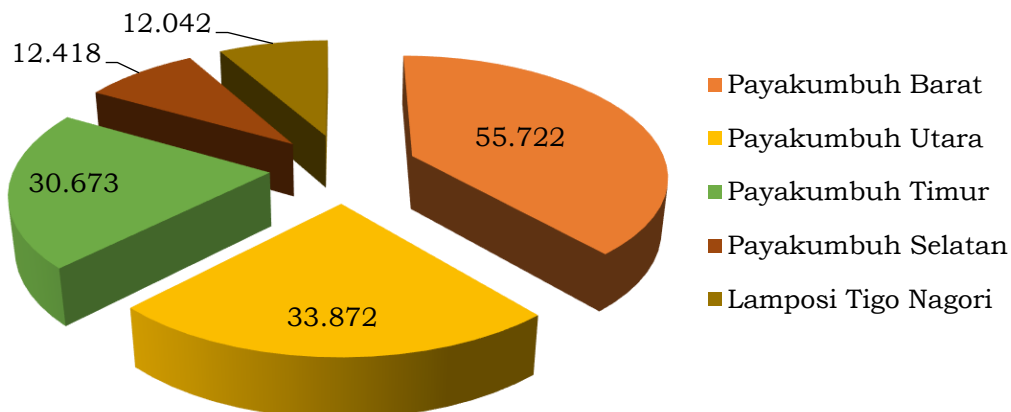
Tabel 1.3
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah dan Kepadatan
Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km.2)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Kepadatan Penduduk Tahun 2023
1	Payakumbuh Barat	19,06	54.260	54.614	54.575	55.722	2.924
2	Payakumbuh Utara	14,53	33.160	33.237	33.416	33.872	2.331
3	Payakumbuh Timur	22,73	29.305	29.668	29.962	30.673	1.349
4	Lamposi Tigo Nagari	9,43	11.516	11.662	11.707	12.042	1.277
5	Payakumbuh Selatan	14,68	11.960	12.030	12.153	12.418	846
	Kota Payakumbuh	80,43	140.201	141.171	141.813	144.727	1.799

*Sumber : Data Agregat BAK Semester I Dukcapil Tahun 2023**

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan lain sebagainya.

Grafik 1.2
Sebaran Penduduk Menurut Luas Wilayah Tahun 2023



Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Kota Payakumbuh tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan kepadatan 2.924 jiwa/km. Sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Payakumbuh Selatan dengan kepadatan penduduk 846 jiwa/km.

Komposisi penduduk Kota Payakumbuh menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih sedikit dari penduduk laki-laki sebagaimana terlihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Komposisi Penduduk Kota Payakumbuh Per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Total	
		n	%	n	%	n	%
1	Payakumbuh Barat	27.942	38,38	27.780	38,62	55.722	38,50
2	Payakumbuh Utara	17.021	23,38	16.851	23,43	33.872	23,40
3	Payakumbuh Timur	15.535	21,34	15.138	21,05	30.673	21,19
4	Lamposi Tigo Nagori	6.055	8,32	5.987	8,32	12.042	8,32
5	Payakumbuh Selatan	6.245	8,58	6.173	8,58	12.418	8,58
	Jumlah	72.798	100	71.929	100	144.727	100

Sumber : Data Agregat BAK Semester I Dukcapil Kota Payakumbuh Tahun 2023*

1.6 STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang memberi kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Maka disusunlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Payakumbuh dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dari :

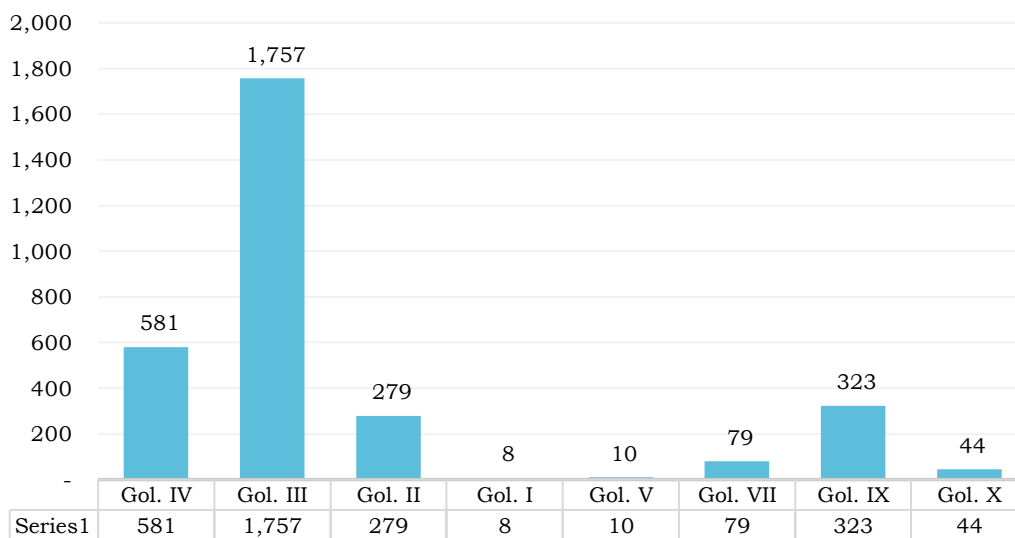
1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
 - Bagian Pemerintahan
 - Bagian Hukum
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh :
 - Bagian Perekonomian
 - Bagian PBJ dan Dalbang
 - Bagian Perencanaan dan Anggaran
 - c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
 - Bagian Protokoler dan Dokumentasi
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Umum
 - d. Staf Ahli terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
 - a. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Bagian Umum

- c. Bagian Hukum dan Persidangan
- 3. Inspektorat
- 4. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - d. Badan Keuangan Daerah
- 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 6. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - b. Dinas Perhubungan
 - c. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - e. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.
 - f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - g. Dinas Koperasi dan UKM
 - h. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - i. Dinas Ketahanan Pangan
 - j. Dinas Pertanian
 - k. Dinas Lingkungan Hidup
 - l. Dinas Pendidikan
 - m. Dinas Kesehatan
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - o. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
 - p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - q. Dinas Sosial
- 7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- 8. 5 (lima) Kecamatan dan 47 Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kecamatan Payakumbuh Barat terdiri dari 17 kelurahan
 - b. Kecamatan Payakumbuh Utara terdiri dari 9 kelurahan
 - c. Kecamatan Payakumbuh Timur 9 kelurahan
 - d. Kecamatan Payakumbuh Selatan terdiri 6 kelurahan
 - e. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori terdiri dari 6 kelurahan.

1.7 SUMBER DAYA APARATUR

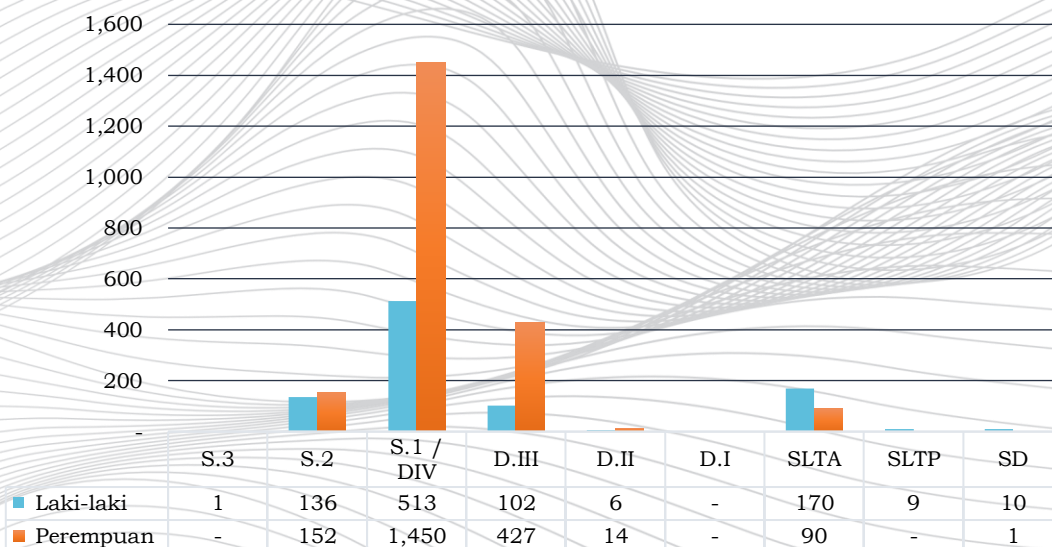
Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kota Payakumbuh terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK pada Tahun **2023** berjumlah 3.081 orang, terdiri dari 2.134 orang perempuan dan 947 orang laki-laki, sebagaimana data grafis berikut ini :

Grafik 1.3
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Golongan



Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, Tahun 2023

Grafik 1.4
Jumlah Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kota Payakumbuh, tahun 2023

1.8 TINJAUAN PEREKONOMIAN

Nilai PDRB Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mencapai 8,250 triliun rupiah. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 0,947 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 7,303 triliun rupiah. Naik nilai PDRB ini dipengaruhi oleh sudah mulai bergerakaknya kegiatan produksi hamper diseluruh lapangan usaha dan inflasi yang rendah.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 4,572 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 4,779 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pada tahun 2022 Kota Payakumbuh mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh sudah mulai menggeliatnya aktifitas social dan ekonomi hampir diseluruh lapangan usaha.

a. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Kota Payakumbuh didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha diantaranya : Perdagangan besar dan eceran, reperasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan kominkasi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa keuangan dan asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Payakumbuh.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu mencapai 25,12 persen (angka ini turun dari 25,15 persen tahun 2018), selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 13,49 persen (menurun dari 13,57 persen di tahun 2018), disusul lapangan usaha transportasi dan

pergudangan sebesar 11,85 persen (turun dari 12,49 persen di tahun 2018), berikut lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,39 persen (meningkat dari 7,32 persen di tahun 2018), dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa keuangan dan asuransi masing-masing 7,20 persen dan 6,06 persen sementara itu peranan lapangan usaha lainnya masing-masing kurang dari 6,00 persen sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Payakumbuh
Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	6,75	6,35	6,44	6,08	5,89
2	Pertambangan & Penggalian	0,56	0,52	0,52	0,51	0,50
3	Industri Pengolahan	5,13	4,80	4,86	5,03	4,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23
6	Konstruksi	13,57	13,76	13,67	13,61	13,49
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda motor	25,15	25,13	24,53	24,04	25,12
8	Transportasi dan Pergudangan	12,50	12,61	11,72	11,87	11,85
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	3,23	3,34	3,03	3,15	3,5
10	Informasi dan Komunikasi	7,32	7,56	8,25	8,41	8,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,98	5,72	5,91	6,16	6,06
12	Real Estate	2,83	2,81	2,9	2,86	2,80
13	Jasa Perusahaan	0,25	0,24	0,24	0,23	0,22
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,89	7,00	7,58	7,77	7,20
15	Jasa Pendidikan	4,52	4,64	4,94	4,91	4,87
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,43	1,47	1,53	1,64	1,58
17	Jasa Lainnya	3,59	3,74	3,49	3,46	3,48
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : BPS, Buku PDRB Kota Payakumbuh menurut lapangan usaha 2018-2022, Tahun 2023

Diantara enam lapangan usaha tersebut Informasi dan komunikasi adalah kategori yang cenderung mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya pertanian, kehutanan dan perikanan, transportasi dan pergudangan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan dua lapangan usaha yang lain peranannya berfluktuasi namun cenderung meningkat.

Salah satu penyebab turunnya peranan pertanian, kehutanan dan perikanan adalah berkurangnya jumlah luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Transportasi dan perdagangan mengalami penurunan karena semakin banyaknya Masyarakat memiliki fasilitas kendaraan pribadi.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah, laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahann jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Payakumbuh pada tahun 2022 meningkat disbanding tahun 2021, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan produksi hampir diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi, nilai PDRB Kota Payakumbuh tahun 2022 atas dasar harga konstan tahun 2010 mencapai 4,78 triliun rupiah, nilai tersebut naik dari 4,57 triliun rupiah pada tahun 2021, hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,52 persen, jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang hanya 3,58 persen.

Pelonggaran aturan yang terkait dengan mobilitas Masyarakat yang lebih luas diterapkan pemerintah pada tahun 2022 dan pelaksanaan kegiatan vaksinasi covid 19 yang terus digencarkan dan mencakup hampir seluruh kelompok Masyarakat serta pemberian insentif-insentif yang membuat para pelaku usaha dapat Kembali melakukan aktifitas usaha dengan lebih lancar telah memberikan dampak yang baik terhadap kegiatan social dan ekonomi Masyarakat secara umum, hal ini terbukti dengan tercapainya pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2022.

Seperti pada tahun 2021, pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi positif dialami oleh hampir semua lapangan usaha bahkan beberapa lapangan usaha tumbuh lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi secara umum dan ada juga lapangan usaha yang pertumbuhannya lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara umum.

Terdapat delapan lapangan usaha/kategori yang mengalami pertumbuhan lebih dari 5 persen yaitu : lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,10 persen, lapangan usaha jasa lainnya sebesar 8,09 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,80 persen, lapangan usaha jasa perumahan sebesar 6,70 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,21 persen, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,55 persen, lapangan usaha jasa Pendidikan sebesar 5,30 persen dan lapangan usaha real estat sebesar 5,13 persen.

Sedangkan sembilan lapangan usaha/kategori lainnya yang pertumbuhannya kurang/dibawah dari 5 persen adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 4,60 persen, lapangan usaha jasa Kesehatan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 4,40 persen, lapangan usaha jasa keuangan tumbuh sebesar 4,01 persen, lapangan usaha konstruksi tumbuh 3,36 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 3,22 persen, lapangan usaha pengadaan Listrik dan gas tumbuh sebesar 3,22 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh sebesar 2,69 persen, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 2,13 persen dan lapangan usaha administrasi pemerintahan tumbuh sebesar -1,06 persen, sebagai dilihat pada tabel 1.6 berikut :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,24	(0,24)	1,53	1,65	2,69
2	Pertambangan dan Penggalian	3,63	0,17	(2,09)	4,04	4,60

3	Industri Pengolahan	4,52	2,83	(3,21)	2,66	2,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,07	2,43	(6,22)	2,79	3,23
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,28	2,35	(1,65)	3,32	6,21
6	Konstruksi	7,35	6,82	(5,95)	1,43	3,36
7	Pengadaan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	7,08	6,67	(1,00)	3,58	5,55
8	Transportasi dan Pergudangan	6,70	6,37	(9,40)	5,14	3,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,08	8,05	(11,62)	7,29	15,10
10	Informasi dan Komunikasi	8,88	9,26	10,25	5,57	6,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	1,81	1,29	6,17	4,01
12	Real Estate	4,00	5,32	0,19	1,72	5,13
13	Jasa Perusahaan	4,04	4,55	(4,15)	1,02	6,70
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,66	4,78	(0,48)	0,65	(1,06)
15	Jasa Pendidikan	7,89	8,25	6,22	3,64	5,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,25	7,53	8,87	5,59	4,40
17	Jasa Lainnya	7,81	7,93	(9,95)	4,19	8,09
Pertumbuhan PDRB		6,02	5,89	(1,65)	3,59	4,52

Sumber : BPS, Buku PDRB Kota Payakumbuh menurut lapangan usaha 2018-2022, Tahun 2023

c. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator Tingkat kemakmuran penduduk disuatu daerah / wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk, oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan factor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Payakumbuh atas dasar harga berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 cenderung mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2019. Pada tahun 2018 PDRB perkapita tercatat sebesar 45,88 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun

2022 mencapai 57,56 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi.

Tabel 1.7
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita
Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022

Nilai PDRB/GRDP (Jutaan Rupiah)						
		2018	2019	2020	2021	2022
1	ADHB/at current price	6.134.700,30	6.825.167,93	6.827.094,79	7.303.109,35	8.250.302,95
2	ADHK/ at 2010 constant price	4.328.662,76	4.488.210,66	4.414.294,05	4.572.896,51	4.779.584,64
PDRB per kapita / per Capita GRDP (Jutaan Rupiah)						
4	ADHB/at current price	45,88	49,88	48,91	51,73	57,56
5	ADHK/ at 2010 constant price	31,70	32,80	31,63	32,39	33,34
6	Pertumbuhan PDRB per kapita AHDK 2010/Growth of per capita GRDP at 2010 constant price	4,53	3,46	(3,56)	2,40	2,93
8	Jumlah Penduduk (orang)	133.703	135.573	139.576	141.184	143.325
9	Pertumbuhan Jumlah Penduduk (persen)	1,43	1,40	2,95	1,15	1,52

Sumber : BPS, Buku PDRB Kota Payakumbuh menurut lapangan usaha 2018-2022

1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2023. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi :

pembandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023, pembandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022, perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RPD tahun 2023 – 2026, untuk beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan Standar Nasional; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota dalam rangka peningkatan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2021-2025) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022, Pemerintah Kota Payakumbuh sebagai salah satu daerah dengan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 diamanahkan untuk menyusun dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026 Kota Payakumbuh yang menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD setiap tahunnya.

2.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh ini didasarkan pada hasil telaahan kajian kebijakan dan agenda pembangunan sektoral, Regional, Nasional dan Global seperti yang dituangkan pada BAB IV RPD Kota Payakumbuh. Dengan demikian maka tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 diharapkan telah selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 dan RPJMD daerah tetangga. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

TUJUAN		SASARAN	
1	Terwujudnya Pembangunan manusia yang berkualitas	1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran
		5	Meningkatnya sektor strategis
		6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh
3	Terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.
		8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima
4	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.	9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan
		10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		11	Meningkatnya kualitas penataan kota
5	Meningkatnya tata kehidupan masyarakat yang agamis, berkarakter dan berbudaya	12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

2.1.3 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026

Sasaran		Indikator Sasaran	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Angka harapan lama sekolah
		2	Rata-rata lama sekolah
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka usia harapan hidup
		4	Prevalensi Stunting
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	6	Tingkat Kemiskinan
		7	Tingkat Pengangguran
5	Meningkatnya sektor strategis	8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri
		9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	11	Nilai Evaluasi AKIP Kota
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	13	Indeks SPBE
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15	Persentase Panjang jalan status kota dalam kondisi mantap

		16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya
		20	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Perjanjian Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun berdasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.
3. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
4. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
6. Dan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana tertuang pada tabel 2.3 berikut :

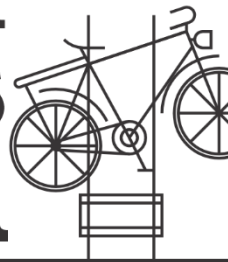
Tabel 2.3
Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	SKPD Penanggung jawab
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	1	Angka harapan lama sekolah	14,29	Disdik/BPS
		2	Rata-rata lama sekolah	11,14	Disdik/BPS
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka usia harapan hidup	78,18	Bappeda/BPS
		4	Prevalensi Stunting	16,00	Dinkes/BPS
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,01	DP3AP2KB/BPS
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	6	Tingkat Kemiskinan	5,52	Bappeda/BPS
		7	Tingkat Pengangguran	6,05	Bappeda/BPS
5	Meningkatnya sektor strategis	8	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,85	Disnaker Perind
		9	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	4,03	Diskop UKM
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10	Nilai Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	220	DPMPSTP
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel.	11	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	Setdako
		12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	Bappeda
8	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima	13	Indeks SPBE	2,50	Dinas Kominfo
		14	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,41	Setdako
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15	Persentase Panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	84,88	PUPR
		16	Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	73,09	PUPR

10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,00	Dinas Lingkungan Hidup
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,23	PUPR
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100	Disparpora
		20	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	51,06	Disdik

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan total belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 808.329.908.866,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
≥ 91 %	Sangat Tinggi
76% – 91%	Tinggi
66% – 76%	Sedang
51% – 66%	Rendah
0 – 51%	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh pada Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,29	14,30	100,07	Sangat Tinggi
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	11,14	10,88	97,67	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	Tahun	74,18	74,77	100,80	Sangat Tinggi
		Prevalensi stunting	Persentase	16	2,17	186,44	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks / Nilai	72,01	71,21	98,89	Sangat Tinggi

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,52	5,44	101,45	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran	Persentase	6,05	4,84	120,00	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
5	Meningkatnya sektor strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor industri	Persentase	2,85	2,72	95,44	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	Persentase	4,03	4,66	115,63	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	Milyar Rupiah	220,0	493,81	224,46	Sangat Tinggi

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Nilai/ Prediket	BB	BB	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks / Nilai	75	77,43	103,24	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya Pelayanan publik yang prima	Indeks SPBE	Indeks / Nilai	2,50	3,17	126,80	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks / Nilai	88,41	89,65	101,40	Sangat Tinggi

Tujuan IV : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	Persentase	84,88	85,01	100,15	Sangat Tinggi
		Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persentase	73,09	71,98	98,48	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks / Nilai	58,00	59,50	102,59	Sangat Tinggi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	80,23	80,24	100,01	Sangat Tinggi

Tujuan V : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Satuan	2023			Kategori
				Target	Realisasi	%	
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	Persentase	100	100	100,00	Sangat Tinggi
		Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	Persentase	51,06	56,44	110,44	Sangat Tinggi

3.1 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD 2013-2026 maupun RKPD Tahun 2023. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kota Payakumbuh Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama RPD 2023-2026, dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Payakumbuh 060.2/177/Wk-Pyk/2023 Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Berdasarkan dokumen tersebut ditetapkan 12 (dua belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	2 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2 indikator
Sasaran 3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	1 indikator

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Sasaran 1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	2 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya sektor strategis	2 indikator
Sasaran 3	Meningkatnya investasi	1 indikator

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

Sasaran 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2 indikator
Sasaran 2	meningkatnya Pelayanan pulik yang prima	2 indikator

Tujuan IV : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Sasaran 1	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	1 indikator
Sasaran 2	Meningkatnya kualitas penataan kota	1 indikator

Tujuan V : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

Sasaran 1	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	2 indikator
-----------	---	-------------

Secara umum Pemerintah Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	2	98,87					
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	143,62					
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	1	98,89					

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	2	110,72					
5	Meningkatnya sektor strategis	2	105,54					
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	1	224,46					

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
6	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	2	101,62					
	Meningkatnya Pelayanan pulik yang prima	2	114,10					

Tujuan IV : Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
7	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	2	99,32					
8	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	1	102,59					
	Meningkatnya kualitas penataan kota	1	100,01					

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran	0-49,9	50,00-64,99	65,00-74,99	75,00-89,99	>90
				Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
9	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	2	105,27					

Tujuan 1 : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

Peningkatan kapasitas dan kualitas suatu bangsa melalui pembangunan SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM di Kota Payakumbuh antara lain adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Di samping itu, peningkatan peran perempuan dengan program pemberdayaan dan perlindungan anak, sebagai unsur dari masyarakat yang berperan besar dalam menentukan masa depan bangsa.

Tujuan 1 (satu) dalam dokumen perencanaan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026, yaitu terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas didukung dengan 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk masing-masing sasaran memiliki indikator kinerja, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Sasaran dan Indikator Tujuan 1 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
	Tujuan 1 : terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,96	
1.	Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing	Angka Harapan Lama Sekolah	14,29	
		Rata-rata Lama Sekolah	11,14	
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan hidup	74,18	
		Prevalensi Stunting	16,00	

3.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,01	
----	---	----------------------------------	-------	--

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikator sasaran pada Tujuan 1 ini diuraikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Data Capaian Sasaran Tujuan 1 Tahun 2023

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,29	14,29	14,3	100,07	Sangat Tinggi	14,32	99,86
2	Rata-rata Lama Sekolah	10,82	11,14	10,88	97,67	Sangat Tinggi	11,51	94,53
3	Angka Usia Harapan Hidup	74,14	74,18	74,77	100,80	Sangat Tinggi	74,61	100,21
4	Prevalensi Stunting	18	16	2,17	186,44	Sangat Tinggi	12,00	181,92
5	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21	72,01	71,21	98,89	Sangat Tinggi	73,51	96,87

Sumber : BPS, 2023

Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing. Untuk mencapai sasaran tersebut, menjadi salah satu sasaran dalam rangka terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas. Tolak ukur atau indikator sasaran yang digunakan adalah “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”, salah satunya indikatornya dari aspek pendidikan, yaitu indikator angka harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing tahun 2023 tersaji pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas SDM

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks pembangunan Manusia (IPM)	79,53	79,96	80,14	100,23	Sangat Tinggi	81,22	98,67
2	Angka Harapan Lama Sekolah	14,29	14,29	14,3	100,07	Sangat Tinggi	14,32	99,86
3	Rata-rata Lama sekolah	10,82	11,14	10,88	97,67	Sangat Tinggi	11,51	94,53

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa realisasi IPM Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar 80,14 dari nilai yang ditargetkan sebesar 79,96 atau tercapai sebesar 100,22% dengan kategori sangat tinggi. Capaian pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 79,53 atau naik 0,61 poin dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 98,67%.

Untuk indikator angka harapan lama sekolah, tahun 2023 Kota Payakumbuh sebesar 14,30 dari nilai yang ditargetkan 14,29 dengan kategori sangat tinggi. Capaian pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 14,29 atau naik 0,01 poin dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 99,86%.

Sedangkan untuk indikator rata-rata lama sekolah, tahun 2023 Kota Payakumbuh sebesar 10,88 dari nilai yang ditargetkan 11,14 dengan kategori sangat tinggi. Capaian pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 10,82 atau naik 0,06 poin dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 94,53%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menggambarkan peningkatan kualitas pembangunan manusia pada suatu wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan juga untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara masuk kedalam kelompok negara maju, negara

berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup di suatu wilayah.

Tabel 3.7
Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat Tahun 2019 - 2023

Wilayah	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Mentawai	61,26	61,09	61,35	62,19	65,79
Kab. Pesisir selatan	70,08	69,90	70,03	70,84	72,24
Kab. Solok	69,08	69,08	69,24	70,02	71,92
Kab. Sijunjung	67,66	67,74	67,86	68,69	72,30
Kab. Tanah datar	72,14	72,33	72,46	73,29	75,57
Kab. Padang Pariaman	70,59	70,61	70,76	71,63	74,54
Kab. Agam	72,37	72,46	72,57	73,29	74,44
Kab. Lima Puluh Kota	69,67	69,47	69,68	70,28	72,05
Kab. Pasaman	66,46	66,64	66,77	67,41	69,85
Kab. Solok selatan	68,94	69,04	69,23	69,71	72,24
Kab. Dharmasraya	71,52	71,51	71,76	72,30	73,87
Kab. Pasaman Barat	68,21	68,49	68,76	69,57	72,03
Kota Padang	82,68	82,82	82,90	83,29	83,98
Kota Solok	78,38	78,29	78,41	79,23	79,66
Kota Sawahlunto	72,39	72,64	72,88	73,73	75,91
Kota Padang Panjang	78,00	77,93	77,97	78,78	79,76
Kota Bukittinggi	80,71	80,58	80,70	81,42	81,88
Kota Payakumbuh	78,95	78,90	79,08	79,53	80,14
Kota Pariaman	76,90	77,07	77,65	77,65	79,76
SUMBAR	72,38	72,65	73,26	73,26	75,64
INDONESIA	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel 3.7, dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Payakumbuh lebih tinggi dari rata-rata provinsi

Sumatera Barat dan Nasional. Tahun 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh 80,14 sedangkan rata-rata provinsi 75.64 dan Indonesia 74,39. Pada Tahun 2023 untuk tingkat provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menempati posisi ketiga setelah Kota Padang (83.98) dan Kota Bukittinggi (81.88).

a. Indikator sasaran angka harapan lama sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Tabel 3.8
Harapan Lama Sekolah di Sumatera Barat Tahun 2019 sd 2023

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	12.76	12.82	12.89	12.89	12.90
Kab. Pesisir Selatan	13.31	13.32	13.33	13.35	13.36
Kab. Solok	13.03	13.04	13.05	13.30	13.55
Kab. Sijunjung	12.36	12.37	12.38	12.64	12.72
Kab. Tanah Datar	14.32	14.33	14.34	14.59	14.78
Kab. Padang Pariaman	13.62	13.67	13.68	13.93	14.19
Kab. Agam	13.86	13.87	13.88	13.88	13.89
Kab. Lima Puluh Kota	13.28	13.29	13.30	13.40	13.41
Kab. Pasaman	12.79	12.80	12.81	13.05	13.25
Kab. Solok Selatan	12.70	12.71	12.72	12.73	12.80
Kab. Dharmasraya	12.42	12.43	12.44	12.51	12.68
Kab. Pasaman Barat	13.40	13.61	13.68	13.69	13.70
Kota Padang	16.51	16.52	16.53	16.54	16.56
Kota Solok	14.31	14.32	14.33	14.34	14.36
Kota Sawahlunto	13.16	13.17	13.18	13.42	13.69
Kota Padang Panjang	15.05	15.06	15.07	15.07	15.29
Kota Bukittinggi	14.96	14.97	14.98	14.99	15.01
Kota Payakumbuh	14.25	14.26	14.27	14.29	14.30
Kota Pariaman	14.53	14.54	14.55	14.61	14.79
Provinsi Sumatera Barat	14.01	14.02	14.09	14.10	14.11
Indonesia	12.95	12.98	13.08	13.1	13.15

Jika dilihat dari tabel 3.8, untuk harapan lama sekolah Kota Payakumbuh di Tahun 2023 sebesar 14,30. Jika dibandingkan dari 7 Kota

di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menduduki urutan ke 6 (enam), dengan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan provinsi ataupun nasional. Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah, di tahun 2023 dengan lama 14.30 tahun, atau setara dengan diploma (DII). Harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

b. Indikator sasaran Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Jika dilihat dari tabel 3.9, untuk Kota Payakumbuh di tahun 2023 rata-rata lama sekolah 10,88 tahun, di atas rata-rata provinsi ataupun nasional. Jika dibandingkan dari Kota lain di Sumatera Barat Kota Payakumbuh menduduki posisi ke 5 dari 7 Kota di Sumatera Barat.

Tabel 3.9
Rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat Tahun 2019 sd 2023

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Kepulauan Mentawai	7.08	7.09	7.20	7.48	7.76
Kab. Pesisir Selatan	8.25	8.26	8.27	8.43	8.58
Kab. Solok	7.85	7.86	7.87	7.89	7.90
Kab. Sijunjung	8.10	8.11	8.12	8.30	8.57
Kab. Tanah Datar	8.45	8.61	8.62	8.90	9.02
Kab. Padang Pariaman	7.86	7.87	7.88	8.16	8.41
Kab. Agam	8.85	8.96	8.97	8.98	9.22
Kab. Lima Puluh Kota	7.98	7.99	8.07	8.08	8.12
Kab. Pasaman	7.86	8.09	8.10	8.11	8.13
Kab. Solok Selatan	8.16	8.28	8.32	8.41	8.69
Kab. Dharmasraya	8.46	8.47	8.55	8.56	8.71
Kab. Pasaman Barat	8.06	8.19	8.27	8.55	8.81
Kota Padang	11.34	11.58	11.59	11.60	11.62
Kota Solok	11.02	11.03	11.04	11.35	11.36

Kota Sawahlunto	9.97	10.17	10.32	10.43	10.44
Kota Padang Panjang	11.45	11.62	11.63	11.92	11.94
Kota Bukittinggi	11.32	11.33	11.34	11.63	11.64
Kota Payakumbuh	10.72	10.73	10.81	10.82	10.88
Kota Pariaman	10.37	10.59	10.67	10.78	10.79
Provinsi Sumatera Barat	8.92	8.99	9.07	9.18	9.28
Indonesia	8.34	8.48	8.54	8.69	8.77

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena pada akhirnya dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Kegunaan dari indikator ini adalah untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya.

Pendidikan di Kota Payakumbuh tidak hanya berbicara tentang terciptanya sarana, prasarana, ataupun tenaga pengajar saja. Lebih dari itu, mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya harus ditanamkan ke pelajar di Kota Payakumbuh. Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Payakumbuh saat ini sudah setingkat SMA, yaitu 10,88 tahun.

Angka ini dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Misalnya meningkatkan pembangunan unit sekolah atau ruang kelas baru, pemberian beasiswa bagi penduduk kurang mampu, pembebasan uang sekolah, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, dan sebagainya.

Tabel 3.10
Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023

Jumlah Sarana Prasarana Pendidikan		Akreditasi		
		A	B	C
<i>Sekolah TK / PAUD Negeri</i>	6	3	3	-
<i>Sekolah SDN/MIN</i>	66	55	11	-
<i>Sekolah SMPN/MTSN</i>	12	10	2	-

<i>Sekolah TK /PAUD Swasta</i>	131	10	71	50
<i>Sekolah SD/MI Swasta</i>	18	7	3	1
<i>Sekolah SMP/MTS Swasta</i>	10	6	-	4

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2023

Dari Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa jumlah sekolah di Kota Payakumbuh sebanyak 246 sekolah, dengan jumlah TK/PAUD sebanyak 139 sekolah. SD/MIN sebanyak 74 sekolah, SMP/MTSN sebanyak 22 sekolah.

Apabila kita melihat sebaran sekolah yang ada di Kota Payakumbuh menurut tingkat pendidikan sudah cukup merata di setiap kecamatan. Hal ini tentu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pendidikan bagi anak usia sekolah. Hal ini dapat menjadi daya ungkit dalam rangka meningkatkan angka Rata-rata lama sekolah di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.11
Jumlah Kelas, Rombel, Murid dan Rata-rata per Kelas menurut
Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas	Rombel	Murid	Rata-rata Murid per Kelas
1	Taman Kanak-kanak/RA	234	215	2975	13
	Negeri	17	15	241	14
	Swasta	217	200	2734	13
2	Sekolah Dasar/MI	605	716	17425	25
	Negeri	515	532	12935	25
	Swasta	175	184	4490	25
3	SMP/MTs	389	387	11551	29
	Negeri	256	245	7767	30
	Swasta	133	142	3784	28
4	SMA/SMK/MA	432	481	14107	28
	Negeri	314	372	11972	38
	Swasta	432	109	2135	18

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel 3.11, untuk rata-rata murid per kelas pada tingkat Taman Kanak-kanak/RA sebanyak 13 murid per kelas, tingkat SD/MI sebanyak 25 murid per kelas, tingkat SMP/MTs sebanyak 29 Murid per kelas dan tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 28 murid per kelas. Apabila melihat hal tersebut, untuk tingkat kenyamanan murid dalam menerima pembelajaran di sekolah dapat disebut layak. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Payakumbuh.

Tabel 3.12
Rasio Guru dan Murid menurut
Tingkat Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Kecamatan	Murid	Guru	Rasio
1	Taman Kanak-kanak/RA	2975	329	9
	Negri	241	22	11
	Swasta	2734	307	9
2	Sekolah Dasar/MI	17425	1068	16
	Negri	12935	766	17
	Swasta	4490	302	15
3	SMP/MTs	11551	823	14
	Negri	7767	482	16
	Swasta	3784	341	11
4	SMA/SMK/MA	14107	1215	12
	Negri	11972	894	13
	Swasta	2135	321	7

Sumber : Kota Payakumbuh Dalam Angka 2023

Berdasarkan Tabel diatas, untuk rasio guru dan murid tingkat Taman Kanak-kanak/RA sebesar 1:9, tingkat SD/MI 1:16, tingkat SMP/MTs sebesar 1:13 dan tingkat SMA/SMK/MA sebesar 1:11. Hal ini menggambarkan bahwa secara kuantitas jumlah guru yang tersebar di sekolah cukup untuk melayani murid yang ada di sekolah Kota Payakumbuh.

Strategi untuk mewujudnya sasaran meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, merata dan berkeadilan (merdeka belajar). Strategi ini dengan arah kebijakan
 - a. Pemberian bantuan pendidikan melalui program Indonesia pintar
 - b. Penguatan digitalisasi sekolah
 - c. Penyediaan sarana pendidikan (TIK)
 - d. Peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum
 - e. Sekolah penggerak dan guru penggerak
2. Meningkatkan budaya literasi serta peningkatan layanan pengelolaan perpustakaan, strategi ini dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Mendorong pengembangan budaya literasi dan layanan pengelolaan perpustakaan berbasis IT

- b. Pengembangan budaya literasi berbasis masyarakat
- 3. Peningkatan kualitas pemuda dan olah raga strategi ini dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Peningkatan pembibitan atlit dan pembinaan olahraga prestasi
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program yang mendukung untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing :

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program pengembangan kurikulum
3. Program pendidik dan tenaga kependidikan
4. Program pengendalian perijinan pendidikan
5. Program pembinaan perpustakaan
6. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
7. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
8. Program pengembangan kapasitas kepramukaan
9. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Sasaran 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan diperlukan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman dan berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” menjadi salah satu sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Tolak ukur atau indikator sasaran yang digunakan adalah “Angka Usia Harapan Hidup” dan “Prevalensi Stunting”.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat tahun 2023 tersaji pada Tabel 3.13

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Angka Usia Harapan Hidup	74,14	74,18	74,77	100,80	Sangat Tinggi	74,61	100,21
2	Prevalensi Stunting	17,8	16	2,17	186,44	Sangat Tinggi	12	181,92

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar 74,77 dari nilai yang ditargetkan sebesar 74,18 atau tercapai sebesar 100,80% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 74,14 atau naik 0,63 poin dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 100,21%. Sementara untuk realisasi Prevalensi Stunting Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar dari nilai yang ditargetkan sebesar 16 atau tercapai sebesar 100,01% dengan kategori Sangat Tinggi. Capaian pada tahun 2023 ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 79,08 atau naik 0,45 poin dari tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 100,01%

Tabel 3.14
Angka Usia Harapan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023

No	Dimensi	2019	2020	2021	2022	2023
	Kesehatan					
1	Angka Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,61	73,74	73,84	74,14	74,77

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Usia Harapan Hidup Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 Angka Usia Harapan Hidup Kota

Payakumbuh sebesar 74,77 tahun lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 74,14 tahun.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamakan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

Angka Usia Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. Manfaat mengetahui angka harapan hidup adalah untuk menentukan tingkat kemakmuran penduduk dalam suatu daerah. Umur yang panjang ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari faktor mendasar seperti jenis kelamin, ras, kondisi medis seseorang, dan riwayat kesehatan keluarga, hingga ditentukan oleh lingkungan, keadaan sosial dan psikis, juga ekonomi.

Faktor-faktor seperti lingkungan, sosial-ekonomi, dan demografi lah yang membuat suatu populasi penduduk di suatu negara dapat hidup lebih lama dibandingkan populasi di negara lain, hal itu tercermin dari suatu penghitungan statistika bernama Angka Harapan Hidup (*Life Expectancy*) yang biasa diukur dalam satu negara dan dibandingkan dengan negara lain.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Meningkatnya usia harapan hidup juga membuat jumlah orang lanjut usia (lansia) semakin banyak. Hal ini bisa berdampak positif, bisa juga negatif. Bertambahnya jumlah lansia bisa berdampak positif jika lansia

dalam keadaan sehat. Namun jika dalam keadaan sakit, maka potensi kerugian negara dari pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga akan meningkat. Jumlah kepesertaan JKN Kota Payakumbuh tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.15
Jumlah Kepesertaan JKN Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2023

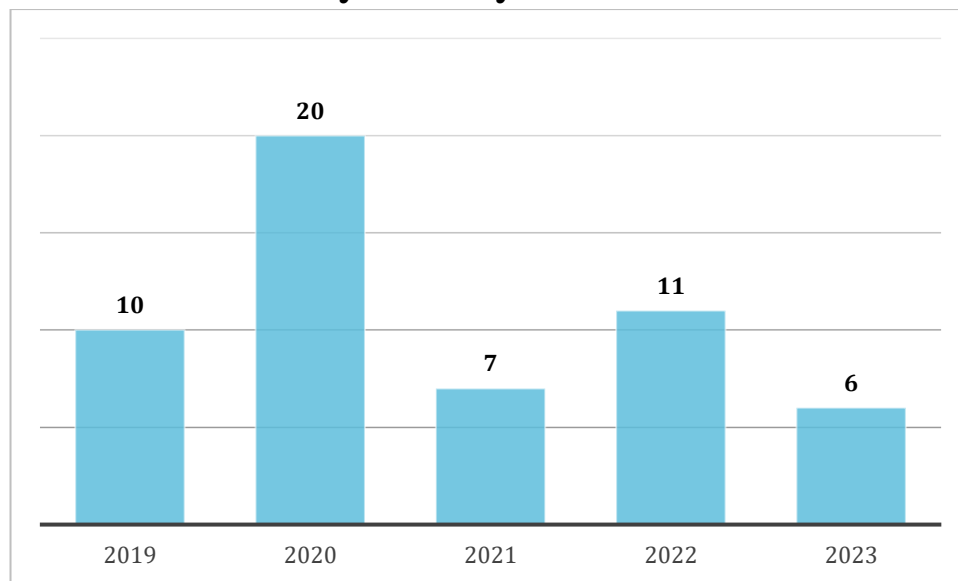
No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepesertaan JKN	Persentase
1	2019	135.573	121.131	89,30
2	2020	140.201	124.128	88,54
3	2021	141.171	129.584	91,79
4	2022	141.813	137.077	96,66
5	2023	144.727	142.429	98,29

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Kepesertaan JKN ini terdiri dari Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran yang terdiri dari dua kepesertaan yaitu kepesertaan yang dibiayai dengan APBN dan kepesertaan yang dibiayai oleh APBD dan non Penerima bantuan iuran yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan Pekerja Mandiri. Terjadi kenaikan jumlah kepesertaan JKN pada tahun 2023 hingga mencapai 98,29%. Kepesertaan ini meningkat karena di Kota Payakumbuh selalu dilakukan validasi dan pengusulan kepesertaan setiap bulannya melalui Dinas Sosial, yang kemudian di teruskan melalui Dinas Kesehatan untuk masuk dalam program Jaminan Kesehatan. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target *Universal Health Coverage (UHC)* di Kota Payakumbuh.

Salah satu indikator utama kesehatan daerah yang juga menjadi bahan analisis dalam menilai perkembangan kesehatan di suatu daerah adalah Indikator Angka Kematian Bayi. Indikator ini merupakan indikator yang amat penting dalam menilai status kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Terkait dengan indikator ini di Kota Payakumbuh, dapat digambarkan sebagaimana Grafik 3.1.

Grafik. 3.1
Kasus Kematian Bayi Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

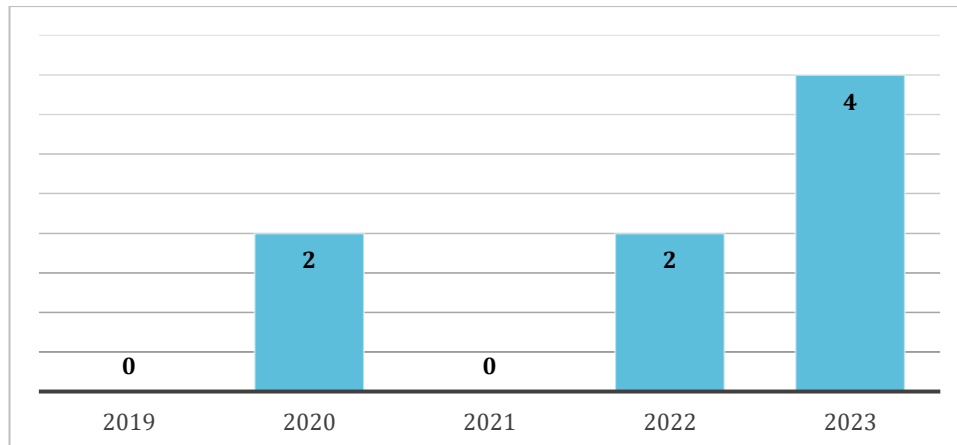


Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Perkembangan indikator Angka Kematian Bayi di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi. Ada beberapa faktor penentu yang menyebabkan terjadinya kematian bayi yang sebagian besar terjadi karena faktor penjangaan kondisi tubuh ibu hamil pada masa kehamilan. Hal ini terpengaruh juga akibat proses rujukan yang masih perlu dibenahi mulai dari tingkat keluarga yang terlambat memeriksakan secara dini ke pusat layanan kesehatan, kondisi cacat bawaan pada bayi, seperti kelainan pernafasan dan jantung, dan perawatan ibu semasa kehamilan serta kondisi gizi ibu hamil sehingga menyebabkan berat badan lahir rendah yang rentan terhadap resiko kematian bayi pasca persalinan.

Selanjutnya dengan indikator lain yang juga sangat penting, yakni Angka Kematian Ibu Melahirkan. Untuk indikator ini dapat dijabarkan untuk tingkat Kabupaten/Kota berupa Kasus Kematian Ibu melahirkan (angka absolut), Gambaran perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kota Payakumbuh dalam 5 (lima) tahun terakhir tergambar pada grafik 3.2.

Grafik. 3.2
Kasus Kematian Ibu Melahirkan Tahun 2019 – 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Kasus kematian Ibu melahirkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Setiap kasus kematian ibu selalu dilaksanakan Autopsi Verbal. Tahun 2019 - 2023 kasus kematian ibu melahirkan umumnya disebabkan karena eklamsia (tekanan darah tinggi) selama proses persalinan dan komplikasi infeksi (TBC). Pada tahun 2019 tidak ada kasus dan Tahun 2020 terdapat 2 kasus dan pada Tahun 2022 terdapat 2 kasus. Sementara untuk tahun 2023, terdapat 4 kasus kematian Ibu melahirkan di Kota Payakumbuh. Dalam rangka penurunan kasus kematian Ibu melahirkan ini perlu ditingkatkan lagi kemampuan dalam pelayanan *Antenatal Care* (ANC) yang berkualitas sebab kasus-kasus kematian Ibu dapat dideteksi dari resiko tinggi kehamilannya sejak dini melalui ANC.

Usia Harapan Hidup juga berhubungan dengan fasilitas kesehatan dan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk Tahun 2023, sarana kesehatan yang ada di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16
Sarana Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Jenis	Jumlah
1	Rumah Sakit	4
2	Puskesmas	8
3	Balai Pengobatan	3
4	Klinik Bersalin	1
5	Puskesmas Pembantu	23
6	Poskeskel	14
7	Puskesmas Keliling	18
8	Posbindu	77
9	Posyandu	165
10	Dokter Praktek	82
11	Bidan Praktek	32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023



Gambar 3.1. Puskesmas Padang Karambia di Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh

Sementara untuk Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh dapat dilihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17
Sumber Daya Kesehatan Kota Payakumbuh Tahun 2023

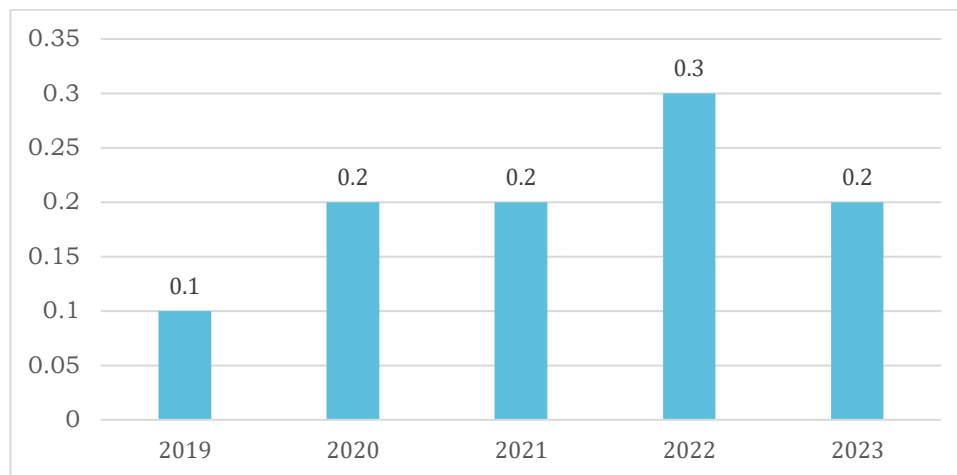
No	Jenis	Jumlah
1	Struktural	36 orang
2	Non Struktural	255 orang
3	Dokter Spesialis	33 orang
4	Dokter Umum	44 orang
5	Dokter Gigi	16 orang

6	Apoteker	24 orang
7	Sarjana Kesehatan Masyarakat	24 orang
8	Sarjana Keperawatan	62 orang
9	Sarjana Non Kesehatan	27 orang
10	Bidan	138 orang
11	Perawat	278 orang
12	Terapis Gigi dan Mulut	18 orang
13	Asisten Apoteker	41 orang
14	Rekam Medis	36 orang
15	Nutrisionis	21 orang
16	Analisis Laboratorium	34 orang
17	Sanitasi lingkungan	18 orang
18	Refraksionis	4 orang
19	Promosi Kesehatan	16 orang
20	Administrator kesehatan	5 orang
21	Radiologi	7 orang
22	Fisioterapi	5 orang
23	Epidemiolog Kesehatan	10 orang
24	Asisten Penata Anestesi	5 orang
25	Penata Anestesi	3 orang
26	Tenaga Keamanan	21 orang
27	Tenaga Kebersihan	35 orang
	Jumlah	1103 orang

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Status gizi balita juga menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Persentase prevalensi balita kekurangan gizi merupakan cakupan balita Bawah Garis Merah (BGM) yang diperoleh dari perhitungan persentase jumlah balita yang memiliki berat badan dibawah garis merah pada Kartu Menuju Sehat (KMS) dibagi dengan jumlah rata-rata balita yang ditimbang di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.

Grafik. 3.3
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Payakumbuh
Tahun 2019 – 2023



Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Defenisi Operasional Balita Kekurangan Gizi adalah gabungan antara presentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang yang diperoleh dari hasil kegiatan Pemantauan Status Gizi Balita (PSG). PSG ini dilakukan dengan cara penimbangan massal pada balita di setiap posyandu dengan cakupan balita ditimbang (D/S) minimal 80%.

Pada tahun 2020 s.d 2021 presentase Balita Gizi Buruk stagnan pada angka 0,2%, namun secara umum prevalensi balita kekurangan gizi di Kota Payakumbuh periode 2019-2023 tidak mengkhawatirkan dan semakin membaik, karena dari pencapaiannya masih jauh di bawah standar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan (<15,0%). Walaupun angka kekurangan gizi pada balita masih dibawah SPM harus tetap diwaspadai karena kasus-kasus balita kekurangan ini dapat memicu terjadinya Kurang Energi Protein (KEP) pada Balita yang menyebabkan Marasmus atau Kwashiorkor.

Usia harapan hidup terus membaik bagi sebagian besar orang Indonesia, namun sejumlah penyakit masih menjadi penyebab tingginya angka kematian dini di Indonesia. Berikut perkembangan 10 penyakit terbanyak di Kota Payakumbuh selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.18
10 Penyakit Terbanyak di Kota Payakumbuh Tahun 2019 - 2023

Jenis Diagnosis Penyakit	Jumlah Kunjungan				
	2019	2020	2021	2022	2023
ISPA	16.795 (1)	9.393(2)	6.357 (2)	11.805 (2)	9.035 (2)
Hipertensi primer	12.381 (2)	9.761(1)	12.934(1)	11.360(1)	12.312(1)
Penyakit pulpa dan jar. Perifikal	5.252 (3)	1.754(6)	1.410(5)	1.791(7)	2.473(5)
Nasofaringitis akut (Common Cold)	3.149 (7)	-	1.391(6)	-	-
Penyakit kulit Alergi	-	-	-	-	-
Rheumatoid	3.167 (6)	-	-	-	-
Gangguan Refraksi dan Akomodasi	-	-	-	-	-
Diare	-	-	-	-	-
Penyakit saluran pernapasan atas lainnya	-	-	-	-	-
Diabetes	4.474 (4)	4.512(3)	4.755(3)	3.826(3)	3.900(3)
Gasteritis	3.007 (8)	2.917(4)	-	2006 (6)	1708 (7)
Dispepsia	-	619(9)	-	1605(8)	1998(6)
Cepalgia	-	-	-	-	-
Dermatitis	3.395 (5)	2.168(5)	1.290(8)	1409(9)	1321(10)
Kelainan Refraksi	-	-	-	-	-
Myalgia	-	-	-	-	-
Jantung	2.319 (9)	-	-	-	-
Karies Gigi	1.693 (10)	-	-	-	-
Vulnus	-	1606(7)	2.070(4)	3.137(4)	3.146(4)
Febris	-	573(10)	1.270(7)	1.290(10)	1665(8)
Gout Arthritis	-	1148(8)	-	-	-
Gastroenteritis	-	-	-	2.701(5)	1.584(9)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, 2023

Dari Tabel 3.18 dapat terlihat dalam lima tahun terakhir jenis penyakit yang paling banyak di derita oleh masyarakat Payakumbuh untuk ranking pertama dan kedua adalah penyakit Hipertensi dan ISPA. Hipertensi dan ISPA atau Inveksi Saluran Pernapasan Atas biasanya terkait dengan pola hidup yang ada ditengah masyarakat itu sendiri, karena kedua jenis penyakit ini disebabkan oleh pola hidup yang kurang memperhatikan

kesehatan. Hipertensi terkait dengan pola hidup baik makan maupun aktifitas fisik dalam kehidupan, sementara ISPA terkait pada kualitas udara yang ada disekitar pasien bisa saja disebabkan karena asap rokok atau pembakaran sampah yang menyebabkan penurunan mutu udara.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Segenap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal tersebut menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjamin kedudukan warga negara dimata hukum dan pemerintahan yang non diskriminasi, untuk seluruh rakyat Indonesia baik laki-laki maupun Perempuan.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* sejak 29 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Dalam perjalanan pelaksanaan CEDAW pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam dokumen kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) , yang terdiri dari 17 Tujuan (*Goal*) dan 169 sasaran (target). Dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, untuk : Mencapai Kesetaraan Gender serta Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan.

Tujuan 5 SDGs tentang Mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, memiliki 5 target yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan

4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.

Visi dari ke 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender yang tengah berjalan di Indonesia.

Isu pengarusutamaan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional melalui penghapusan diskriminasi gender. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 mencantumkan sasaran pembangunan perspektif gender yaitu peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di level pusat maupun daerah.

Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah upaya penanganan untuk melindungi dan memenuhi hak perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah :

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
- c. Memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Strategi dan kebijakan pembangunan berbagai bidang-bidang yang lain seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi tersebut harus didukung oleh peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan kesetaraan gender. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan maka diperlukan program-program untuk mendukung pembangunan kualitas perempuan

agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh, dan berdaya saing. Untuk mengevaluasi sejauh mana prioritas pembangunan sudah responsif gender dan mendukung pengarusutamaan gender dapat dilihat dari analisa terhadap data terpilah gender. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran nyata tentang besar kecilnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender saat ini telah dapat diukur, salah satunya adalah dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 3.19
Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Dimensi	Indikator
Keterwakilan di parlemen	Proporsi Keterwakilan di Parlemen Laki-Laki dan perempuan
Pengambilan keputusan	Proporsi dari manajer, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi, lakilaki dan perempuan
Distribusi pendapatan	Upah Buruh Non Pertanian, Laki-Laki dan Perempuan

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender tahun 2023 tersaji pada Tabel berikut ini

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71,21	72,01	71,21	98,89	Sangat Tinggi	73,51	96,87

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh dan RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, 2023

Berdasarkan Tabel 3.15 dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar 71,21 dari nilai yang ditargetkan sebesar 72,01 atau tercapai sebesar 98,89 % dengan kategori sangat tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir RPD Kota Payakumbuh, capaian tahun 2023 adalah sebesar 96,87%.

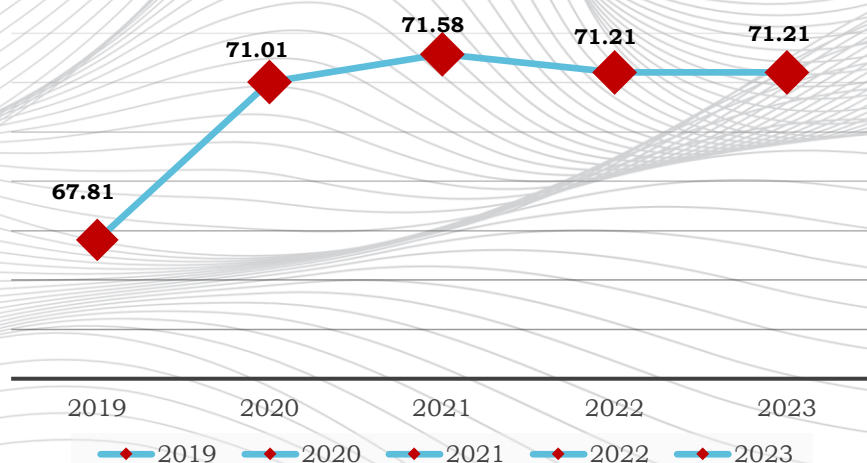
Keberhasilan dalam bidang pemberdayaan Perempuan di kota Payakumbuh dapat dilihat dari meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023. Peningkatan angka ini menunjukkan tingkat pemberdayaan gender menuju ke arah yang lebih baik. Namun, kebijakan terkait gender yang telah diterapkan diharapkan tidak hanya mampu berdampak di kota Payakumbuh, tetapi juga mampu menekan perbedaan capaian antar wilayah provinsi Sumatera Barat dan Indonesia.

Kualitas sumberdaya manusia, karakteristik sosial, budaya, keadaan geografi dan masih banyak hal yang berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan gender setiap wilayah. Berikut bisa dilihat perkembangan indeks pemberdayaan gender di Kota Payakumbuh tahun 2019-2023.

Tabel 3.21
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender
di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,81	71,01	71,58	71,21	71,21

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, 2023



Grafik 3.4
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender
di Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Payakumbuh 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif sejak tahun 2019. Pada tahun 2019, skor IDG Kota Payakumbuh mencapai 67,81, naik menjadi 71,01 dan 71,58 pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 turun dari tahun sebelumnya menjadi 71,21. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang artinya peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di kota Payakumbuh menurun. Penurunan IDG terjadi karena penurunan pada indikator pembentuknya, yaitu penurunan pada peran perempuan dalam dunia profesional.

Capaian IDG Kota Payakumbuh pada tahun 2023 sebesar 71,21 di atas capaian provinsi Sumatera Barat sebesar 65,48. Dibandingkan Kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat, capaian IDG Kota Payakumbuh menempati posisi tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.22
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kepulauan Mentawai	48.36	48.13	47.36	47.81	47.81
2	Kab. Pesisir Selatan	55.79	56.93	53.39	56.50	56.50
3	Kab. Solok	63.89	62.23	61.57	57.85	57.85
4	Kab. Sijunjung	59.96	59.93	60.46	59.43	59.43
5	Kab. Tanah Datar	58.35	58.46	59.70	58.83	58.83
6	Kab. Padang Pariaman	49.10	48.79	46.64	47.01	47.01
7	Kab. Agam	63.32	63.06	63.07	64.45	64.45
8	Kab. Lima Puluh Kota	50.18	51.09	50.59	48.40	48.40
9	Kab. Pasaman	64.22	61.57	62.74	62.96	62.96
10	Kab. Solok Selatan	50.23	49.19	47.86	48.04	48.04
11	Kab. Dharmasraya	51.42	50.87	50.66	51.33	51.33
12	Kab. Pasaman Barat	60.88	60.16	60.38	61.05	61.05
13	Kota Padang	67.49	67.53	65.33	67.99	67.99
14	Kota Solok	58.47	57.46	63.09	63.61	63.61
15	Kota Sawahlunto	66.18	65.87	65.48	65.62	65.62

16	Kota Padang Panjang	66.57	65.24	66.62	67.82	67.82
17	Kota Bukittinggi	60.99	60.33	60.19	63.37	63.37
18	Kota Payakumbuh	67.81	71.01	71.58	71.21	71.21
19	Kota Pariaman	54.47	54.41	53.42	52.62	52.62
	Provinsi Sumatera Barat	59.09	58.28	65.12	65.48	65.48

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Payakumbuh, 2023

Program Responsif Gender yang Mendukung Pencapaian Target Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Anak;
2. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
3. Pelembagaan PUG Pada Lembaga Pemerintah;
4. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan
5. Program Pemenuhan Hak Anak;
6. Program Perlindungan Perempuan;
7. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
8. Program Perlindungan Khusus Anak.
9. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
10. Pendidikan dan latihan perkoperasian;
11. Perekonomian dan Pembangunan;
12. Rehabilitasi Sosial;
13. Pendaftaran penduduk;
14. Pencatatan sipi;
15. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
16. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
18. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
19. Dukungan pelaksanaan tugas DPRD;
20. Penunjang urusan Pemerinta Daerah Kab/Kota di Sekretariat DPRD dan Dinas PU PR;
21. Pengelolaan Persampahan;
22. Pengendalian Pecemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
24. Pengelolaan Pendidikan;

25. Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
27. Aplikasi Informatika;
28. Informasi dan Komunikasi Publik;
29. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air limbah;
30. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
31. Program Kawasan Pemukiman;
32. Penyelenggaraan Pengawasan;
33. Pembinaan Perpustakaan;
34. Pengelolaan Arsip;
35. Perencanaan dan Pembangunan Industri;
36. Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja;
37. Penanggulangan Bencana;
38. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
39. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
40. program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
41. Pelayanan Penanaman Modal;
42. Pengembangan Kebudayaan;
43. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
44. Pengembangan sumber daya manusia;
45. Penyelenggaraan jalan;
46. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Permasalahan

1. Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, dan masih tingginya persentase perempuan yang bekerja di sektor informal;
2. Masih belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja;
3. Masih tingginya prevalensi kekerasan terhadap perempuan (termasuk perkawinan usia anak dan praktek-praktek berbahaya terhadap perempuan/anak perempuan);
4. Masih rendahnya partisipasi politik Perempuan di parlemen/legislatif.

5. Ketersediaan data terpilah yang responsif gender kurang memadai. Persoalan ini makin berantai manakala penyedia data pembangunan selama ini kurang memperhatikan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyelenggaraan perencanaan penganggaran.
6. Kurang tersedianya kelembagaan (peraturan, lembaga, dan mekanisme) dalam penyelenggaraan data gender dan anak, kapasitas SDM yang belum optimal serta sarana prasarana sebagai penunjang utama ketersediaan data yang masih terbatas;
7. Masih minimnya jumlah kebijakan tentang hak dan perlindungan Perempuan sehingga mengharuskan OPD pengampu urusan untuk membuat perencanaan kebijakan yang terkait;
8. Masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar *stakeholder* mengenai arti penting dan peran perempuan dalam pembangunan (pengarusutamaan gender);
9. Masih terbatasnya informasi di masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan;
10. Masih kurangnya pemahaman OPD/lembaga/instansi terkait tentang Perlindungan Perempuan;
11. Masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender PPRG di Kota Payakumbuh;
12. Belum Optimalnya peran kelembagaan PUG, sehingga pemahaman konsep Pengarusutamaan Gender masih dinilai terbatas.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana aksi

Upaya yang dilakukan kedepan terkait dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender di Kota Payakumbuh antara lain:

1. Di bidang Pendidikan, Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan;
2. Di sektor kesehatan, Indonesia, khususnya Pemerintah Kota Payakumbuh fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas

pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana;

3. Di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Kota Payakumbuh fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender;
4. Terkait pencegahan kekerasan, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi anak dan Perempuan;
5. Melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk memahami konsep dan mengimplementasikan PPRG;
6. Mendorong koordinasi dan penyelarasan kebijakan baik ditingkat Pemerintah Kota Payakumbuh dengan mengupayakan dan memaksimalkan program-program utama yang mendukung pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender;
7. Dibutuhkan komitmen, sinergi, dan kerjasama yang baik antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan perguruan tinggi terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
8. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang kritis tentang *Capacity Building*, sehingga perempuan percaya diri dan berani untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang Pembangunan;
9. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, sehingga nantinya dapat mengelola dan memimpin organisasi;
10. Memperkuat kapasitas Organisasi perempuan di tingkat lokal melalui pelatihan, diskusi dan *Capacity Building* agar mampu menyuarakan kepentingan kaumnya sendiri.

11. Meningkatkan kapasitas SDM perempuan yang maju dan mandiri serta mampu meningkatkan kontribusi dan keikutsertaan perempuan dalam pelaksanaan Pembangunan baik di bidang pendidikan, ekonomi maupun pembangunan Politik.

Tujuan 2 : Tujuan yang akan dicapai adalah, “Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dengan indikator kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini

Salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ialah laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi dikatakan bertumbuh jika produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya dan menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode waktu tertentu. Di beberapa negara berkembang tak kecuali di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi sasaran utama pembangunan. Namun persoalannya ialah sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi belumlah cukup menjadi jaminan bahwa kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara merata. Oleh karena itu, laju pertumbuhan ekonomi seyogyanya harus diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan agar hasil-hasil pertumbuhan tersebut dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sasaran pembangunan tidak hanya berhenti sampai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja seperti yang selama ini dilakukan. Melainkan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memperhitungkan pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya perekonomian ke depannya juga diharapkan mampu memiliki daya saing dengan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Terwujudnya hal tersebut diharapkan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang tapi merata dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat kota Payakumbuh.

Tujuan terwujudnya perekonomian yang berkualitas didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran
- b. Meningkatnya sektor strategis
- c. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Secara ringkas, sasaran strategis dan indikator dapat dijelaskan pada Tabel 3.23.

Tabel 3.23
Sasaran Strategis dan IKU pada Tujuan II

No	Sasaran strategis	IKU	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ kriteria
				Alasan	Formulasi/ cara pengukuran	Sumber data	
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6 Tingkat Kemiskinan	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen	BPS/ Bappeda	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan
		7 Tingkat Pengangguran	%	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	(Jumlah angkatan kerja yang menganggur : jumlah angkatan	BPS/Naker	Pengangguran terbuka, terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan

No	Sasaran strategis	IKU	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ kriteria
				Alasan	Formulasi/ cara pengukuran	Sumber data	
					kerja keseluruhan) x 100 %		mencari pekerjaan, Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
5	Meningkatnya Sektor Strategis	8 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	%	Sektor Industri adalah sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh perlu dilakukan peningkatan produktivitas sektor Industri.	((Nilai PDRB Sektor Industri tahun n dikurangi Nilai PDRB Sektor Industri tahun n-1)/ Nilai PDRB Sektor Industri tahun n-1)x100%	BPS, Dinas TK & Perindustrian	Pertumbuhan PDRB sektor industri
		9 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	Sektor Perdagangan adalah sektor yang memiliki kontribusi	((Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n dikurangi	BPS, Dinas Koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

No	Sasaran strategis	IKU	Satuan	Penjelasan			Keterangan/ kriteria
				Alasan	Formulasi/ cara pengukuran	Sumber data	
		gan		penting terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh perlu dilakukan peningkatan produktivitas sektor Perdagangan.	Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1)/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1)x100%		
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10 Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	Untuk mempercepat proses pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah realisasi investasi tahun n	DPMD-PTSP	penanaman modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan (return) di masa mendatang, tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Sumber Data : *Setdako Payakumbuh tahun 2023*

Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan ke 2 RPD yaitu Terwujudnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penjabaran tujuan ini diarahkan memberdayakan segenap potensi perekonomian secara komprehensif, sehingga berakumulasi terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dimana peningkatan ekonomi yang merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesenjangan antar penduduk. Ini dibuktikan dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan

pengangguran, Peningkatan ekonomi juga ditandai dengan naiknya pertumbuhan sektor ekonomi strategis, semakin terbuka luas dan transparannya investasi yang menggerakkan banyak sektor ekonomi di tengah masyarakat sekaligus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Gambar 3.1
Tujuan pada RPD Kota Payakumbuh
tahun 2023 – 2026



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan berdasarkan analisis data capaian kinerja makro daerah, pencapaian target kinerja sasaran pada tujuan 2 dapat dijelaskan pada Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Evaluasi Pencapaian Tujuan 2 Sasaran 1-3

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022 (%)	2023			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian thn 2023 thdp RPD 2023-2026 (%)
			Target (%)	Realisasi *) (%)	Nilai capaian %			
1.	Tingkat Kemiskinan	5,66	5,52	5,44	101,45	Sangat Tinggi	5,16	94,57
2.	Tingkat Pengangguran	5,16	6,05	4,84	120	Sangat Tinggi	5,21	107,10
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,13	2,85	2,72	95,44	Sangat Tinggi	3,15	67,62
4.	Pertumbuhan PDRB Sektor	5,55	4,03	4,66	115,63	Sangat Tinggi	4,38	106,39

	Perdagangan							
5.	Nilai Realisasi Investasi (Milyar)	209,39	220	493,81	224,46	Sangat Tinggi	240	205,75

Sumber Data : BPS 2024 dan hasil monev perangkat daerah diolah
*) data proyeksi

Sasaran 1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di dunia dan negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang sangat penting saat ini, sehingga menjadi fokus bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanggulangannya untuk membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan pengangguran adalah orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Dengan demikian, tenaga kerja yang tidak bekerja dapat disebut sebagai pengangguran.

Di Kota Payakumbuh, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran menjadi sasaran strategis yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dan dokumen RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2023. Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh sudah semakin meningkat, namun perlu dikaji kualitas pertumbuhannya apakah pertumbuhan tersebut diiringi dengan menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Dengan berbagai tantangan yang dihadapi sekarang ini setelah pandemi COVID-19 yang diikuti oleh inflasi yang tinggi karena tingginya permintaan pasca COVID-19, kemudian fenomena *el nino*, Pemerintah Kota Payakumbuh terus berusaha untuk melaksanakan peningkatan dan menggerakkan serta memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak.

Indikator kinerja untuk sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh adalah Tingkat kemiskinan dan

tingkat pengangguran. Capaian kinerja sasaran ini pada tahun 2023 sebesar 109.07% dengan kategori **sangat tinggi**.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thd RPD %
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Tingkat Kemiskinan	5.66	5.52	5.44	101.45	Sangat Tinggi	5.16	94.57
2	Tingkat Pengangguran	5.16	6.05	4.84	120.00	Sangat Tinggi	5.21	107.10

Sumber : BPS, 2023

Indikator Tingkat Kemiskinan

Dari tabel diatas terlihat jika capaian tingkat kemiskinan di Kota Payakumbuh tahun 2023 sebesar 5.44 dengan capaian sebesar 101.45% atau dengan kategori sangat tinggi. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Kota Payakumbuh tahun 2023 sebesar 3,89% dari tahun sebelumnya.

Tabel 3.26
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023

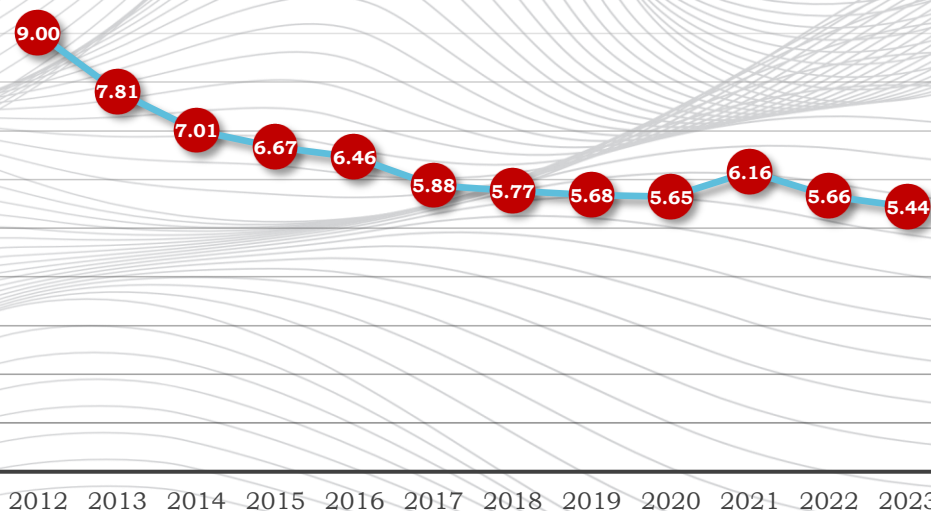
No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
1	Kepulauan Mentawai	13,76	13,72	1,98	0,48	Rp 421.113,00
2	Pesisir Selatan	35,09	7,34	0,90	0,16	Rp 554.057,00
3	Solok	27,33	7,13	0,93	0,19	Rp 532.900,00
4	Sijunjung	15,02	5,88	0,85	0,21	Rp 529.460,00
5	Tanah Datar	14,57	4,16	0,40	0,06	Rp 515.587,00
6	Padang Pariaman	26,93	6,34	0,74	0,18	Rp 548.147,00
7	Agam	33,41	6,60	0,75	0,13	Rp 530.290,00
8	Lima Puluh Kota	27,02	6,80	1,07	0,24	Rp 553.068,00
9	Pasaman	19,99	6,80	0,73	0,13	Rp 472.703,00
10	Solok Selatan	11,91	6,45	1,10	0,28	Rp 516.004,00
11	Dharmasraya	15,49	5,56	0,42	0,06	Rp 581.058,00
12	Pasaman Barat	33,52	6,92	9,98	0,25	Rp 596.225,00

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/ Bulan)
13	Kota Padang	41,97	4,17	0,44	0,08	Rp 698.720,00
14	Kota Solok	2,35	3,05	0,19	0,02	Rp 538.682,00
15	Kota Sawah Lunto	1,47	2,27	0,17	0,02	Rp 487.610,00
16	Kota Padang Panjang	2,99	5,24	0,70	0,19	Rp 599.681,00
17	Kota Bukittinggi	5,78	4,11	0,63	0,14	Rp 619.896,00
18	Kota Payakumbuh	7,88	5,44	0,76	0,19	Rp 616.357,00
19	Kota Pariaman	3,91	4,20	0,48	0,09	Rp 576.445,00

Sumber : BPS 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kota Payakumbuh nomor 8 (delapan) terendah dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya angka kemiskinan di Kota Payakumbuh juga disebabkan karena tingginya Garis Kemiskinan (GK) Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan oleh BPS Pusat. Garis Kemiskinan adalah merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Grafik 3.5
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin Kota Payakumbuh
Tahun 2012-2023



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat terjadi penurunan persentase angka kemiskinan Kota Payakumbuh setiap tahunnya. Penurunan angka kemiskinan ini tidak terlepas dari intervensi Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam rangka penurunan angka kemiskinan antara lain:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilaksanakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial antara lain:

- Bantuan sosial regular seperti Program Keluarga Harapan dan kartu sembako. Pada tahun 2023 telah disalurkan bantuan permakanaan bagi keluarga miskin di Kota Payakumbuh. Bantuan ini disalurkan melalui III tahap. Total bantuan yangn diterima masing-masing Kepala Keluarga adalah sebesar Rp. 803.150,- per KK.



- Bantuan sosial khusus seperti bantuan langsung tunai, bantuan sosial tunai.
- Bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
- Bantuan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus.
- Bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar.
- Bantuan rehab rumah tidak layak huni.



- Bantuan akses air minum layak dan aman.



2. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin di Kota Payakumbuh dilaksanakan melalui peningkatan produktifitas dan pemberdayaan masyarakat antara lain:

- Peningkatan akses pekerjaan dengan memberikan bantuan modal usaha untuk kelompok masyarakat miskin. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh menyalurkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi keluarga miskin sebanyak 1.230 KK. Total bantuan yang diberikan sebesar Rp. 3.500.000,- per KK dengan total bantuan Rp. 4.461.000.000,-.



- Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan usaha.
 - Peningkatan akses terhadap permodalan pinjaman melalui BLUD.
 - Pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
3. Pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat diantaranya melalui:

- Pemenuhan pelayanan dasar seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan dan infrastruktur sanitasi dan air minum layak.
- Peningkatan konektivitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Selain itu pada tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah melaksanakan konvergensi pelaksanaan program kegiatan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan melalui :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui:
 - Pengembangan skema insentif atau kemudahan perijinan untuk mendorong investasi disektor kesempatan kerja untuk masyarakat miskin dan rentan.

- Memastikan stabilitas harga komoditi bahan pokok untuk memastikan inflasi terkendali.
 - Peningkatan daya beli masyarakat.
2. Menyediakan data penerima target yang mutakhir, akurat dan berdasarkan status kesejahteraan masyarakat miskin melalui:
 - Pendataan seluruh masyarakat berdasarkan nama, lokasi dan tingkat kesejahteraan sebagai data Registrasi Sosial Ekonomi.
 - Verifikasi dan validasi status kesejahteraan melalui pendaftaran mandiri.
 3. Konvergensi program lintas kementerian/ lembaga, OPD, dan pemangku kepentingan lain, melalui:
 - Koordinasi lintas sektor tim pelaksana percepatan penurunan kemiskinan melalui TKPK Kabupaten/Kota.
 - Konvergensi bidang/ sektor yang menunjang 3 (tiga) strategi penghapusan kemiskinan.
 - Penggunaan basis data mutakhir yang sama sampai pada individu penerima manfaat program.
 4. Integrasi dan harmonisasi skema pendanaan dari swasta dan masyarakat dengan program Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Mendorong konvergensi berbasis pada kebutuhan penduduk melalui :
 - Pemenuhan bantuan sosial seluruh penduduk miskin, antara lain melalui program PKH, Program Sembako, subsidi listrik dan subsidi LPG.
 - Pemberdayaan ekonomi melalui kewirausahaan, pelatihan, dan akses pinjaman modal diberikan berdasarkan minat dan kemampuan, yang diberikan kepada kepala rumah tangga, anak yang telah lulus SMA/SMK atau perguruan tinggi, atau penduduk lanjut usia yang masih mampu.
 - Pemenuhan pelayanan dasar dalam bentuk pendidikan dan kesehatan bagi seluruh anggota rumah tangga yang memerlukan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan tersebut Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 berhasil mendapatkan insentif

kinerja tahun berjalan dari Kementerian Keuangan berupa Dana Insentif Fiskal sebesar Rp. 6,78 Miliar.



Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Pada Tahun 2023 disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Hal ini menunjukkan integrasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Payakumbuh.
2. Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Payakumbuh tahun 2023.
3. Terdapat 19 (sembilan belas) Perangkat Daerah yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan, baik yang menyentuh langsung, maupun mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
4. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial.

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Program rehabilitasi sosial
2. Program perlindungan jaminan sosial
3. Program pemberdayaan sosial
4. Program pengelolaan Pendidikan
5. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan UMKM
6. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

7. Program pengelolaan sumber daya air
8. Program pengembangan permukiman
9. Program pengelolaan dan pengembangan sistim air limbah
10. Program Pengembangan jasa konstruksi
11. Program kawasan permukiman
12. Program Penempatan Tenaga Kerja
13. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
14. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
15. Program penanganan kerawanan pangan
16. Program Pencatatan sipil
17. Program pendaftaran penduduk
18. Program Pengendalian Penduduk
19. Program pembinaan KB
20. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera
21. Program pemberdayaan UMKM
22. Program pengembangan UMKM
23. Program iklim pengembangan penanaman modal
24. Program pelayanan penanaman Modal
25. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
26. Program pengembangan pariwisata dan ekraf
27. Program pengelolaan perikanan budidaya
28. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan
29. Program penyediaan dan pengembangan pra sarana pertanian
30. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
31. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
32. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
33. Program standarisasi dan perlindungan konsumen
34. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
35. Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
36. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan

Indikator Tingkat Pengangguran

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2023 sebesar 120% dengan kategori **sangat tinggi**. Tahun 2023 merupakan tahun pertama RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.

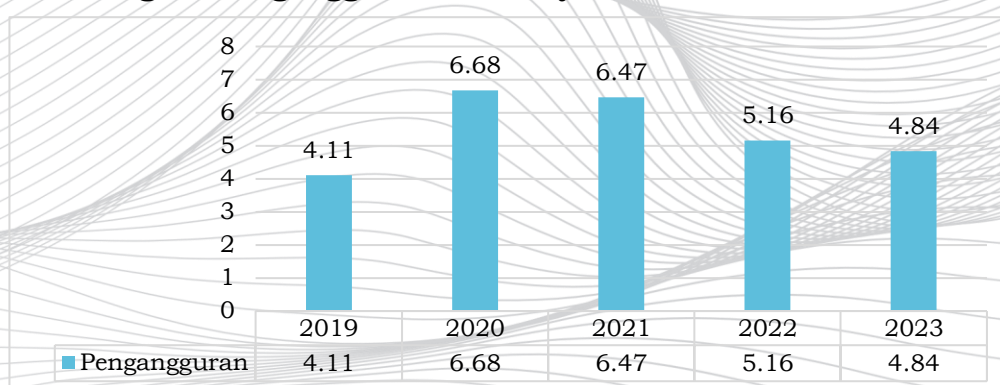
Tabel 3.27
Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thd RPD %
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Tingkat Pengangguran	5,16	6,05	4,84	120	Sangat Tinggi	5,21	107,10

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2024

Dari Tabel 3.27 terlihat jika capaian tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh tahun 2023 sebesar 4,84 dengan capaian sebesar 125 atau dengan kategori sangat baik. Realisasi tahun 2023 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya, dimana tingkat pengangguran tahun 2022 sebesar 5,16% atau turun 6,20%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan mengurangi angka pengangguran. Perkembangan tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh dari tahun 2019 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik 3.6.

Grafik. 3.6
Tingkat Pengangguran Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023



Sumber data : BPS, 2024

Berdasarkan grafik 3.5, tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami tren peningkatan. Tahun 2019 sebesar 4,11% dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,68%. Ini merupakan pengaruh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia sejak Maret 2020. Tahun 2021 pengangguran turun

menjadi 6,47%, konsisten menurun tahun 2022 di angka 5,16% dan tahun 2023 di angka 4,84%. Tingkat pengangguran Kota Payakumbuh lebih rendah dari rata-rata provinsi Sumatera Barat dan Nasional, sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28
Perbandingan Tingkat Pengangguran Antar Waktu
Kota Payakumbuh dengan Propinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2019-2023

No	Tahun	Kota Payakumbuh (%)	Provinsi Sumatera Barat (%)	Indonesia (%)
1	2019	4,11	5,38	7,05
2	2020	6,68	6,88	7,07
3	2021	6,47	6,52	6,26
4	2022	5,16	6,28	5,86
5	2023	4,84	5,94	5,32

Sumber: BPS, 2024

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kota Payakumbuh tahun 2023 memiliki tingkat pengangguran 4,84%, meskipun yang ditargetkan oleh provinsi Sumatera Barat 6,05%. Dari 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran Kota Payakumbuh tahun 2023 menempati posisi ke tujuh terkecil. Kondisi ini lebih baik dari tahun 2022 dimana tingkat pengangguran Kota Payakumbuh menempati posisi ke sebelas terkecil. Dan dari 7 Kota di Sumatera Barat, Kota Payakumbuh menempati posisi ke dua terkecil setelah Kota Solok dengan tingkat pengangguran sebesar 3,72% sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.29
Tingkat Pengangguran Kabupaten/Kota Sumatera Barat
Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten					
Kab. Kepulauan Mentawai	2,92	3,98	2,79	1,39	1,33
Kab. Pesisir Selatan	6,02	7,00	5,97	4,61	4,75
Kab. Solok	4,72	4,65	4,67	5,89	4,99
Kab. Sijunjung	3,64	5,30	3,57	4,87	4,71

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Tanah Datar	3.20	4.79	4,63	5,91	5,35
Kab. Padang Pariaman	6.08	8.13	8,41	6,60	6,69
Kab. Agam	4.78	4.61	5,06	4,93	4,96
Kab. Lima Puluh Kota	2.30	3.03	2,25	3,72	3,95
Kab. Pasaman	5.28	5.04	4,92	5,38	5,09
Kab. Solok Selatan	4.91	5.62	4,84	3,71	2,57
Kab. Dharmasraya	5.06	5.31	5,00	6,23	6,22
Kab. Pasaman Barat	4.74	4.69	5,02	6,33	6,01
Kota					
Kota Padang	8.74	13.64	13,37	11,69	10,86
Kota Solok	7.06	8.35	5,15	3,90	3,72
Kota Sawahlunto	6.84	8.20	6,38	5,00	4,98
Kota Padang Panjang	4.38	7.22	4,90	4,84	5,49
Kota Bukittinggi	6.20	7.51	6,09	4,90	4,99
Kota Payakumbuh	4.13	6.68	6,47	5,16	4,84
Kota Pariaman	5.48	5.73	6,09	5,19	5,68
Provinsi Sumatera Barat	5.38	6.88	6,52	6,28	5,94

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Jumlah penduduk bekerja dan pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena ketersediaan lapangan usaha, tingkat pendidikan dan jumlah penduduk. Tahun 2023 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 70.127 orang dan jumlah pengangguran 3.812 orang. Sedangkan tahun 2020 jumlah angkatan kerja yang bekerja sebanyak 69.498 orang dan jumlah pengangguran sebanyak 4.805 orang. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang bekerja dan adanya penurunan jumlah pengangguran dibanding tahun sebelumnya. Ini merupakan prestasi tersendiri Kota Payakumbuh dimana tahun 2021 tingkat pengangguran di Kota Payakumbuh mengalami penurunan namun jumlah pengangguran naik. Secara persentase terjadi penurunan tingkat pengangguran, karena faktor pembagiya cukup besar. Perkembangan data ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.30.

Tabel 3.30
Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kota Payakumbuh
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	68,573	69.808	74.303	73.939	77.907
Bekerja	65.744	65.144	69.498	70.127	74.137
Pengangguran	2.829	4.664	4.805	3.812	3.770
Bukan Angkatan Kerja	31.159	31.830	29.279	31.539	30.515
Sekolah	8.680	9.734	10.220	9.093	8.782*)
Mengurus Rumah Tangga	18.705	16.937	14.159	18.160	20.616*)
Lainnya	3.774	5.159	4.513	4.340	1.113*)
Penduduk Usia Kerja	96.811	101.638	103.582	105.532	108.422
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	68,76	68,68	71,73	70,06	71,86
Tingkat Pengangguran (%)	4,11	6,68	6,47	5,16	4,84

Sumber : BPS 2023

*) data diolah

Tingkat kesempatan kerja atau rasio penduduk bekerja Kota Payakumbuh juga mengalami fluktuasi, dimana Tahun 2022 sebesar 94,84 dan tahun 2023 sebesar 95,16. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan peluang angkatan kerja untuk terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi rasio penduduk bekerja berarti semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja atau semakin sedikit jumlah pengangguran.

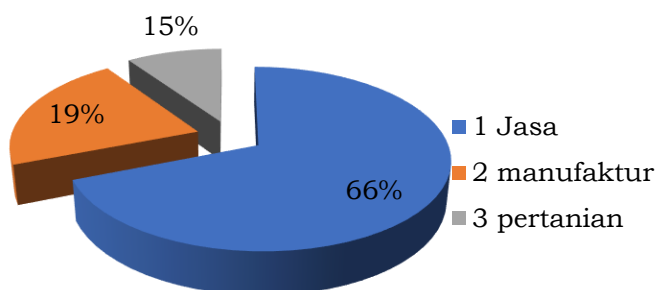
Tabel 3.31
Rasio Penduduk Bekerja Kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angkatan Kerja (orang)	68,573	69.808	74.303	73.939	77.907
2.	Penduduk Yang Bekerja (orang)	65,744	65.144	69.498	70.127	74.137
3.	Jumlah Pengangguran	2.829	4.664	4.805	3.812	3.770
4.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,87	93,32	93,53	94,84	95,16
	Rasio	96	93	94	95	95

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 2023 (data diolah)

Lapangan pekerjaan utama Kota Payakumbuh yang menyerap tenaga kerja tersebar pada beberapa sektor lapangan usaha. Berdasarkan data Sakernas tahun 2023 terdapat 3 (tiga) lapangan usaha pekerjaan utama yang menyerap tenaga kerja yaitu sektor pertanian, manufaktur dan jasa.

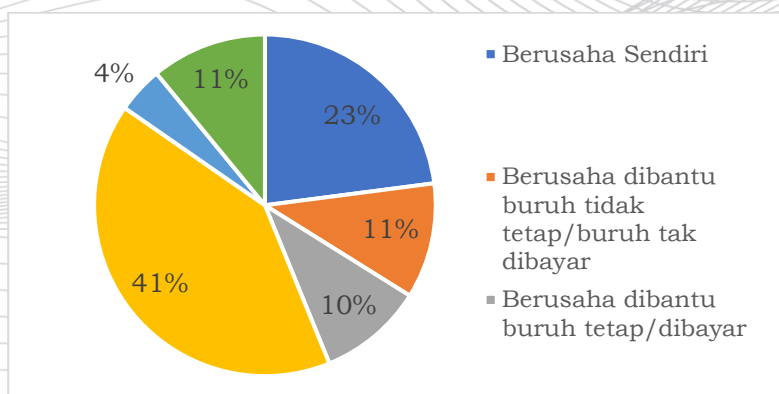
Grafik. 3.7
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Kota Payakumbuh Tahun 2023



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Hasil Sakernas Agustus 2023

Dalam hal status pekerjaan, penduduk bekerja di Kota Payakumbuh berdasarkan hasil Sakernas 2023 sebagian besar berstatus buruh/karyawan / pegawai yaitu sebesar 30.263 jiwa atau sebanyak 40,82% dari total penduduk yang bekerja. Sedangkan untuk status pekerjaan yang paling sedikit adalah pekerja bebas di pertanian yaitu sebesar 3.255 orang atau 4,39%. Pembagian status pekerjaan utama penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 3.7.

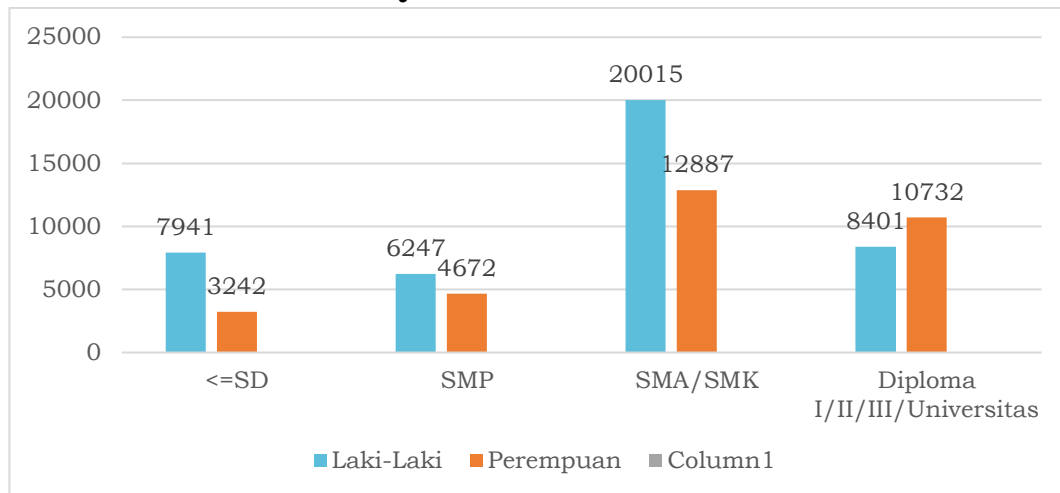
Grafik. 3.8
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Angkatan Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2023

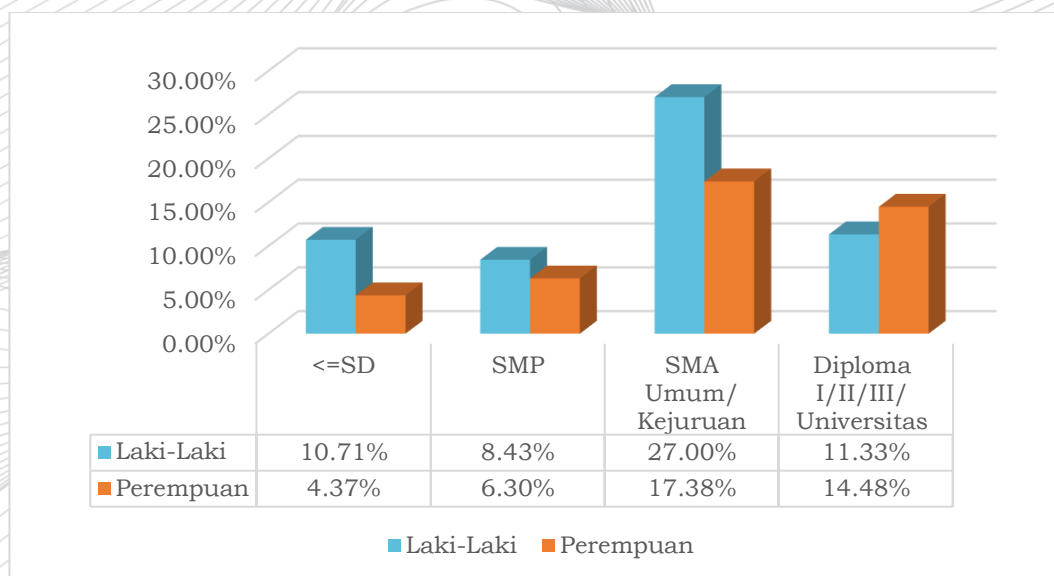
Dari jumlah penduduk yang bekerja di Kota Payakumbuh, sebanyak 42.604 laki-laki dan sisanya 31.533 orang perempuan dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat SMA Umum dan SMA Kejuruan. Namun untuk pendidikan tinggi baik diploma maupun universitas, lebih didominasi oleh tenaga kerja perempuan.

Grafik. 3.9
Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Angkatan Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2023

Grafik. 3.10
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan di Kota Payakumbuh Tahun 2023



Sumber data : BPS Kota Payakumbuh, Angkatan Kerja Kota Payakumbuh Tahun 2023

Program yang Mendukung Pencapaian Target

1. Penempatan Tenaga Kerja.
2. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
5. Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

1. Terdapat beberapa perangkat daerah yang melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dan UMKM yang dapat menyerap tenaga kerja.
2. Tersedianya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran pelaksanaan kegiatan pelatihan tenaga kerja yang bersifat produktif.
3. Terdapat kerjasama Pemerintah Kota Payakumbuh dan Perusahaan di luar daerah dan pihak-pihak lain dalam hal penerimaan dan pelatihan tenaga kerja.

Permasalahan

1. Masih rendahnya keterampilan tenaga kerja untuk dapat bersaing dalam dunia kerja.
2. Masih minimnya informasi dan fasilitasi kebutuhan tenaga kerja dengan penyedia lapangan kerja sehingga kurangnya pemenuhan jumlah dan kualifikasi angkatan kerja.
3. Tenaga kerja banyak bekerja pada sektor buruh, sehingga belum mendapatkan pendapatan yang memadai dan rentan pemutusan hubungan kerja.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

1. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja.
2. Peningkatan fasilitasi antara penyedia lapangan kerja dengan pencari kerja.
3. Peningkatan kemandirian tenaga kerja untuk berusaha dalam sektor swasta.

Sasaran 2. Meningkatnya Sektor Strategis

Sasaran ini memiliki 2 indikator yaitu Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan.

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022 (%)	2023			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian thn 2023 thdp RPD 2023-2026 (%)
			Target (%)	Realisasi *) (%)	Nilai capaian %			
1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,13	2,85	2,72	95,44	Sangat Tinggi	3,15	67,62
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,55	4,03	4,66	115,63	Sangat Tinggi	4,38	106,39

Dari tabel diatas terlihat bahwa kedua capain indikator diatas sangat tinggi. Berikut ditampilkan perkembangan PDRB Kota Payakumbuh periode tahun 2019-2023 menurut kelompok lapangan usaha dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK 2010) yang bersumber dari BPS Kota Payakumbuh. Namun untuk data PDRB tahun 2023, BPS Kota Payakumbuh belum merilis data tersebut pada kondisi bulan Januari 2023 ini, oleh sebab itu data PDRB untuk tahun 2023 diperoleh berdasarkan angka proyeksi menggunakan tren kenaikan 5 tahun.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Payakumbuh (persen)

2020	2021	2022	2023*)
-1.66	3.58	4.52	4,70

Sumber : BPS Kota Payakumbuh, 2023

*) Angka Proyeksi

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh tahun 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022. Hal ini diperkirakan karena akselerasi kinerja ekonomi yang terus meningkat, terutama konsumsi rumah tangga. Membaiknya kondisi pandemi Covid-19 sejalan dengan perbaikan ekonomi baik nasional maupun lokal juga tercermin pada peningkatan pertumbuhan mayoritas lapangan usaha. Kedepan, perbaikan ekonomi diperkirakan masih berlanjut, didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha. Perbaikan itu terutama didorong oleh beberapa Lapangan Usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman; Industri Pengolahan Informasi dan Komunikasi dan Konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi hampir 44,76% setiap tahunnya terhadap PDRB Kota Payakumbuh. Setelah Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap bruto memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Payakumbuh yaitu sekitar 24,28%. Komponen konsumsi rumah tangga memberikan sumbangan pada pertumbuhan ekonomi karena permintaannya terhadap barang bisa menggerakkan produksi barang tersebut. Bila dilihat dari sisi produksinya, sektor yang paling besar berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh adalah sektor *non-tradable* khususnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor *tradable* yang seharusnya dapat meningkatkan lapangan kerja justru pertumbuhannya lebih lambat dari sektor *non tradable*. Kondisi ini menuntut pemerintah dan masyarakat harus berfikir keras agar tumbuh inovasi-inovasi baru dalam menjalani aktivitas ekonomi dan aktivitas kehidupan lainnya, berbagai strategi sudah dan akan diterapkan untuk mencoba membangkitkan perekonomian sekaligus tetap mempertahankan tingkat kesehatan publik. Dibutuhkan langkah konkrit untuk menaikkan kontribusi sektor-sektor *tradable* yang akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan nilai PDRB Kota Payakumbuh dari tahun 2019 – 2023 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2023 diprediksi naik pada beberapa sektor usaha, sehingga berdampak pada kenaikan nilai PDRB dari sebesar Rp. 7.290.850,77 pada tahun 2021 menjadi Rp. 8.250.301,95 pada tahun 2022. Tabel 3.35 menggambarkan pergeseran dan struktur ekonomi Kota Payakumbuh dengan melihat perkembangan nilai dan kontribusi sektor PDRB atas dasar Harga Berlaku selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.32
Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB
Kota Payakumbuh tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022		2023*)	
		(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%	(Rp Juta)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	433.472,70	6,35	438.673,94	6,43	444.030,96	6,08	486.078,90	5,89	512.796,97	6,19
2	Pertambangan & penggalian	35.570,90	0,52	35.410,17	0,52	37.365,64	0,51	41.207,88	0,50	45.001,72	0,51
3	Industri Pengolahan	327.323,08	4,80	331.871,95	4,86	367.277,74	5,03	405.987,14	4,92	433.638,22	4,90
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.380,00	0,06	4.155,66	0,06	4.290,14	0,06	4.490,56	0,05	4.764,61	0,06
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16.534,87	0,24	16.278,59	0,24	17.013,56	0,23	18.908,43	0,23	20.237,47	0,24
6	Konstruksi	939.219,58	13,76	932.935,71	13,67	993.947,21	13,61	1.113.070,14	13,49	1.230.469,36	13,63
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.714.777,49	25,13	1.673.597,29	24,53	1.755.844,11	24,04	2.072.187,47	25,12	2.254.384,44	24,70
8	Transportasi dan Pergudangan	860.457,53	12,61	799.911,39	11,72	866.755,82	11,87	977.905,63	11,85	1.092.084,65	12,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	228.069,39	3,34	206.615,13	3,03	230.030,99	3,15	276.102,52	3,35	304.028,00	3,22
10	Informasi dan Komunikasi	515.756,13	7,56	563.204,22	8,25	614.019,09	8,41	691.799,29	8,39	761.567,69	8,15
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	390.511,01	5,72	403.016,34	5,91	449.555,51	6,16	499.594,85	6,06	525.939,08	5,96
12	Real Estate	191.572,00	2,81	198.156,20	2,90	208.532,48	2,86	231.045,26	2,80	259.110,89	2,84
13	Jasa Perusahaan	16.719,91	0,25	16.225,36	0,24	16.612,80	0,23	18.349,83	0,22	20.744,76	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	477.456,65	7,00	517.029,81	7,58	567.209,12	7,77	594.220,39	7,20	628.953,58	7,39
15	Jasa Pendidikan	316.858,00	4,64	337.224,44	4,94	358.503,45	4,91	402.174,06	4,87	421.175,07	4,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	100.290,95	1,47	111.389,13	1,63	119.615,80	1,64	130.269,17	1,58	145.905,04	1,58
17	Jasa Lainnya	255.460,00	3,74	237.946,55	3,49	252.504,93	3,46	286.911,44	3,48	321.551,06	3,54
	Total	6.824.430,16	100	6.823.641,86	100	7.303.109,35	100	8.250.302,96	100	9.258.918,57	100

Sumber : payakumbuhkota.bps.go.id, 2023

*) Angka Proyeksi

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh selama 5 tahun dengan meminimalkan faktor inflasi digunakan data PDRB ADHK sebagaimana tertera pada Tabel. 3.33.

Tabel 3.33
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK Tahun Dasar 2010
kota Payakumbuh Tahun 2019-2023

Lapangan usaha	2019		2020		2021		2022		2023*)	
	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%	(RpJuta)	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	270.129,44	6,02	274.034,54	6,21	278.792,79	6,09	286.282,79	6,09	287.627,27	6,09
Pertambangan & penggalian	22.380,83	0,5	21.913,82	0,5	22.800,16	0,50	23.850,03	0,50	24.543,66	0,50
Industri Pengolahan	243.377,81	5,42	235.577,09	5,34	241.850,10	5,29	246.999,46	5,29	253.718,15	5,29
Pengadaan Listrik dan Gas	2.757,49	0,06	2.586,43	0,06	2.658,00	0,06	2.743,50	0,06	2.849,54	0,06
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14.115,63	0,31	13.858,87	0,31	14.343,21	0,31	15.233,38	0,31	15.697,98	0,31
Konstruksi	594.976,20	13,26	559.385,32	12,67	567.573,70	12,41	586.666,22	12,41	620.939,46	12,41
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.063.641,99	23,7	1.052.808,55	23,85	1.090.705,27	23,85	1.151.248,53	23,85	1.204.941,45	23,85
Transportasi dan Pergudangan	610.878,26	13,61	553.472,48	12,54	581.894,67	12,73	600.620,94	12,73	634.179,57	12,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	124.379,16	2,77	109.928,27	2,49	117.944,13	2,57	135.755,19	2,57	145.208,58	2,57
Informasi dan Komunikasi	435.873,42	9,71	480.567,25	10,89	507.324,82	11,1	541.810,68	11,10	580.162,06	11,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	254.189,68	5,66	257.470,63	5,83	273.357,19	5,98	284.326,08	5,98	293.482,24	5,98
Real Estat	122.844,50	2,74	123.081,43	2,79	125.197,65	2,74	131.624,77	2,74	139.442,73	2,74
Jasa Perusahaan	11.864,84	0,26	11.372,72	0,26	11.488,38	0,25	12.258,09	0,25	13.055,06	0,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	302.399,80	6,74	300.955,65	6,82	302.922,24	6,63	299.705,17	6,63	305.348,80	6,63
Jasa Pendidikan	186.495,55	4,16	198.099,26	4,49	205.302,76	4,49	216.175,60	4,49	219.768,51	4,49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70.657,57	1,57	76.923,91	1,74	81.223,84	1,78	84.796,51	1,78	90.604,20	1,78
Jasa Lainnya	157.242,32	3,5	141.588,85	3,21	147.517,60	3,23	159.451,70	3,23	171.126,90	3,23
Total	4.488.204,49	100	4.413.625,08	100	4.572.896,51	100	4.779.548,64	100	5.002.696,14	100

Sumber : Payakumbuhkota.bps.go.id, 2023

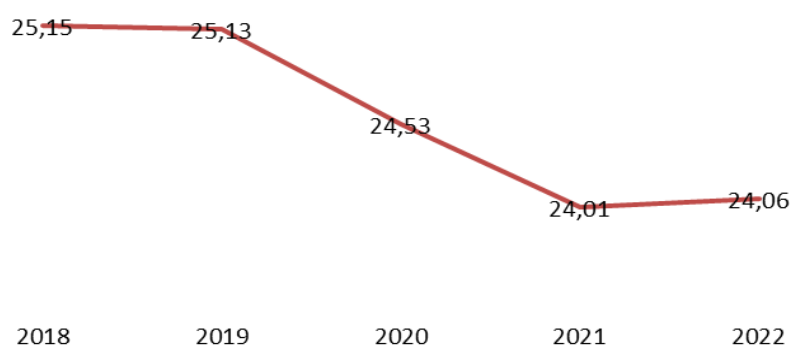
*) Angka Proyeksi

Perkembangan sektor strategis dijelaskan sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

Sebagai kota yang terletak di jalur perlintasan Sumbar-Riau, maka sektor perdagangan menjadi sektor yang potensial dan berkembang di kota Payakumbuh. Selama lima tahun terakhir, kota Payakumbuh tumbuh menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sumatera Barat. Sektor yang memiliki kontribusi paling tinggi selama lima tahun terakhir adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada grafik 3.10 terlihat bahwa kontribusi sektor perdagangan secara umum mengalami penurunan, setiap tahunnya mulai dari tahun 2018 sampai di tahun 2021, ditambah dengan kondisi pandemi Covid -19 yang menyebabkan jumlah pedagang menurun cukup banyak. Meskipun demikian secara produksi menurut 17 lapangan usaha, sektor perdagangan tetap memberikan kontribusi tertinggi pada pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh. Tahun 2023 kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor diproyeksikan sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 menjadi 24,09 %.

Grafik 3.11
Perkembangan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda, 2022 (data diolah)

Pada tahun 2023 berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Payakumbuh pada sektor perdagangan, diantaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar yang sudah ada baik pasar pusat Kota Payakumbuh, Pasar Ibh maupun dengan meningkatkan sarana dan prasarana pada pusat perdagangan baru pada SPPK III pada kelurahan

Tigo Koto Diate yang sebelumnya kelurahan Padang Kaduduak, kecamatan Payakumbuh Utara. Kawasan ini juga telah diintegrasikan dengan kawasan sentra IKM Rendang yang menjadi produk unggulan kota Payakumbuh sehingga dapat menciptakan suatu aktivitas perekonomian baru yang terintegrasi. Selanjutnya juga dilaksanakan penataan pedagang kaki lima terutama pasar kuliner di pusat pertokoan Payakumbuh.

Adapun prasarana perdagangan yang tersedia di Kota Payakumbuh adalah pasar tradisional IBUH, dan pasar pusat pertokoan dimana profilnya dapat dilihat pada Tabel 3.36 dan Tabel 3.37.

Tabel 3.36
Prasarana dan Fasilitas Pendukung di Pasar Tradisional IBUH

1	Nama Pasar	: Pasar Tradisional Ibh Kota Payakumbuh
2	Alamat	: Jl. A. Yani Kel. Ibh Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat
3	Telpon /Fax	: 0752 92239
4	Jenis Pasar	: Pasar Tradisional
5	Hari Operasional	: Setiap hari
6	Jam Operasional/hari	: 05.00 Wib s.d 21.00 Wib
7	Luas Tanah	: 2.2 Ha
8	Luas Bangunan	: 15400
9	Sarana Pasar	:
	Mesjid	: 1 buah
	Mushola	: 2 buah
	Klinik Kesehatan	: 1 buah
	Toilet	: 9 buah
	Ruang Menyusui	: 1 buah
	Lapangan Parkir	: 4 lokasi
	Taman	: 2 lokasi
	Tempat Pengolahan Terpadu (TPST)	: 1 unit
	Pos Keamanan	: 2 lokasi
	Sarana Informasi Publik	: RadioLand 1 unit Videotron 1unit
		majalah dinding 4 buah
10	Pengelola Pasar	: Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh Bidang Pengelolaan Pasar

11	Jumlah Pedagang	:	Toko	:	157 Unit
			Kios	:	348 Unit
			Petak/Los	:	156 Unit
			PKL	:	773 Orang
12	Komoditi	:	Bahan Kebutuhan Pokok, Sayur Mayur, Buah, Pakaian Jadi, Kelontong, Pupuk, Kosmetik dll.		
13	Letak Geografis	:	-0.230641		100.635.682

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM 2023

Dalam rangka mewujudkan Program Pasar Sehat telah dijalin beberapa bentuk kerjasama dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Beberapa nota kesepakatan kerjasama yang disepakati antara lain adalah dengan Yayasan Danamon Peduli dalam bentuk bantuan program dan sarana pendukung untuk terwujudnya lingkungan pasar yang sehat dan kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh untuk menata dan merealisasikan Pasar Kuliner Malam yang sehat dan *representative*.

Tabel 3.37
Prasarana dan Fasilitas Pasar Pusat pertokoan Kota Payakumbuh

1	Nama Pasar	:	Pasar Kota Payakumbuh		
2	Alamat	:	Jl. A. Yani Kel. Ibul Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh		
			Provinsi Sumatera Barat		
3	Telpon /Fax	:	0752 92239		
4	Hari Operasional	:	Setiap hari		
5	Jam Operasional/hari	:	05.00 Wib s.d 21.00 Wib		
6	Sarana Pasar	:			
			Mesjid	:	2 buah
			Mushola	:	5 buah
			Klinik Kesehatan	:	1 buah
			Toilet	:	14 buah
			Lapangan Parkir	:	4 lokasi
			Jembatan Penyebrangan	:	1 Unit
			Gudang Ikan	:	1 Unit
			Gudang Sarana Pasar	:	1 Unit

	Rumah Potong Unggas	:	1 Unit	
	Kantor Bidang Pasar	:	1 Unit	
	Hidran Umum	:	8 buah	
	Sarana Informasi Publik	:	Radio Land	1 unit
7	Pengelola Pasar	:	Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Bidang Pasar	
8	Jumlah Pedagang	:	Toko	: 1.269 Unit
			Kios	: 510 Unit
			Petak/Los	: 421 Unit
			PKL	: 431 Orang

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2023

Melalui pembinaan yang kontinyu dari Bidang Perdagangan dan Bidang Pasar Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh terhadap pedagang yang ada di pasar (pedagang kaki lima dan asongan) yang meliputi kualitas dan mutu barang dagangan, serta perlindungan konsumen. Pembinaan dan pengamanan pasar tradisional di Payakumbuh juga melibatkan banyak pihak, antara lain pihak Kepolisian, para trantib pasar Bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Peningkatan keamanan dan ketertiban sarana perdagangan secara langsung memiliki dampak baik terhadap kenyamanan area perdagangan yang berimbas pada peningkatan omset perdagangan di pasar-pasar Payakumbuh.

Keberpihakan Pemerintah Kota Payakumbuh semakin meningkat dalam mengembangkan perdagangan dan pedagang kaki lima dan asongan di Kota Payakumbuh dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 terkait Penataan Pasar Tradisional.

Di samping itu cluster-cluster terhadap pedagang di sentra pasar Kota Payakumbuh dibina dengan kepastian identitas jenis usaha, serta fasilitasi untuk kerjasama antar daerah maupun antara pelaku perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Sebagai tindak lanjut dari cluster ini juga disiapkan system zonasi perdagangan diwilayah Payakumbuh, berupa zona merah (untuk dilarang berdagang di lokasi tersebut), zona biru (untuk yang hanya diperbolehkan berdagang diatas pukul 15.00 wib) dan zona hijau (untuk wilayah yang diperbolehkan berdagang sepanjang waktu).

Gambar 3.2

Fasilitasi Perdagangan Antar Daerah dan antar Negara

MENINGKATKAN KERJASAMA PERDAGANGAN

Penuhi Kebutuhan Jemaah Haji, Payakumbuh Siap Ekspor 480 Ton Bumbu Rendang

HAJI © Kamis, 20 Februari 2020 | 09:17 WIB **ANTARA** antarajakarta@antaranews.com

Koperasi Rendang Payo dengan Brand Iko Sero sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Al Bait Maamour For Umra Service di Jakarta pada Rabu (19/2/2020). Kerja sama itu difasilitasi oleh Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).



2. Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.

Terdapat 3 (tiga) indikator yang menjadi alat ukur capaian kinerja Urusan Perindustrian sebagaimana tergambar pada Tabel 3.38 dari ketiga indikator mengindikasikan capaian “sangat tinggi”.

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Status Capaian
1	Persentase Peningkatan Nilai Produksi	%	3,00	5,63	187,67	👍
2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten/Kota	%	1,5	22,7	1.513,33	👍
3	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	10	44,05	440,5	👍

4	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	5	0		
5	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	Ada/ Tidak	Ada	Ada		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2023

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Payakumbuh masih belum dapat dicapai sesuai dengan target karena masih belum pulihnya aktivitas bisnis pelaku IKM yang disebabkan terjadinya pandemi Covid-19 diantara tahun 2019 hingga 2021 serta diperparah dengan terjadinya inflasi dan kenaikan harga BBM pada tahun 2022, meskipun pada kenyataannya terjadi penambahan jumlah pelaku usaha yang dulunya tahun 2021 berjumlah 1.928 unit usaha meningkat menjadi 2.000 unit usaha di tahun 2022. Atau bisa jadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan masih jauh dibawah sektor lain seperti sektor jasa dan perdagangan yang mungkin juga mengalami kenaikan yang signifikan.

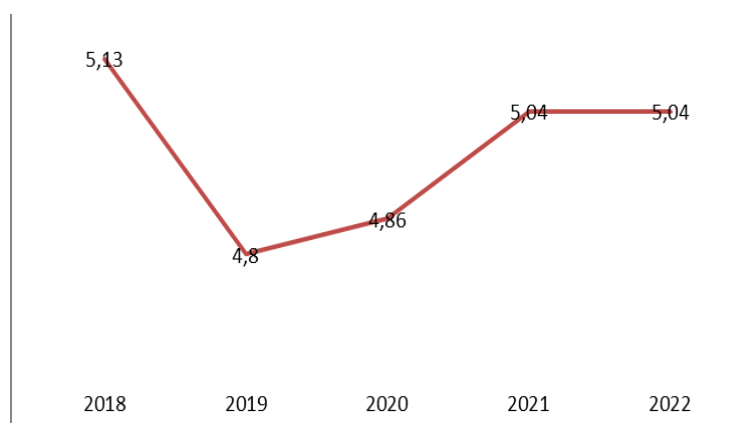
Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha. Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.000 unit usaha, meningkat lebih kurang 72 IKM (3,73%). Dengan tajamnya peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

Terjadinya penambahan IKM menyebabkan peningkatan dalam nilai produksi. Jumlah produk industri yang mendapatkan sertifikat industri realisasinya melebihi target, karena 6 IKM yang difasilitasi sertifikasi halal berhasil mendapatkan sertifikat halal. Capaian tahun ini menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena jumlah anggaran yang tersedia untuk fasilitasi sertifikasi IKM juga menurun. Tahun 2021 dana fasilitasi tersedia sebesar 31.500.000 untuk 10 IKM masing-masing 1 produk, sementara di tahun 2022 hanya tersedia 20.760.000,- untuk 6 IKM masing-masing 1 produk. Pandemi Covid sudah berakhir dan inflasi tetap terjaga membuat kondisi ekonomi cukup baik sehingga memunculkan IKM baru untuk tumbuh. Selain itu, program WUB dari Pemprov Sumbar juga mendukung pertumbuhan IKM

Ditinjau dari PDRB sektor industri pengolahan termasuk sektor non basis, maju, namun pertumbuhannya relatif lambat dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Sumatera Barat. Telah dilakukan berbagai upaya percepatan pengembangan sektor industri pengolahan di kota Payakumbuh. Upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah kota Payakumbuh mulai pada tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun 2020 sampai tahun 2022.

Pada tahun 2022 telah dilakukan pembinaan IKM potensial melalui berbagai kegiatan-kegiatan strategis seperti Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas produk IKM, penguatan kemampuan industri berbasis teknologi, pembinaan IKM dalam memperkuat jaringan kluster industri, pembinaan kemampuan teknologi industri, pengembangan dan pelayanan teknologi industri, dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan mempercepat pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kota Payakumbuh. Pemantauan dan pengawasan dilaksanakan secara mandiri dan juga bersama dengan OPD lain. Izin perluasan industri tidak tercapai dikarenakan permohonan perluasan izin tidak ada yang masuk Ketersediaan informasi industri terbantu oleh adanya penyusunan RPIK

Grafik 3.11
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda Kota Payakumbuh (data diolah)



Gambar 3.3

Sentra Makanan Ringan dan Kampung Rendang Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022

Guna mempercepat pertumbuhan sektor industri pengolahan juga telah diimplementasikan dalam program **one produk one village (OVOP)** yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang di area kecamatan Lamposi Tigo Nagari, kampung tenun di area kelurahan Balai Panjang, sentra makanan ringan di area kelurahan Bulakan Balai Kandi dan kampung kerajinan bambu di area Kecamatan Payakumbuh Selatan. Ke depan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Berfluktuasinya perkembangan industri di Kota Payakumbuh karena industri yang berkembang masih banyak yang berskala rumah tangga dan berskala mikro, kecil, menengah atau *Home Industry* yang dikelola baik secara formal maupun informal, sehingga rentan sekali untuk beralih usaha ke sektor lain jika ditimpa krisis. Industri rumah tangga (*Home Industry*) yang banyak digeluti masyarakat adalah jenis makanan ringan, seperti gelamai, beras rendang, rendang telur, rendang runtiah, kerupuk sanjai, karak kaliang dan jenis kerupuk lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk industri ini antara lain melalui kegiatan promosi di pondok promosi serta melalui program one vilage produk (OVOP) yang direalisasikan dengan mendirikan sentra kampung rendang, kampung tenun, sentra makanan ringan dan kampung kerajinan bambu. Kedepan, diharapkan lapangan usaha industri pengolahan yang menggunakan bahan baku dari produk pertanian bisa semakin berkembang sehingga selain untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian juga tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha pertanian khususnya, dan lapangan usaha lainnya dapat diserap oleh lapangan usaha industri.

Adapun perkembangan usaha industri di Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Tabel 3.39
Data Perkembangan Industri Tahun 2019-2023
Kota Payakumbuh

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Unit Usaha	Unit	1.853	1.902	1.928	2.000	2.454
2.	Formal	unit	583	630	643	905	1.359
3.	Non Formal	unit	1.270	1.272	1.285	1.095	1.095
4.	Tenaga Kerja	orang	6.106	6.271	6.308	6.485	7.549
5.	Nilai Investasi (ribu)	Rp.	88.040.791	95.649.716	95.954.716	87.291.446	94.866.073
6.	Nilai Produksi (ribu)	Rp.	342.785.800	257.089.350	296.426.788	269.426.788	284.598.221

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, 2023

Industri Kota Payakumbuh didominasi oleh industri non formal dengan skala usaha mikro dan kecil. Jumlah IKM meningkat tajam dari 1.928 unit usaha di tahun 2021 menjadi 2.369 unit usaha pada tahun 2022, meningkat lebih kurang 441 IKM (23%). Hal ini disebabkan karena banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga pelaku usaha yang dulunya enggan mengurus perizinan menjadi terpaksa membuat izin usaha. Data IKM yang mengurus NIB ini diperoleh dari DPMPTSP yang hanya bisa diperoleh dari data OSS per 31 Desember 2022.

Penambahan IKM sebanyak 441 unit usaha hanya terjadi di sektor industri formal saja. Pada tahun 2021 tercatat 643 unit usaha industri formal (industri yang memiliki perizinan) menjadi 1.084 unit usaha pada tahun 2022, meningkat tajam sebanyak 441 IKM (68%).

Sedangkan IKM sektor Non Formal tidak mengalami perubahan, barangkali disebabkan oleh belum dilaksanakannya pendataan ril IKM di Kota Payakumbuh sehingga fluktuasi/dinamika bertambah/berkurangnya jumlah IKM (baik formal maupun non formal) belum dapat diberikan.

Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya 1.928 menjadi 2.369 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.557 dari tahun sebelumnya, meningkat sebesar 19,8%.

Nilai investasi sektor industri di Kota Payakumbuh diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah IKM di Kota Payakumbuh. Nilai produksi industri di Kota Payakumbuh sedikit melebihi target yaitu 3,1%. Kondisi ini dipicu oleh banyaknya pelaku IKM Kota Payakumbuh yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi salah satu persyaratan wajib bagi pelaku usaha dalam berbagai urusan, sehingga IKM yang dulunya belum memiliki izin usaha sekarang menjadi suatu keharusan bagi IKM untuk memiliki izin usaha.

Sebagai gambaran di tahun 2021 jumlah IKM Kota Payakumbuh berkisar 1.928 unit usaha, akan tetapi tahun 2022 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 2.369 unit usaha, meningkat lebih kurang 441 IKM (23%). Dengan tajamnya peningkatan jumlah IKM di Kota Payakumbuh tentu Nilai produksi juga ikut terdongkrak, meskipun di

tahun 2019 hingga 2021 kondisi ekonomi memburuk akibat pandemi Covid-19 serta di tahun 2022 terjadi inflasi dan kenaikan harga BBM, target nilai produksi masih dapat dicapai.

Dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Kota Payakumbuh yang sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 1.928 unit usaha di tahun 2022 meningkat menjadi 2.369 unit usaha, secara tidak langsung meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 7.557 dari tahun sebelumnya, meningkat sebesar 19,8%.

Tabel 3.40
Data Industri dan Nilai Produksi Tahun 2023

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1	Industri pengolahan dan pengawetan daging	22	68
2	Industri pelumatan buah-buahan dan sayuran	10	20
3	Industri pengeringan buah-buahan dan sayuran	13	37
4	Industri minyak dari Kelapa	6	12
5	Industri susu	5	17
6	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya	27	55
7	Industri ransum pakan ternak/ikan	-	-
8	Industri konsentrat pakan ternak	6	18
9	Industri roti dan sejenisnya	256	600
10	Industri makaroni, mie, spaghetti, bihun, soun dan sejenisnya	885	197
11	Industri pengolahan teh dan kopi	28	62
12	Industri es (macam-macam es)	12	29
13	Industri tempe	5	13
14	Industri makanan dari kedelai dan kacang-kacangan lainnya selain kacang dan tempe (Industri Tahu)	62	278
15	Industri kerupuk dan sejenisnya	501	2060
16	Industri bumbu masak dan penyedap makanan	64	203
17	Industri kue basah	247	812
18	Industri makanan yang belum termasuk kelompok manapun	102	284
19	Industri minum ringan (Soft Drink)	20	55
20	Industri pengeringan dan pengolahan tembakau	2	33
21	Industri pengrajin kayu	10	36
22	Industri moulding dan komponen bahan	4	7

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
	bangunan		
23	Industri peti kemas dari kayu kecuali peti mati	11	34
24	Industri anyam-anyaman dari bambu dan rotan	115	236
25	Industri kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu kecuali furniture	5	13
26	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	-	-
27	Industri air minum dalam kemasan	71	189
28	Industri penggilingan padi	52	160
29	Industri percetakan	59	171
30	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	8	12
31	Industri barang-barang dari tanah liat untuk keperluan rumah tangga	3	8
32	Industri batu bata dari tanah liat	15	48
33	Industri kapur	2	5
34	Industri barang-barang dari semen	73	182
35	Industri barang dari untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	1	5
36	Industri furniture dari kayu	109	394
37	Industri pemintalan benang	-	-
38	Industri pertenunan	11	57
39	Industri barang tekstil jadi kecuali barang jadi	46	111
40	Industri bordir/sulaman	14	44
41	Industri kain rajut	31	76
42	Industri pakaian jadi dari tekstil	135	352
43	Industri furniture dari logam	14	44
44	Industri barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi	16	32
45	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	-	-
46	Industri barang-barang logam bukan aluminium siap pasang	112	317
47	Industri alat pertanian dari logam	1	4
48	Industri alat pertukangan dari logam	-	-
49	Industri alat-alat dapur	6	19
50	Industri peralatan kantor dari logam tidak termasuk furniture	-	-
51	Industri komponen dan suku cadang motor	1	3
52	Industri mesin pertanian dan kehutanan	2	6
53	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4	8

No	Jenis Industri	Unit Usaha	Tenaga Kerja
54	Industri penempatan pengepresan dan penggilingan logam	3	5
55	Industri mainan	2	4
56	Industri kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun	17	35
57	Industri pengolahan lainnya yang belum termasuk golongan manapun	16	44
58	Industri pemeliharaan dan perbaikan elektronik	4	10
59	Industri jasa reparasi jam	-	-
60	Industri jasa reparasi kendaraan bermotor (Mobil)	3	7
61	Industri bengkel/reparasi sepeda motor	4	12
62	Industri jasa reparasi kendaraan bukan bermotor (Sepeda)	-	-
63	Industri jasa perorangan lainnya	1	6
64	Industri alat musik tradisional	-	-
Jumlah		2.454	2.454

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2023



Gambar 3.4

Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022



Gambar 3.5
Kampung Rendang dan perkembangannya menjadi
Sentra IKM Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022



Gambar 3.6
Perkembangan Sentra IKM Rendang Kota Payakumbuh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Payakumbuh, 2022

Sasaran 3. Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh

Pemerintah daerah perlu merencanakan investasi sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi juga sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan investasi dapat menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata. Investasi merupakan salah satu faktor pembentuk penghasilan daerah dan berperan penting dalam menghela roda perekonomian daerah.

Secara lebih spesifik, investasi atau penanaman modal membutuhkan iklim usaha yang sehat, kemudahan serta kejelasan prosedur. Investasi akan masuk ke suatu daerah tergantung dari daya tarik daerah tersebut.

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah, dan akan mempengaruhi iklim investasi suatu daerah dan daya tarik investasi suatu daerah.

Mengingat besarnya dampak pertumbuhan investasi ini bagi perkembangan ekonomi daerah, maka Kota Payakumbuh menjadikan Nilai realisasi investasi (milyard Rp) sebagai salah satu sasaran pada RPD kota Payakumbuh tahun 2023-2026. Selanjutnya capaian target indikator investasi ini dapat dilihat dalam Tabel 3.41

Tabel 3.41
Capaian IKU pada Sasaran Meningkatkan Iklim Usaha dan Investasi di Kota Payakumbuh

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD 2023-2026	Capaian tahun 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1.	Nilai Realisasi Investasi (Milyar rupiah)	209,39	220	493,81	224,46%	Sangat Tinggi	240	205,75%

Sumber Data: BPS 2022 dan hasil monev perangkat daerah diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat jika kinerja realisasi investasi Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan kategori sangat tinggi. Realisasi ini memberikan sumbangan terhadap akumulasi capaian target 4 (empat) tahun pada RPD Tahun 2023-2026 menjadi sebesar 205,75%.

Tabel 3.42
Perkembangan Capaian Realisasi Investasi tahun 2019-2023 dan akumulasi 1 tahun RPD Tahun 2023-2026

Investasi	Tahun					Target RPD
	2019	2020	2021	2022	2023	
Target (Milyar Rp.)	250,60	74,40	200,90	203,80	220	240
Realisasi (Milyar Rp.)	250,60	178,3	417,24	209,39	493,81	493,81
capaian	100,00%	239,78%	207,69%	102,74%	224,46%	205,75%

Sumber : RPD 2023-2026 dan data diolah

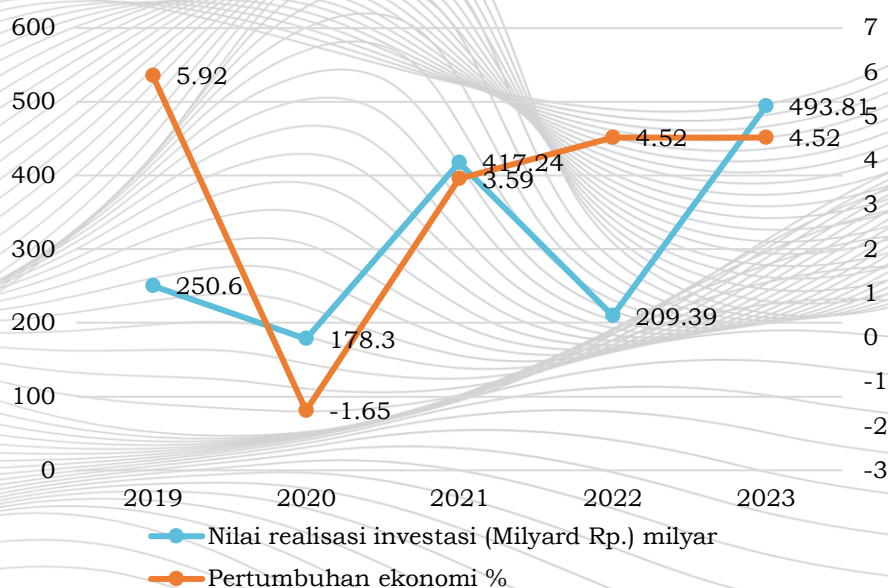
Secara time series, perkembangan realisasi investasi Kota Payakumbuh dapat dilihat Tabel 3.58. Dari tabel tersebut terlihat jika rata-rata capaian realisasi investasi melebihi target dari tahun ke tahunnya. Walaupun perkembangannya berfluktuasi dari tahun ke tahunnya. Artinya potensi investasi Kota Payakumbuh kedepan masih dapat di optimalkan.

Berbagai upaya pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang memadai baik dari sisi pelayanan dan perijinan termasuk kenyamanan dan keamanan bagi investor, namun ternyata realisasi investasi ini belum optimal khususnya dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.43
Perkembangan Realisasi Investasi dan
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai realisasi investasi (Milyard Rp.)	milyar	250,6	178,3	417,24	209,39	493,81
2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,92	-1,66	3,58	4,52	4,70

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat dan Dinas PMD dan PTSP Kota Payakumbuh, 2023



Dari grafik diatas juga dapat ditarik kesimpulan jika nilai investasi di Kota Payakumbuh belum signifikan pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh. Pada tahun 2020 dan 2021

realisasi investasi dan laju pertumbuhan ekonomi berjalan selaras, namun tahun 2022, saat realisasi investasi menurun, namun laju pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Namun secara umum capaian realisasi investasi Kota Payakumbuh ini rata-rata melebihi target (>100%) setiap tahunnya, dengan besaran yang fluktuatif. Hal ini tentunya merupakan prestasi dan capaian yang perlu di apresiasi.

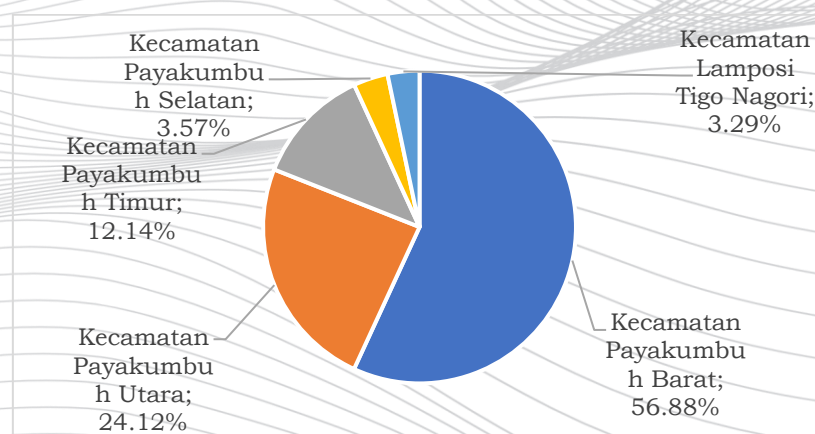
Selanjutnya sebaran investasi di Kota Payakumbuh pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.44
Daftar Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan
Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah usaha	Modal (Rp)	%
1.	Kecamatan Payakumbuh Barat	1929	280.902.634.407	56,88
2.	Kecamatan Payakumbuh Utara	1216	119.087.108.412	24,12
3.	Kecamatan Payakumbuh Timur	965	59.925.855.168	12,14
4.	Kecamatan Payakumbuh Selatan	403	17.641.435.876	3,57
5.	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	334	16.257.690.040	3,29
	Total	4847	493.814.723.903	100

Sumber Data : DPMPSTSP tahun 2023

Grafik 3.12
Proporsi Investasi di Kota Payakumbuh Menurut Kecamatan
pada Tahun 2023



Sumber Data : DPMPSTSP tahun 2023

Berdasarkan Tabel dan grafik diatas, investasi terbesar di Kota Payakumbuh berada di Kecamatan Payakumbuh Barat dengan nilai investasi sebesar 56,88% diikuti pada urutan kedua adalah Kecamatan Payakumbuh utara sebesar 24,12%.

Disamping realisasi investasi, beberapa indikator lain yang juga digunakan untuk mengukur kinerja penanaman modal capaiannya 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.45
Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	6	38	29	6	7
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	16,1	130,6	90,20	4,18	119.81
3	Nilai realisasi investasi	Milyar	250,6	178,3	417,24	209,39	493.81
4	Kenaikan /penurunan nilai realisasi investasi	Milyar	19,1	-72,3	238,94	-207,85	235.83
5	Lama proses perijinan	Hari	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Payakumbuh

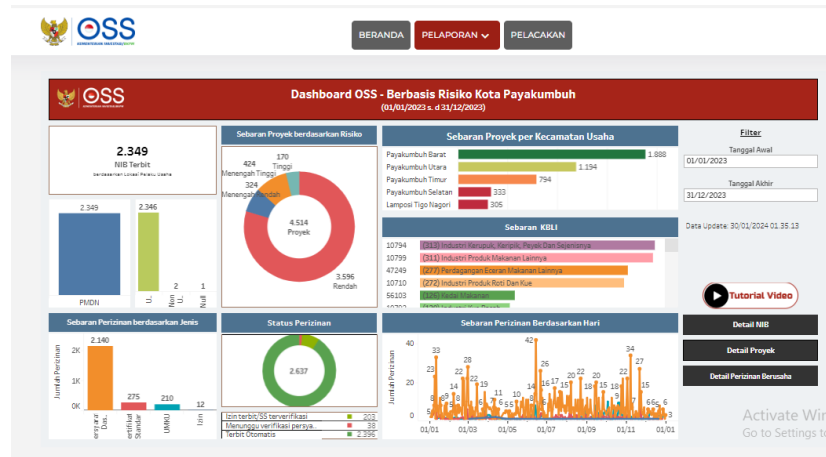
Penyelenggaraan perizinan terpadu di MPP kota Payakumbuh khususnya terkait penyelenggaraan Perizinan Berusaha sudah terselenggara melalui **Online Single Submission Risk-Based Approach** (OSS RBA-Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko) menggantikan versi sebelumnya, yaitu OSS 1.1. Sesuai namanya, OSS-RBA, izin usaha akan dikeluarkan melalui pendekatan risiko, sejak Agustus 2021 hingga saat ini. Penerbitan NIB OSS RBA di kota Payakumbuh sebagaimana tersaji pada Tabel 3.46

Tabel 3.46
Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
pada Aplikasi OSS RBA 2022

No	Tahun	NIB terbit
1	2021	251
2	2022	1.435
3	2023	2.349

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Terdapat peningkatan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sangat signifikan sejak penerapan OSS RBA, yaitu sebanyak 1.180 peningkatan NIB dari tahun 2021 ke 2022, serta peningkatan sebanyak 914 NIB dari tahun 2022 ke tahun 2023. Data ini tercantum pada beranda aplikasi OSS RBA seperti pada Gambar 3.7



Gambar 3.7
Rekapitulasi penerbitan NIB melalui OSS RBA
Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Untuk pengurusan NIB di Kota Payakumbuh ini didominasi oleh usaha Mikro dan Kecil. Terdapat beberapa perubahan kualitas layanan sejak menggunakan aplikasi OSS RBA yaitu :

1. Pengukuran kecepatan untuk pelayanan untuk penerbitan NIB memerlukan waktu lebih kurang 3 jam apabila tidak ada kendala sistem, penerbitan NIB melalui OSS RBA memerlukan waktu 30 menit untuk usaha mikro Perseorangan dan 60 menit untuk Non Perseorangan;
2. Guna kemudahan pelayanan maka penerbitan NIB dapat dilakukan dengan mudah menggunakan aplikasi di android yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan dapat dilakukan pengisian mandiri, dilaksanakan penerbitan langsung pada saat bimbingan teknis yang difasilitasi DPMPSTP, untuk penerbitan NIB mayoritas di terbitkan di DPMPSTP hanya beberapa yang melakukan pengisian mandiri;



Gambar 3.8

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengurusan NIB Tahun 2023

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

3. Berkaitan dengan transparansi perizinan, petugas menjelaskan semua syarat untuk penerbitan NIB mandiri cukup dengan KTP, email, NPWP dan nomor HP yang terhubung dengan aplikasi WhatsApp, karena Sistem OSS RBA ini masih baru jadi belum semua perizinan berusaha dapat terakomodir dalam sistem dan aplikasi pendukung untuk entri mandiri hanya berupa **website oss.go.id** ;
4. Pengukuran kualitas untuk penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha) sudah sangat baik, Sistem OSS sudah mengakomodir KKPR, izin lingkungan, serta PBUMKU (Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha) bagi NIB yang memerlukan sertifikat standar/Izin.;
5. Penggunaan digitalisasi pelayanan terjadi penambahan pelayanan digital untuk menunjang pelayanan digital seperti Pustaka digital yang ada di MPP, disamping aplikasi perizinan yang sudah ada sejak tahun 2021 seperti SICANTIK Cloud, SIMBG, OSS RBA , Sitarang, Aplikasi Antrian di MPP.



Gambar 3.9
Penghargaan atas pelayanan investasi terbaik Nasional
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Salah satu gagasan cerdas sebagai strategi meningkatkan investasi ini adalah pembangunan Sistem Informasi Penataan Ruang Kota Payakumbuh (SITARANG) dilaksanakan berdasarkan analisa permasalahan yang terjadi di Kota Payakumbuh terhadap sistem layanan informasi Rencana Tata Ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Teknis Ruang Kawasan (RTRK), dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang merupakan data awal bagi investor dalam menanamkan modalnya di Kota Payakumbuh. Namun yang terjadi di kota Payakumbuh sebelum adanya inovasi SITARANG disaat investor sudah mendapatkan izin sering terjadi permasalahan dimana lokasi yang didapat tidak sesuai dengan rencana tata ruang daerah dan status lahanpun belum ada kejelasan legalitasnya (rata-rata lahan yang berstatus ulayat sehingga lahan yang telah di tetapkan tidak bisa dibangun dan merugikan investor tersebut dan akhirnya berakibat enggannya investor khususnya dari luar untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh. Hal inilah yang menjadi salah satu strategi bagi Pemerintah Kota Payakumbuh dalam memberikan kepastian informasi yang merupakan prinsip dasar dalam pelayanan pemerintah.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN		
Setelah Pemanfaatan Peta Digital Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha		
SEBELUM	SESUDAH	Keunggulan
1 WAKTU PELAYANAN KRK 14 HARI KERJA	WAKTU PELAYANAN KRK 7 HARI KERJA	Adanya kepastian waktu pelayanan
2 WAKTU PELAYANAN IMB 10 HARI KERJA	WAKTU PELAYANAN IMB 5 HARI KERJA	
3 MASIH MENGGUNAKAN PETA MANUAL SEHINGGA TINGKAT KETELITIAN MASIH RENDAH	TERINTEGRASI DENGAN PETA DIGITAL, BERBASIS TITIK KOORDINAT & PETA BIDANG TANAH BPN	Tidak ada intervensi, akurat, terukur, meminimalisir Kesalahan
4 DOKUMEN PETA BELUM DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	SUDAH DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE	Dapat diakses semua pihak
5 BELUM ADA DATABASE PELAYANAN PENERBITAN	SUDAH MEMPUNYAI DATABASE PETA	Satu Referensi, Satu Standar

Gambar 3.10

SITARANG (Sistem Informasi Penataan Ruang)

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA DI KOTA PAYAKUMBUH						
	Satuan	2018	2019	2020	2021	
1 Jumlah investor berskala Menengah dan Besar	investor	22	6	38	139	
2 Nilai investasi berskala Menengah dan Besar	Rp Milyar	49,4	16,10	130,60	349.24	

PEMANFAATAN PETA DIGITAL SITARANG DALAM PELAYANAN PENERBITAN IMB DAN PBG	PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENGAKSES LAYANAN			KEMANFAATAN
	2019 MANUAL	2020 SITARANG	2021 SITARANG	
	568	600	880	Kemudahan mendapatkan informasi peruntukan ruang oleh masyarakat yang dapat diakses dimana saja secara online Dan Mempercepat Proses Perizinan.

Gambar 3.11

Peningkatan kualitas Pelayanan Investasi melalui aplikasi SITARANG

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022 (menunggu update dari DPMDPTSP kondisi desember 2023)

Program yang Mendukung Pencapaian Target

- a) Program Promosi Penanaman Modal;
- b) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- c) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- d) Program Pelayanan Penanaman Modal
- e) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya realisasi investasi di Kota Payakumbuh disebabkan oleh beberapa faktor :

- a) Membaiknya perekonomian masyarakat di Kota Payakumbuh, yang membuat investor semakin bergairah berinvestasi di Kota Payakumbuh.

- b) Kegiatan promosi dan sosialisasi yang gencar dilakukan oleh DPM PTSP kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha;
- c) Kemudahan dalam melakukan pengurusan izin usaha yang diberikan oleh DPM PTSP Kota Payakumbuh melalui **Mal Pelayanan Publik (MPP)**;
- d) Terwujudnya penguatan kelembagaan DPMD PTSP yang dibuktikan dengan penghargaan layanan terbaik 1 nasional.

Namun demikian, untuk pengembangan investasi di Kota Payakumbuh masih memiliki kendala. Tiga masalah besar yang mengganggu investasi adalah soal tenaga kerja, konflik komunal, dan sengketa tanah. Status tanah ulayat selalu jadi momok oleh investor, ini mengurangi minat investor untuk berinvestasi di Kota Payakumbuh.

Permasalahan investasi dan penanaman modal secara komprehensif dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Payakumbuh antara lain meliputi :

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran daerah khususnya potensi investasi;
2. Belum berkembangnya pola kemitraan dan kerja sama dengan investor baik dalam maupun luar negeri;
3. Kurangnya informasi potensi investasi yang akurat dan promosi yang terbatas;
4. Masih rendahnya pertumbuhan realisasi investasi;
5. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur pendukung kawasan potensial investasi;

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Strategi yang dibangun sesuai RPD Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 dalam rangka meningkatkan realisasi investasi adalah dengan meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi dengan arah kebijakan:

1. Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
2. Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Peningkatan Upaya Promosi Investasi.

Tujuan 3 : Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Tujuan ini telah diselaraskan dengan Misi 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik, demokratis, berlandaskan hukum dan dilaksanakan secara partisipatif.

Guna mencapai tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, diwujudkan melalui 2 (dua) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Meningkatnya pelayanan publik yang prima.

Untuk masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut

Tabel 3.47

Sasaran dan Indikator Tujuan 3 Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target	Ket
1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75,000	
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks SPBE	2,5	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,41	

Adapun rincian dan analisa capaian kinerja masing- masing indikator sasaran pada Tujuan 3 ini diuraikan pada **Tabel 3.48**.

Tabel 3.48

Data Capaian Indikator Sasaran Tujuan 3 Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Thn 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	BB	100	Sangat Baik	A	94,05

2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	71.8861	75,000	77,433	103,24	Sangat Baik	79,000	98,02
3	Indeks SPBE	3,02	2,50	3,17	126,80	Sangat Baik	3,2	99,06
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,24	88,41	89,65	101,40	Sangat Baik	88,80	100,96

Sumber : Kemenpan RB, Kemendagri, Data diolah

Sasaran 7 : Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh 2020-2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan sasaran Reformasi Birokrasi berupa Birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Hal ini sejalan dengan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menargetkan terwujudnya birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 dengan ciri tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya guna mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Payakumbuh 2020-2024, perbaikan layanan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) serta berorientasi pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu dengan meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel. Akuntabilitas sebagai perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Disamping itu, birokrasi bersih dan akuntabel juga nampak pada kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dimaksud dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Tolak ukur atau indikator yang

digunakan dalam sasaran ini yaitu Nilai Evaluasi AKIP Kota dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan tahun 2023 tersaji pada Tabel 3.49

Tabel 3.49
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Layanan Pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian thn 2026 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	BB	BB	100	Sangat Baik	A	94,05%
2	IPKD	71,8861	75,000	77,433	103,244	Sangat Baik	79,000	98,02%
Rata-rata					101,62			

Sumber data : Kementerian PANRB, Kemendagri, Data diolah 2023

Sasaran meningkatnya akuntabilitas layanan pemerintahan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Nilai evaluasi AKIP Kota

Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan evaluasi AKIP adalah untuk menilai mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk :

- a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e) Memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Disamping itu tujuan evaluasi AKIP juga untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap

penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Tabel 3.50

Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2019 s.d. 2023

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2019	72,75	BB
2	2020	72,99	BB
3	2021	73,46	BB
4	2022	74,56	BB
5	2023	75,25	BB

Sumber : Kementerian PAN&RB

Berdasarkan evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Kementerian PANRB tahun 2023 terhadap implementasi SAKIP Kota Payakumbuh, Kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh pada tahun 2023 memperoleh predikat Nilai “BB”, dengan nilai 75,25 dengan rincian sebagai terlihat pada **Tabel 3.51**.

Tabel 3.51

Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,84
2	Pengukuran Kinerja	30	19,73
3	Pelaporan Kinerja	15	12,60
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,08
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,25
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber : KemenPANRB, 2023

Hasil capaian Evaluasi AKIP dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh termasuk dalam tiga daerah yang telah memperoleh nilai BB. Berikut capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat Tahun 2023.

Tabel 3.52
Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten/ Kota
di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP
1	Kota Padang	BB
2	Kota Payakumbuh	BB
3	Kota Bukittinggi	BB
4	Kab. Pesisir selatan	B
5	Kab. Padang Pariaman	B
6	Kota Solok	B
7	Kab. Solok	B
8	Kab. Tanah datar	B
9	Kab. Kepulauan Mentawai	B
10	Kab. Pasaman	B
11	Kab. Dharmasraya	B
12	Kab. Sijunjung	B
13	Kab. Agam	B
14	Kota Padang Panjang	B
15	Kota Sawahlunto	B
16	Kab. Lima Puluh Kota	B
17	Kab. Pasaman Barat	B
18	Kota Pariaman	B
19	Kab. Solok selatan	B
	Prov. Sumatera Barat	BB

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2023

Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Payakumbuh Tahun 2023 adalah 100% dengan kategori sangat baik. Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Walikota Payakumbuh dan telah mengacu kepada RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja evaluasi AKIP per komponen yang dinilai dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.53
Perbandingan Rincian Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh
Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023	Bobot Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,73	24,84	82,80%
2	Pengukuran Kinerja	30	19,59	19,73	65,77%

3	Pelaporan Kinerja	15	12,39	12,60	84,00%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,85	18,08	72,32%
	Nilai Hasil Evaluasi	100	74,56	75,25	75,25%
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	

Sumber : KemenPANRB, 2023

Sesuai dengan data pada tabel 3.53 di atas, dapat dilihat bahwa secara umum nilai setiap komponen penilaian mengalami peningkatan. Untuk nilai total mengalami peningkatan dari 74,56 pada tahun 2022 menjadi 75,25 pada tahun 2023 atau naik 0,69 poin. Komponen penilaian yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dengan peningkatan 0,23 poin dibandingkan tahun 2022, sedangkan komponen paling rendah peningkatannya yaitu komponen perencanaan kinerja, dengan kenaikan 0,11 poin. Namun jika dibandingkan dengan bobot, komponen yang memperoleh bobot tertinggi yaitu komponen Pelaporan Kinerja dengan Bobot 84%, selanjutnya komponen Perencanaan Kinerja memperoleh bobot tertinggi kedua yaitu 82,80%, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 72,32% dan komponen dengan bobot terendah sehingga perlu perhatian lebih adalah komponen pengukuran kinerja dengan bobot 65,77%.

Langkah perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PAN & RB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh pada tahun 2023 antara lain :

- a. Melakukan penyempurnaan atas indikator-indikator khususnya di level Perangkat Daerah yang masih belum sepenuhnya berorientasi hasil.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu :

1. Pembentukan Tim Sakip Kota yang bertugas melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dalam melakukan penyempurnaan dokumen Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah serta memeriksa dan memastikan pemenuhan dokumen SAKIP Perangkat Daerah;
2. Melaksanakan pendampingan penyusunan dan penyempurnaan cascading kinerja perangkat daerah hingga indikator kinerja agar lebih berorientasi kepada hasil

3. Pelaksanaan reviu dan perbaikan pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) agar lebih berorientasi hasil dan sesuai dengan levelnya;
- b. Menyempurnakan pohon kinerja sehingga memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta menggambarkan *Critical Succes Factor (CSF)* untuk mempengaruhi pencapaian kondisi kinerja yang ditetapkan.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu :

1. Menerbitkan pedoman Sakip berupa Surat Edaran Walikota Nomor 060/303/ED/WK-PYK/2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh;
2. Penyempurnaan pohon kinerja, *Cascading* dan *Crosscutting* kinerja Kota Payakumbuh kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan pohon kinerja perangkat daerah.



Gambar 3.12
Pembahasan Pohon Kinerja, Cascading dan Crosscutting Kota

- c. Menggunakan aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan dan hasil yang digunakan sebagai dasar pemberian *rewards and punishment*.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu :

1. Pengembangan dan penyesuaian aplikasi manajemen kinerja (aplikasi e-kinerja) Kota Payakumbuh berbasis penjenjangan kinerja;

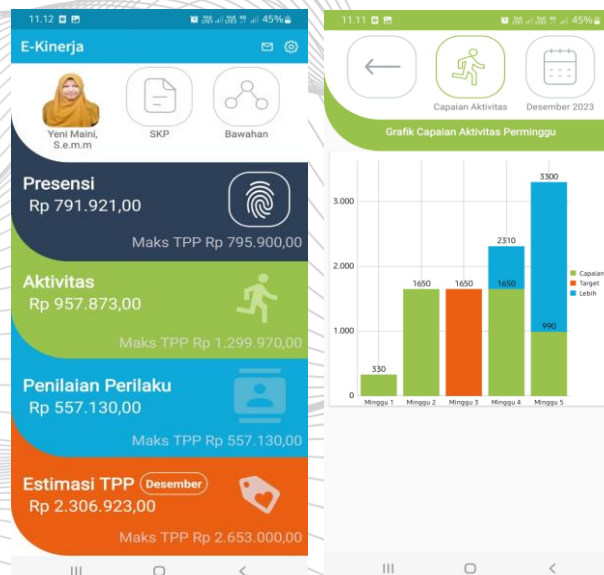
2. Pemberian *reward* berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada aplikasi e-kinerja.



Gambar 3.13
Penyerahan Reward ASN Berprestasi Tingkat Kota Payakumbuh

- d. Mendorong komitmen pimpinan unit kerja untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan *feedback* perbaikan sebagai bentuk pengawasan pimpinan unit/satuan kerja terhadap pencapaian kinerja.

Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi e-kinerja dalam monitoring dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja;



Gambar 3.14
Aplikasi e-Kinerja sebagai Sarana Monitoring Kinerja

- e. Memastikan kinerja pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil

kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi. Langkah perbaikan yang dilaksanakan dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut yaitu Penyusunan cascading kinerja yang menggambarkan keterkaitan antara kinerja individu pegawai dengan pencapaian kinerja organisasi dan dituangkan dalam perjanjian kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Penyusunan SKP telah mengacu kepada cascading kinerja yang disusun.

CASCADING KINERJA - PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA						
Tujuan RPD	Terwujudnya pemerintah yang efektif efisien dan akuntabel					
Indikator Tujuan	Indeks RB					
Sasaran RPD	Meningkatnya pelayanan publik yang prima					
Indikator Sasaran	Nilai IKM					
Tujuan Renstra	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel					
Indikator Tujuan	Nilai Evaluasi AKIP Kota					
Sasaran Renstra	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan					
Indikator	1. IKM 2. Nilai LFPD 3. Indeks Pelayanan Publik					
Sasaran Strategis	Meningkatnya penataan perangkat daerah yang efisien, efektif, profesional dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan pemerintahan daerah	Meningkatnya pengendalian administrasi pembangunan			
Indikator	1. Indeks ketepatan PD 2. Nilai Evaluasi AKIP Komponen Pelaporan	1. Persentase pengelolaan sda pemerintahan umum	1. Persentase pengelolaan kegiatan yang lebih administrasi sesuai aturan 2. Persentase strategi pengendalian inflasi (4K) Kota Payakumbuh			
Sasaran Kabag	1. Terwujudnya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Meningkatkan kualitas dokumen pelaporan LKIP	Meningkatnya pemberdayaan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pembangunan			
Indikator	1.1 Persentase Perangkat Daerah yang sesuai sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 2.1 Persentase Perangkat Daerah yang memiliki IKM dengan kategori Baik 2.2. Persentase unit pelayanan publik dengan kategori Pelayanan Baik 3.1 Persentase Perangkat Daerah yang nilai komponen pelaporannya dalam kategori Baik	1.1 Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan dalam kategori baik; 2. Persentase masalah kewilayahan yang ditangani; 3. Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat	1. Persentase jumlah paket lelang yang melalui elektronik 2. Persentase capaian realisasi fisik kegiatan 3. Persentase capaian realisasi keuangan 4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa			
Sasaran Strategis	1. Meningkatkan penataan kelembagaan Perangkat Daerah 2. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen pelayanan publik	1. Meningkatkan keputahan PD dalam menyampaikan dokumen pelaksanaan 2. Tersedianya Pedoman Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja PD	1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Administrasi 2. Meningkatkan fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	1. Meningkatkan monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan pembangunan	1. Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang/jasa yang berbasis elektronik	1. Meningkatkan fasilitasi pengadaan barang/ jasa yang terakomodir melalui UKPBJ
Indikator	1.1 Persentase jabatan pada organisasi Perangkat Daerah yang telah di ANJAB dan ABK 1.2. Persentase jabatan yang lebih ditetapkan kelas jabatannya oleh Kerner-PAN-RB 1.3. Persentase usulan Produk Hukum Perangkat Daerah yang difasilitasi	1.1 Persentase PD yang menyusun dokumen ketatalaksanaan sesuai dengan pedoman 2.1 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menyusun Survey IKM sesuai pedoman 2.2 Persentase Perangkat Daerah yang penyelenggaraan pelayanan publik nya dalam kategori baik	1.1 Persentase Papat Struktural yang menyampaikan dokumen Perjanjian Kinerja tepat waktu 1.2 Persentase PD yang menyampaikan dokumen LKIP tepat waktu 1.3 Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan dokumen Rencana Aksi 1.4 Persentase PD yang menyusun RKT tepat waktu 2.1 Jumlah Pedoman	1.1 Persentase hasil monitoring evaluasi yang ditindaklanjuti	1.1 Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui elektronik	1.1 Persentase tender/tekteks yang terselamatkan melalui UKPBJ 1.2 Persentase pengadaan barang/ jasa yang dilakukan melalui UKPBJ

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PEKERJAAN HASIL KERJA BAKUPERTIF
BAGI PEJABAT FUNGSIAN TINGKAT DAN FUNGSIAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	2	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	1	100%
2	INP PMS/02/190601001	2	INP PMS/01/190601001	2	100%
3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	100%
4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	100%
5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERKURIP
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%
2	Meningkatnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%
3	Meningkatnya keputahan PD dalam menyampaikan dokumen pelaksanaan	100%	100%
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Administrasi	100%	100%
5	Meningkatnya fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	100%

TAMBAHAN

1. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
2. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
3. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PEKERJAAN HASIL KERJA BAKUPERTIF
BAGI PEJABAT FUNGSIAN TINGKAT DAN FUNGSIAN UNIT KERJA MANDIRI

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	2	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	1	100%
2	INP PMS/02/190601001	2	INP PMS/01/190601001	2	100%
3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	100%
4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	100%
5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERKURIP
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%
2	Meningkatnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%
3	Meningkatnya keputahan PD dalam menyampaikan dokumen pelaksanaan	100%	100%
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Administrasi	100%	100%
5	Meningkatnya fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	100%

TAMBAHAN

1. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
2. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
3. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PEKERJAAN HASIL KERJA BAKUPERTIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	2	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	1	100%
2	INP PMS/02/190601001	2	INP PMS/01/190601001	2	100%
3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	100%
4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	100%
5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERKURIP
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%
2	Meningkatnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%
3	Meningkatnya keputahan PD dalam menyampaikan dokumen pelaksanaan	100%	100%
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Administrasi	100%	100%
5	Meningkatnya fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	100%

TAMBAHAN

1. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
2. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
3. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PEKERJAAN HASIL KERJA BAKUPERTIF
BAGI PEJABAT ADMINISTRASI DAN PEJABAT FUNGSIONAL

PERIODE PENILAIAN: 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2024

NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	NO	PELAYANAN YANG DIBERIKAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
1	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	2	INSA DIN. BINA, BINA, KEB. 2	1	100%
2	INP PMS/02/190601001	2	INP PMS/01/190601001	2	100%
3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	PANCAKAT/ GDL PUSKES/1000/19/19/19	3	100%
4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	JAMBATAN HEKSTARI/01/000000000	4	100%
5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	UNIT KERJA BINAAN/000000000	5	100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

NO	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERKURIP
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100%	100%
2	Meningkatnya penataan kelembagaan Perangkat Daerah	100%	100%
3	Meningkatnya keputahan PD dalam menyampaikan dokumen pelaksanaan	100%	100%
4	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum Administrasi	100%	100%
5	Meningkatnya fasilitasi pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	100%	100%

TAMBAHAN

1. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
2. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat
3. Menunjang dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat

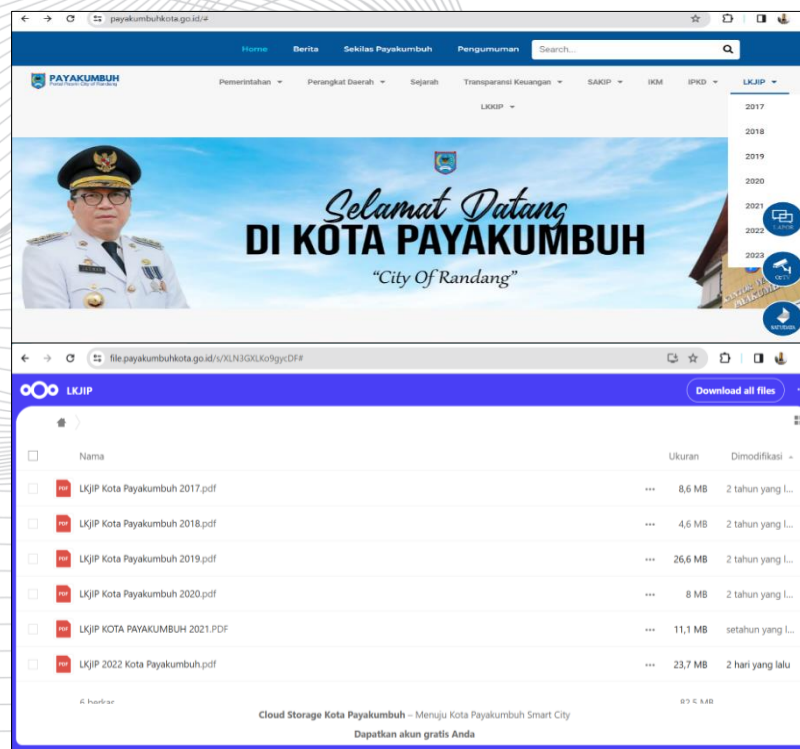
Gambar 3.15
Cascading Kinerja dan SKP pada Sekretariat Daerah

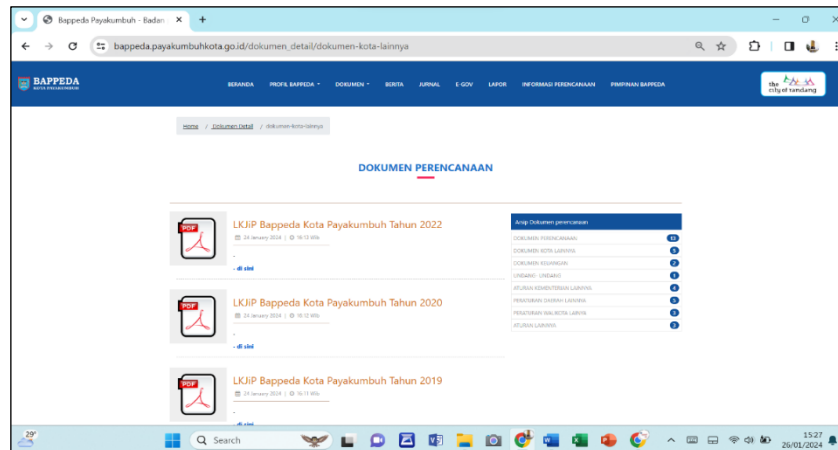
- f. Melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada PD dan kemudian melakukan *follow up* atas saran yang telah diberikan. Monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja seluruh perangkat daerah dilaksanakan secara berkala.



Gambar 3.16
Rapat Koordinasi dalam Rangka Monev Kinerja Perangkat Daerah

- g. Mengunggah Laporan Kinerja Pemerintah Kota dan PD pada *website* milik Pemerintah Daerah maupun PD sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik;





Gambar 3.17
Unggahan Laporan Kinerja Pemerintah di Website Kota dan PD

- h. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Perangkat Daerah *cluster tambahan* dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja;



Gambar 3.18
Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja PD

- i. Meningkatkan kualitas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas implementasi manajemen kinerja PD dan memberikan rekomendasi yang spesifik, serta memastikan bahwa rekomendasi hasil evaluasi internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan kinerja, manajemen kinerja dan peningkatan kinerja PD secara berkelanjutan;
- j. Meningkatkan kualitas SDM Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi internal, sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat, serta

memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Peningkatan kualitas SDM Inspektorat dalam melaksanakan evaluasi internal dilaksanakan melalui pembelajaran secara mandiri yang dilaksanakan secara daring. Peningkatan kualitas SDM Inspektorat ini ditandai dengan hasil evaluasi yang lebih tajam dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip *professional judgement*. Hal ini juga terlihat dari Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 oleh tim evaluator Inspektorat menunjukkan hasil yang lebih bervariasi, dimana pada tahun 2023 nilai AKIP lebih bervariasi dan mendekati nilai AKIP hasil penilaian Kementerian PANRB. Berikut perbandingan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2022 dengan tahun 2023.

Tabel 3.54

**Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah se Kota Payakumbuh
Tahun 2022 dan 2023**

NO	Perangkat Daerah	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	96,13	AA	75,35	BB
2	Bappeda	92,58	AA	81,50	A
3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	92,02	AA	80,10	A
4	Dinas Pertanian	91,67	AA	83,00	A
5	Dinas Pendidikan	91,52	AA	77,15	BB
6	Inspektorat	91,05	AA	82,30	A
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90,81	AA	81,90	BB
8	Sekretariat Daerah	89,99	A	69,70	B
9	Kantor Kesbangpol	89,98	A	71,50	BB
10	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	89,90	A	90,00	AA
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	89,78	A	80,40	A
12	Badan Keuangan Daerah	89,70	A	62,00	B
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	89,66	A	73,55	BB
14	Dinas Perhubungan	89,53	A	80,50	A
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	89,39	A	80,90	A
16	BPBD	88,85	A	76,00	BB
17	Kecamatan Lamposi Tigo Nagori	88,81	A	70,90	BB
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	88,78	A	72,70	BB

NO	Perangkat Daerah	Tahun 2022		Tahun 2023	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
19	Dinas Ketahanan Pangan	88,63	A	69,00	B
20	Sekretariat DPRD	88,06	A	70,30	BB
21	Dinas Kesehatan	87,94	A	83,50	A
22	Dinas Lingkungan Hidup	87,82	AA	74,50	BB
23	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	87,46	A	68,70	B
24	Dinas Koperasi dan UKM	87,34	A	66,35	B
25	Kecamatan Payakumbuh Timur	87,24	A	76,80	BB
26	Kecamatan Payakumbuh Selatan	87,03	A	78,00	BB
27	Kecamatan Payakumbuh Barat	86,13	A	70,60	BB
28	Kecamatan Payakumbuh Utara	85,89	A	79,15	BB
29	Dinas P3A dan P2KB	85,88	A	81,40	A
30	Dinas Sosial	85,09	A	63,80	B
31	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	83,93	A	85,75	A
	Rata-Rata	88,99	A	76,04	BB

Sumber : Inspektorat Kota Payakumbuh

Rencana aksi perbaikan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh kedepannya antara lain :

1. Akan mereviu kembali atas keselarasan sasaran strategis, program dan kegiatan serta memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja;
2. Melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
3. Melakukan dialog kinerja terhadap target kinerja yang akan diperjanjikan untuk meningkatkan rasa kepemilikan kinerja dan strategi yang akan dilakukan dalam pencapaian kinerja tersebut serta reward and punishment sesuai komitmen yang dibuat;
4. Melakukan penghapusan program dan kegiatan yang tidak memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan hasil analisis kerangka logis penjabaran kinerja dalam rangka refocusing program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

5. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja individu yang lebih berorientasi pada kebutuhan organisasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi terutama pada aplikasi pengukuran kinerja
6. Peningkatan kapasitas evaluator dalam melakukan evaluasi internal;

Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator :

1. Komitmen pimpinan perangkat daerah dan seluruh jajarannya untuk terus meningkatkan implementasi SAKIP di unit kerja masing-masing;
2. Mengupayakan internalisasi nilai-nilai SAKIP dan menjadikannya budaya kerja bagi setiap personil pada setiap unit kerja
3. Terdapat *reward and punishment* terhadap pencapaian kinerja masing-masing individu yang terintegrasi dalam aplikasi e-kinerja pemerintah Kota Payakumbuh;
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelola SAKIP dan pendampingan serta evaluasi internal yang dilakukan secara berkelanjutan.

2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur Peningkatan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). IPKD merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Tujuan pengukuran IPKD antara lain :

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu;
2. Memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah;
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota;
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik;

5. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pengukuran IPKD dilakukan dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian masing-masing bobot dimensi dan indeks dimensi. Terdapat 6 dimensi dalam pengukuran IPKD yaitu :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot 15%, menggunakan indikator :
 - 1) Kesesuaian program RPJMD dan RKPD
 - 2) Kesesuaian program RKPD dan KUA-PPAS
 - 3) Kesesuaian program KUA-PPAS dan APBD
 - 4) Kesesuaian pagu RKPD dan KUA-PPAS
 - 5) Kesesuaian pagu KUA-PPAS dan APBD
2. Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD dengan bobot 20%, menggunakan indikator :
 - 1) Alokasi jumlah belanja untuk fungsi pendidikan minimal 20% dari APBD;
 - 2) Alokasi jumlah belanja untuk urusan kesehatan minimal 10% dari APBD;
 - 3) Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi Dana Transfer minimal 25% dari DTU
 - 4) Alokasi jumlah belanja untuk memenuhi SPM sesuai Perundang-undangan
3. Transparansi Keuangan Daerah dengan bobot 15%, menggunakan indikator :
 - 1) Ketepatan waktu pengungkapan
 - 2) Keteraksesan
4. Penyerapan Anggaran dengan bobot 20%, menggunakan indikator :
 - 1) Belanja Transfer Daerah
 - 2) Belanja Operasional
 - 3) Belanja Modal
 - 4) Belanja Tak Terduga
5. Kondisi Keuangan Daerah dengan bobot 15%, menggunakan indikator :
 - 1) Kemandirian keuangan;
 - 2) Solvabilitas jangka panjang;

- 3) Fleksibilitas keuangan;
 - 4) Solvabilitas layanan;
 - 5) Solvabilitas Operasional;
 - 6) Solvabilitas jangka menengah.
6. Opini BPK atas LKPD dengan bobot 15%, menggunakan pengukuran dilakukan terhadap hasil opini BPK terhadap LPKD selama 3 tahun berturut-turut.

Dalam mendukung pelaksanaan pengukuran IPKD di Kota Payakumbuh, telah dibentuk Tim Persiapan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 dengan keputusan Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Nomor 065.1/27/Wk-Pyk/2023 tentang Tim Persiapan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023. Tim persiapan ini terdiri dari Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertugas melakukan koordinasi terkait penginputan 6 (enam) dimensi dalam pengukuran IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) dan melakukan input data melalui aplikasi IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) yang meliputi 6 (enam) dimensi pengukuran.

Hasil pengukuran IPKD dikelompokkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah. Sedangkan hasil pengukuran meliputi Peringkat Baik dengan nilai A, Peringkat Perlu Perbaikan dengan nilai B dan Peringkat Sangat Perlu Perbaikan dengan nilai C. Kota Payakumbuh termasuk dalam kelompok Kota dengan Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Berdasarkan hasil pengukuran pada setiap dimensi, Kota Payakumbuh memperoleh nilai 77,433 dan telah memperoleh nilai maksimal pada 3 dimensi yaitu dimensi 2 Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD, dimensi 3 Transparansi Keuangan Daerah dan dimensi 6 Opini BPK atas LKPD. Sedangkan untuk 3 dimensi lainnya masih perlu ditingkatkan terutama dimensi 5 yaitu Kondisi Keuangan Daerah yang hanya memperoleh nilai 2,704 dari 15 poin maksimal. Kondisi keuangan Daerah adalah kemampuan Keuangan suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi

kewajibannya mengantisipasi kejadian tak terduga, dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Rincian nilai per dimensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.55

Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Uraian	Bobot	Nilai
1	Dimensi 1	15	11,395
2	Dimensi 2	20	20
3	Dimensi 3	15	15
4	Dimensi 4	20	13,333
5	Dimensi 5	15	2,704
6	Dimensi 6	15	15
	Total Indeks IPKD	100	77,433

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan nilai IPKD Kota Payakumbuh berada di posisi 75,000 dengan realisasi 77,433 dengan capaian kinerja 103,24% atau kategori **Sangat Baik**. IPKD Kota Payakumbuh mempunyai peringkat Baik dengan Nilai A. Capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 71,8861 atau naik 5,5469 poin dari tahun 2022. Nilai IPKD Kota Payakumbuh lebih baik dari rata-rata nasional IPKD Kota dengan Kemampuan Keuangan Rendah, dimana rata-rata IPKD sebesar 66,83



dengan standar deviasi 9,39. Nilai ini merupakan nilai rata-rata IPKD dari 51 Kota dengan Kemampuan Keuangan Rendah. Secara nasional Kota Payakumbuh juga menempati posisi kelima terbaik Hasil pengukuran IPKD Kota

seluruh Indonesia dengan Kemampuan Keuangan Daerah “Rendah”. Sedangkan untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat menempati posisi ketiga dari 19 kabupaten Kota Se Sumatera Barat dan Peringkat Pertama untuk

kategori Kota. Penyerahan piagam penghargaan oleh Gubernur Sumatera Barat dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2023. Hasil pengukuran IPKD untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.56
Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten / Kota se Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	IPKD	Peringkat	Nilai
1	Kab. Solok Selatan	80,118	Baik	A
2	Kab. Dharmasraya	79,557	Baik	A
3	Kota Payakumbuh	77,433	Baik	A
4	Kota Sawahlunto	77,005	Baik	A
5	Kab. Kepulauan Mentawai	74,637	Perlu Perbaikan	B
6	Kab. Solok	73,112	Perlu Perbaikan	B
7	Kab. Padang Pariaman	72,438	Perlu Perbaikan	B
8	Kota Padang	71,485	Perlu Perbaikan	B
9	Kab. Pasaman Barat	70,911	Perlu Perbaikan	B
10	Kab. Agam	70,32	Perlu Perbaikan	B
11	Kab. Sijunjung	70,194	Perlu Perbaikan	B
12	Kab. Pasaman	70,133	Perlu Perbaikan	B
13	Kota Solok	69,697	Perlu Perbaikan	B
14	Kota Pariaman	68,701	Perlu Perbaikan	B
15	Kota Bukittinggi	68,534	Perlu Perbaikan	B
16	Kab. Pesisir selatan	67,257	Perlu Perbaikan	B
17	Kab. Tanah datar	63,187	Perlu Perbaikan	B
18	Kota Padang Panjang	62,663	Perlu Perbaikan	B
19	Kab. Lima Puluh Kota	59,635	Sangat Perlu Perbaikan	C
	Provinsi Sumatera Barat	76,125	Perlu Perbaikan	B

Sumber : Kementerian Dalam Negeri, 2023

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Meningkatkan keselarasan perencanaan dan penganggaran dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi SIPD RI;

2. Membangun komitmen antara Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya dalam meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;
3. Penetapan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah serta didukung oleh komitmen dari seluruh *stakeholder* untuk melaksanakannya;
4. Penerapan pemberian *reward and punishment* bagi seluruh pejabat pengelola keuangan dan aset di lingkup Pemerintah Kota Payakumbuh;
5. Melakukan evaluasi berjenjang terhadap setiap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh OPD agar terlaksana secara efisien, efektif dan ekonomis dengan mempedomani seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP Kota dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/ Kota;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
3. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
4. Program Perekonomian dan Pembangunan;
5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
6. Program Pengelolaan Arsip;
7. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
8. Program Perizinan Penggunaan Arsip;
9. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Program Pengelolaan BMD;
13. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
14. Program Kepegawaian Daerah;
15. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
16. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;

17. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
18. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
19. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
20. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Etika Serta Budaya Politik, Pendidikan Politik Dan Pengembangan;
21. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
22. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
23. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Sasaran 8 : Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima

Terwujudnya Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel merupakan tujuan yang dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang berkualitas. Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya yang harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua aparatur pemerintah. Guna mendukung dan menjamin terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan langkah-langkah dan kebijakan terkait peningkatan kualitas pelayanan publik diantaranya melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala dan berkelanjutan, melakukan penilaian mandiri terhadap kepatuhan standar pelayanan publik dan pendampingan serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit pelayanan publik di Kota Payakumbuh. Disamping itu juga meningkatkan pelayanan publik dengan optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima merupakan salah satu satu sasaran untuk mewujudkan tujuan Terwujudnya Pemerintahan yang

Efektif, Efisien dan Akuntabel. Tolak ukur atau indikator yang digunakan dalam sasaran ini yaitu Indeks SPBE dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima tahun 2023 tersaji pada Tabel 3.57

Tabel 3.57
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian thn 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai capaian %			
1	Indeks SPBE	3,02	2,5	3,17	126,80	Sangat Baik	3,2	99,06
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89,24	88,41	89,65	101,40	Sangat Baik	88,80	100,96
Rata-rata					114,10			

Sumber data : Kementerian PANRB, Data diolah 2023

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks SPBE

Dalam mencapai sasaran meningkatnya pelayanan publik yang prima, salah satu tolak ukur yang digunakan adalah bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur hal ini adalah Indeks SPBE. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar

penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap tahun untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

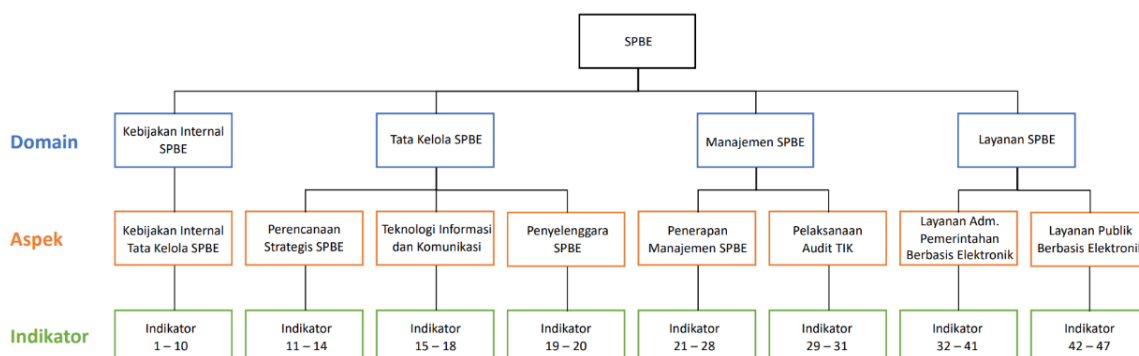
Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Secara umum Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada instansi pemerintah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi pemerintah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai Indeks SPBE. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen berupa 47 indikator pada 4 (empat) domain dan 8 Aspek SPBE. Dengan struktur penilaian terdiri dari :

1). Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai; 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai. Bobot nilai untuk setiap domain sebagai berikut :

1. Domain Kebijakan Internal SPBE sebesar 13%;
2. Domain Tata Kelola SPBE sebesar 25%;
3. Domain Manajemen sebesar 16,5%; dan
4. Domain Layanan SPBE sebesar 45,5%.

Struktur penilaian Tingkat Kematangan SPBE dapat dilihat pada Gambar 3.19



Gambar 3.19
Struktur Penilaian Tingkat Kematangan SPBE

Dalam penilaian indeks SPBE dilakukan pada setiap indikator kegiatan/ aktifitas yang disertai data dukung sebagai bukti terlaksananya kegiatan tersebut. Nilai indeks SPBE diberikan untuk masing-masing indikator dalam domain dan aspek penilaian. Kategori dari nilai indeks SPBE dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.58
Kategori Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 ≤ 4,2	Sangat Baik
3	2,6 ≤ 3,5	Baik
4	1,8 ≤ 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No 59 Tahun 2020

Hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 mencerminkan kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan nilai Indeks SPBE Kota Payakumbuh berada di posisi 2,50 dengan realisasi 3,17 dengan capaian kinerja 126,8% atau kategori **Sangat Baik**. Indeks SPBE 3,17 menggambarkan Predikat Baik Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penerapan SPBE. Capaian tahun 2023 lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,02 atau naik 0,15 poin dari tahun 2022.

Tabel 3.59

**Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Payakumbuh Tahun 2019 s.d 2023**

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2019	2,57	Cukup
2	2020	2,89	Baik
3	2021	2,42	Cukup
4	2022	3,02	Baik
5	2023	3,17	Baik

Sumber : Kementerian PANRB

Berdasarkan data sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.59 dapat dilihat bahwa Indeks SPBE Kota Payakumbuh selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021, dimana tahun 2020 indeks SPBE 2,89 dan turun menjadi 2,42 pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian instrumen penilaian, dimana sebelumnya menggunakan 37 indikator menjadi 47 indikator. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun 2021. Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 menjadi baseline kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun mulai tahun 2022 Indeks SPBE Kota Payakumbuh meningkat cukup signifikan, hingga Tahun 2023 yaitu 3,17.

Rincian hasil penilaian SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2023 berdasarkan domain dan aspek dapat dilihat pada **Tabel 3.60**

Tabel 3.60

**Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Payakumbuh Tahun 2023**

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,17
Domain Kebijakan SPBE	2,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,90

Domain Tata Kelola SPBE	3,20
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,09
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,13
<i>Audit TIK</i>	2,00
Domain Layanan SPBE	3,62
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,50

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Selanjutnya lebih rinci, hasil penilaian SPBE Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat kematangan untuk masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.61 berikut ini.

Tabel 3.61
Nilai Tingkat Kematangan Indikator SPBE
Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Domain/ Aspek/ Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
I	Domain Kebijakan SPBE	
A	Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
II	Domain Tata Kelola SPBE	
B	Aspek Perencanaan Strategis SPBE	

No	Domain/ Aspek/ Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	4
C	Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	4
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
D	Aspek Penyelenggaraan SPBE	
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
III	Domain Manajemen SPBE	
E	Aspek Penerapan Manajemen SPBE	
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
F	Aspek Pelaksanaan Audit TIK	
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	2
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	4
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	4
IV	Domain Layanan SPBE	
G	Aspek Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3

No	Domain/ Aspek/ Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2023
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
H	Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	3
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Berdasarkan data tabel diatas, dapat diuraikan kekuatan dan kelemahan hasil evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun 2023 untuk setiap aspek di masing-masing domain, antara lain :

a) Aspek Kebijakan internal terkait Tata Kelola SPBE

Semua indikator dalam aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana, Manajemen Data, pembangunan aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Tim Koordinasi SPBE dengan tingkat kematangan 3 dan audit TIK dengan tingkat kematangan 2. Kebijakan Internal Audit TIK menjadi kelemahan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penerapan SPBE di aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

b) Aspek Perencanaan Strategis

Semua indikator di Aspek Perencanaan Strategis SPBE di Pemerintah Kota Payakumbuh telah memenuhi tingkat kematangan, yaitu indikator 11 Arsitektur SPBE, indikator 12 Peta Rencana SPBE, indikator 13 Rencana dan Anggaran SPBE dengan Tingkat Kematangan 3 dan Indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE dengan Tingkat kematangan 2 yang menjadi kelemahan dalam penerapan SPBE di Pemerintah Kota Payakumbuh.

c) Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pemerintah Kota Payakumbuh telah mampu memenuhi penerapan SPBE pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di semua indikator, yaitu indikator Pembangunan Aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra dengan tingkat kematangan 4 dan penggunaan sistem penghubung layanan dengan tingkat kematangan 3. Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kota Payakumbuh ini terdapat 3 indikator yang menjadi kekuatan, yaitu Pembangunan aplikasi (indikator 15) telah membangun dan mengembangkan aplikasi yang mengikuti siklus Pembangunan aplikasi secara lengkap, layanan pusat data (indikator 16) dan layanan jaringan intra (indikator 17). Ketiga indikator tersebut telah dilaksanakan reviu dan memiliki Tingkat kematangan 4.

d) Aspek Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggaraan SPBE sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di semua indikator, yaitu Indikator 19 tim koordinasi SPBE dan indikator 20 kolaborasi penerapan SPBE dengan tingkat kematangan 3.

e) Aspek Penerapan Manajemen SPBE

Pada aspek penerapan manajemen SPBE sudah 5 dari 8 indikator yang dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu: penerapan manajemen keamanan informasi, manajemen data, kompetensi SDM dengan tingkat keamanan 3 dan manajemen asset TIK, manajemen layanan SPBE dengan tingkat kematangan 2. Namun terdapat 3 indikator yang belum dilaksanakan dan menjadi kelemahan Pemerintah Kota Payakumbuh di Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini, yaitu Penerapan Manajemen Resiko, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan dengan tingkat kematangan 1.

f) Aspek Audit TIK

Semua indikator di Aspek Audit TIK yang dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu indikator 29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur, indikator 30 Pelaksanaan Audit Aplikasi dan indikator 31 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dengan tingkat kematangan 2. Semua indikator pada Aspek Audit TIK ini menjadi kelemahan Pemerintah Kota Payakumbuh

g) Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh di semua indikator pada aspek ini, yaitu: layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan kinerja pegawai dengan Tingkat kematangan 4 – telah berkolaborasi. Ketujuh indikator tersebut telah mencapai tahapan pemberian layanan berkolaborasi dengan sistem dan aplikasi SPBE lainnya, seperti layanan pengadaan barang dan jasa menggunakan aplikasi LPSE yang terintegrasi dengan SIKAP, e-katalog. Selain itu, layanan yang diberikan telah direviu.

h) Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Layanan Publik berbasis elektronik, semua indikator telah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu Layanan Pengaduan Publik, Layanan JDIH dengan tingkat kematangan 3, Layanan Data Terbuka dengan tingkat kematangan 2, layanan publik Sektoral 1- SIPADUKO dengan tingkat kematangan 5, Layanan Publik Sektoral 2- Sistem Informasi Penanganan Stunting dan Layanan Publik Sektoral 3 – Aplikasi Android myKopay dengan tingkat kematangan 4.

Dalam Aspek Layanan Publik berbasis elektronik ini terdapat 3 indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Payakumbuh, yaitu: indikator 45 Layanan Publik sektoral 1 – Sipaduko dengan Tingkat kematangan 5 dimana hasil reviu sudah ditindaklanjuti. Selanjutnya Indikator 46 Layanan Publik Sektoral 2- Sistem Informasi Penanganan Stunting dan Indikator 47 Layanan Publik sektoral 3 – Aplikasi Android myKopay dengan tingkat kematangan 4 dimana sistem SPBE terintegrasi/berkolaborasi dan sudah direviu. Sedangkan indikator 43 layanan data terbuka (tingkat kematangan 2) menjadi kelemahan penyelenggaraan SPBE bagi Pemerintah Kota Payakumbuh.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang telah diuraikan diatas, Pemerintah Kota Payakumbuh secara prinsip telah menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE. Selanjutnya dalam rangka

menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SPBE Tahun 2023, Pemerintah Kota Payakumbuh akan berupaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penerapan SPBE berupa :

- 1) Pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE akan memperluas cakupan pengaturan audit TIK.
- 2) Pada aspek perencanaan strategis, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan penerapan manajemen resiko, manajemen pengetahuan dan perubahan.
- 3) Berupaya untuk melakukan pelaksanaan audit baik infrastruktur, aplikasi maupun keamanan audit TIK.
- 4) Pada aspek layanan administrasi pemerintah dan publik, Pemerintah Kota Payakumbuh berupaya untuk dapat melakukan tindak lanjut dari hasil reviu yang telah dilakukan khususnya untuk indikator dengan tingkat kematangan 4 dan memikirkan untuk berkolaborasi atau melakukan integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya untuk indikator dengan tingkat kematangan 3.
- 5) Meningkatkan layanan yang diberikan menjadi transaksi untuk layanan data terbuka pada aspek layanan publik berbasis elektronik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja secara nasional, Indeks SPBE Kota Payakumbuh berada diatas rata-rata nasional, dimana Indeks SPBE nasional hanya 2,79 dan rata-rata indeks SPBE tingkat Kota secara nasional hanya 2,5. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2023 secara nasional dapat diliha pada Tabel 3.62

Tabel 3.62
Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
Tahun 2023

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kement- rian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupa- ten	Kota
SPBE	2,79	3,66	3,40	2,95	3,01	2,59	2,50
Domain Kebijakan	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
Domain Tata Kelola	2,27	3,42	3,02	2,66	2,56	2,01	2,54
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26

Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggara SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
Domain Manajemen	1,65	2,53	2,31	1,98	1,81	1,45	1,82
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
Domain Layanan SPBE	3,45	4,21	3,99	3,43	3,64	3,28	3,67
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota di Sumatera Barat, menempati posisi ketujuh. Berikut hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat Tahun 2023.

Tabel 3.63
Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Barat
Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Indeks SPBE	Predikat
1	Kab. Pesisir selatan	4,17	Sangat Baik
2	Kota Padang	3,54	Sangat Baik
3	Kab. Solok	3,49	Baik
4	Kota Solok	3,37	Baik
5	Kab. Lima Puluh Kota	3,29	Baik
6	Kab. Tanah datar	3,22	Baik
7	Kota Payakumbuh	3,17	Baik
8	Kota Sawahlunto	3,09	Baik
9	Kab. Solok Selatan	2,98	Baik
10	Kota Padang Panjang	2,92	Baik
11	Kab. Dharmasraya	2,83	Baik
12	Kab. Pasaman Barat	2,82	Baik
13	Kota Pariaman	2,65	Baik
14	Kab. Padang Pariaman	2,62	Baik
15	Kab. Agam	2,55	Cukup

No	Kabupaten/ Kota	Indeks SPBE	Predikat
16	Kota Bukittinggi	2,49	Cukup
17	Kab. Pasaman	2,38	Cukup
18	Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
19	Kab. Kepulauan Mentawai	1,53	Kurang
	Provinsi Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PANRB, 2023

Program capaian untuk mendukung indikator sasaran Indeks SPBE tahun 2023 :

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
4. Pengelolaan Arsip;
5. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima dapat dilihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks ini digunakan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat. Survei kepuasan masyarakat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan secara mandiri oleh instansi penyelenggara pelayanan maupun oleh pihak lain, sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa “penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala”. Dalam penjelasan Undang-Undang Pelayanan Publik disampaikan juga bahwa penilaian kinerja merupakan hasil pelaksanaan penilaian penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan/ atau pihak lain

atas permintaan penyelenggara untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan dengan menggunakan metode penilaian tertentu.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Payakumbuh melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat berpedoman Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, kinerja unit pelayanan dapat diukur dengan standar sebagaimana terlihat pada Tabel 3.64

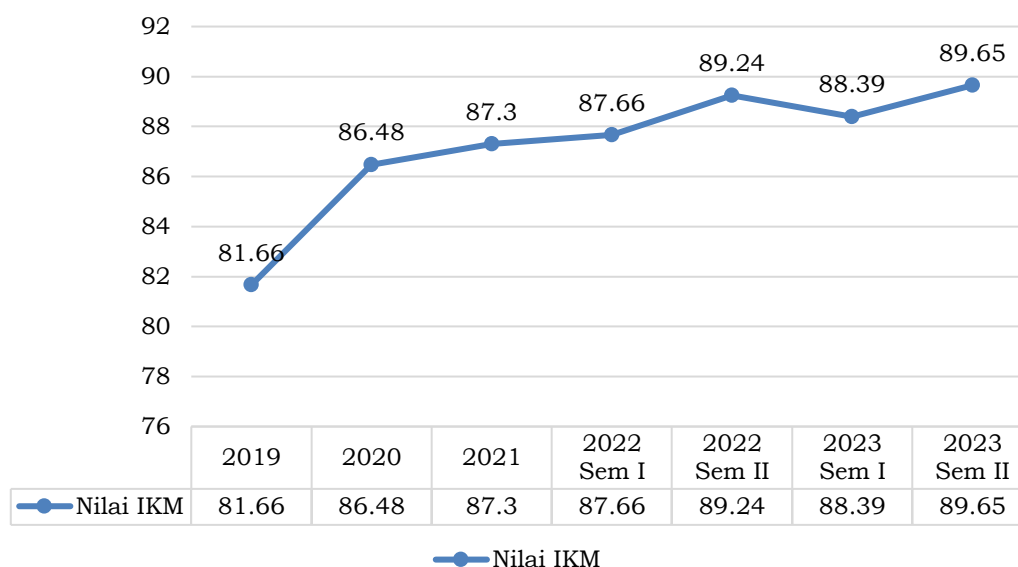
Tabel 3.64
Kategori Penilaian Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber : Permen PANRB No. 14 Tahun 2017

Pada semester pertama tahun 2023, nilai IKM Kota Payakumbuh berada pada posisi 88,39 sedangkan pada semester kedua atau akhir tahun 2023, nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 89,65. Hasil ini diperoleh dari rata-rata nilai IKM seluruh unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, yang terdiri dari 31 perangkat daerah, 1 RSUD dan 8 puskesmas dan Perumda Air Minum Tirta Sago, dengan total unit yang menyelenggarakan survei sebanyak 41 unit penyelenggara pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat Kota Payakumbuh pada akhir tahun 2023 sebesar 89,65 dengan kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Capaian Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2023 lebih tinggi dari yang ditargetkan hanya 88,41 sehingga capaian nilai IKM Kota Payakumbuh sebesar 101,40%. Hasil ini jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebanyak 0,41 poin dimana pada tahun 2022 pada periode kedua pelaksanaan survei nilai IKM Kota Payakumbuh hanya 89,24. Secara umum, Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.

Nilai IKM Kota Payakumbuh tahun 2019 hingga tahun 2023 yang dilakukan melalui survei mandiri dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Grafik 3.13
Nilai IKM Kota Payakumbuh Tahun 2019 s/d 2023

Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023 yang dilaksanakan oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.65

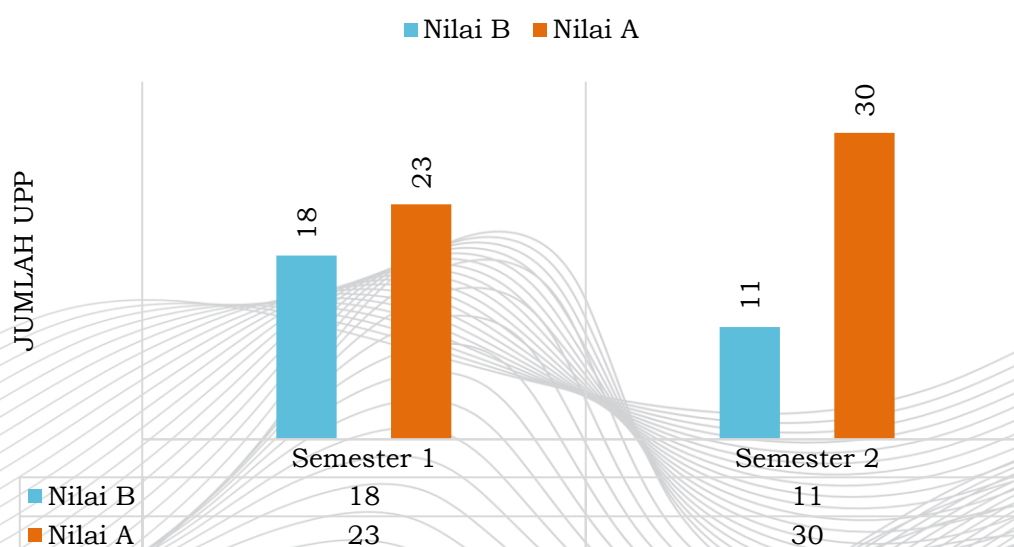
Tabel 3.65
Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2023

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM	Mutu Pelayanan
1	SEKRETARIAT DAERAH	89,95	A
2	SEKRETARIAT DPRD	84,77	B
3	INSPEKTORAT	91,85	A
4	DINAS PENDIDIKAN	91,99	A
5	DINAS KESEHATAN	91,55	A
6	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	92,52	A
7	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PEMUKIMAN	88,52	A
8	SAT POL PP & PEMADAM KEBAKARAN	90,34	A
9	DINAS SOSIAL	90,03	A

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM	Mutu Pelayanan
10	DINAS TENAGA KERJA & PERINDUSTRIAN	98,85	A
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK & PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA	91,88	A
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	86,53	B
13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	88,46	A
14	DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	96,15	A
15	DINAS PERHUBUNGAN	88,33	A
16	DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA	91,60	A
17	DINAS KOPERASI & UKM	87,66	B
18	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	98,47	A
19	DINAS PARIWISATA, PEMUDA & OLAH RAGA	90,55	A
20	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	87,35	B
21	DINAS PERTANIAN	89,08	A
22	BAPPEDA	89,37	A
23	BADAN KEUANGAN DAERAH	85,81	B
24	BADAN KEPEGAWAIAN & PENGEMBANGAN SDM	88,35	A
25	KECAMATAN PAYAKUMBUH BARAT	92,62	A
26	KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA	91,21	A
27	KECAMATAN PAYAKUMBUH TIMUR	91,92	A
28	KECAMATAN PAYAKUMBUH SELATAN	91,17	A
29	KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI	96,99	A
30	BPBD	92,02	A
31	KESBANGPOL	88,48	A
32	RSUD ADNAAN WD	92,17	A
33	PUSKESMAS IBUH	87,94	B
34	PUSKESMAS TAROK	82,16	B
35	PUSKESMAS PARIT RANTANG	80,29	B
36	PUSKESMAS LAMPASI	84,93	B

No	Unit Pelayanan Publik	Nilai SKM	Mutu Pelayanan
37	PUSKESMAS TIAKAR	88,80	A
38	PUSKESMAS AIR TABIT	92,52	A
39	PUSKESMAS PAYOLANSEK	83,09	B
40	PUSKESMAS PADANG KARAMBIA	88,99	A
41	PDAM TIRTA SAGO	80,48	B
Rata-rata Nilai SKM Kota Payakumbuh		89,65	A

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh serta semakin banyak UPP yang memperoleh nilai IKM Sangat Baik (A).



Grafik 3.14
Perbandingan Nilai IKM UPP Kota Payakumbuh Semester I dan II Tahun 2023

Dalam mengukur kualitas pelaksanaan pelayanan publik yang prima, disamping menggunakan survei kepuasan masyarakat, juga dinilai dari hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian PANRB. Hasil dari evaluasi ini adalah Indeks Pelayanan Publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga dan

pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten dan kota berdasarkan Aspek :

1. Kebijakan pelayanan yang terdiri dari Standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat.
2. Profesionalisme SDM.
3. Sarana Prasarana yang terdiri dari ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras, sarpras berkebutuhan khusus.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang terdiri dari ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs dan pemutakhiran data.
5. Konsultasi dan pengaduan yang terdiri dari media dan dokumentasi konsultasi dan pengaduan.
6. Inovasi pelayanan.

Penentuan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2023 dilaksanakan dengan melakukan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri terhadap 3 (tiga) lokus baru terkait layanan barang, layanan jasa dan layanan administrasi. Unit kerja yang dijadikan lokus PEKPPP Mandiri adalah Dinas Sosial untuk layanan barang, RSUD untuk lokus layanan jasa dan salah satu kecamatan untuk lokus administrasi. Lokus evaluasi layanan barang ditujukan untuk mengukur kualitas pelayanan yang berdampak pada kemudahan akses masyarakat terhadap bantuan sosial, layanan jasa untuk mengukur kualitas pada penyelenggaraan layanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu dan layanan administrasi untuk mengukur penyelenggaraan layanan publik yang dekat dengan masyarakat. Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 merupakan nilai hasil PEKPPP mandiri yang telah dilakukan validasi oleh Kementerian PANRB.

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2023 yaitu sebesar 4,41 dengan predikat A, kategori Sangat Baik dengan rincian Kecamatan Payakumbuh Timur memperoleh nilai 4,44 (Predikat A-), Dinas Sosial dengan nilai 4,36 (Predikat A-) dan RSUD dr. Adnaan WD dengan nilai 4,42 (Predikat A-). Kota Payakumbuh berada pada urutan ke-28 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia dan menempati posisi pertama untuk di wilayah Sumatera. Nilai IPP Tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya, dimana rata-rata nilai Kota Payakumbuh 4,56 (Predikat A) dengan lokus DPMPTSP dengan nilai 4,58 (Predikat A) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai 4,53 (Predikat A). Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa perubahan dalam pelaksanaan PEKPPP oleh Kementerian PANRB.

Pada tahun 2023 DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi dilakukan evaluasi namun hanya dilakukan pemantauan terhadap tindaklanjut atas rekomendasi perbaikan yang diberikan. Sedangkan nilai Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari pelaksanaan PEKPPP dilakukan secara mandiri oleh Tim Evaluator Kota Payakumbuh terhadap 3 (tiga) lokus baru terkait layanan barang, layanan jasa dan layanan administrasi yaitu Dinas Sosial Kota Payakumbuh, Rumah Sakit Umum Daerah Adnaan WD dan Kecamatan Payakumbuh Timur. Hasil evaluasi mandiri ini selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi oleh Kementerian PANRB dan kemudian ditetapkan nilai Indeks Pelayanan Publik. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dari tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.66**

Tabel 3.66
Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2019 s.d 2023

No	Tahun	Nilai IPP	Predikat	Kategori	Lokus Penilaian
1	2019	3,82	B	Baik	DPMPTSP, Disdukcapil, RSUD
2	2020	4,24	A-	Sangat Baik	DPMPTSP, Disdukcapil
3	2021	4,39	A-	Sangat Baik	DPMPTSP, Disdukcapil
4	2022	4,56	A	Pelayanan Prima	DPMPTSP, Disdukcapil
5	2023	4,41	A-	Sangat Baik	Dinas Sosial , RSUD, Kec. Payakumbuh Timur

Sumber : Kementerian PANRB

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat secara umum menempati posisi kedua setelah Kabupaten Padang Pariaman, namun untuk nilai IPP pelayanan publik oleh DPMPTSP Kota Payakumbuh memperoleh nilai tertinggi di Sumatera Barat dengan nilai 4,58. Rincian nilai untuk masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.67
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat 2023

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan		Dinas Sosial		RSUD		Rata-Rata Payakumbuh	
		Nilai	Predi- kat	Nilai	Predik at	Nilai	Predi- kat	Nilai IPP	Predi- kat
1	Kota Payakumbuh	4,44	A-	4,36	A-	4,42	A-	4,41	A-
2	Kab. Pesisir selatan	4,19	A-	4,49	A-	4,31	A-	4,33	A-
3	Kab. Tanah datar	4,21	A-	4,22	A-	4,31	A-	4,25	A-
4	Kab. Agam	4,15	A-	4,18	A-	4,33	A-	4,22	A-
5	Kab. Lima Puluh Kota	3,73	B	4,44	A-	4,31	A-	4,16	A-
6	Kota Padang	4,48	A-	3,67	B	4,21	A-	4,12	A-
7	Kota Pariaman	3,94	B	4,10	A-	4,24	A-	4,09	A-
8	Kab. Solok	3,72	B	4,25	A-	4,3	A-	4,09	A-
9	Kab. Padang Pariaman	2,89	C	4,11	A-	4,63	A	3,88	B
10	Kab. Dharmasraya	3,65	B	4,27	A-	3,65	B	3,86	B
11	Kota Padang Panjang	3,61	B	3,67	B	4,22	A-	3,83	B
12	Kab. Sijunjung	3,47	B-	3,57	B	4,45	A-	3,83	B
13	Kab. Solok Selatan	3,56	B	3,33	B-	3,82	B	3,57	B
14	Kota Sawahlunto	3,16	B-	3,05	B-	4,47	A-	3,56	B
15	Kab. Pasaman	3,08	B-	3,86	B	2,93	C	3,29	B-
16	Kota Bukittinggi	3,93	B	1,51	D	4,2	A-	3,21	B-
17	Kota Solok	2,19	C-	3,69	B	0	F	2,94	C
18	Kab. Pasaman Barat	2,93	C	2,72	C	3,1	B-	2,92	C
19	Kab. Kepulauan Mentawai	1,40	E	2,26	C-	3,24	B-	2,30	C-

Sumber : Kementerian PANRB Tahun 2023

Pengukuran kualitas pelayanan publik melalui IPP dilakukan untuk memperoleh gambaran kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemeringkatan unit penyelenggara pelayanan publik. Terdapat tiga isu yakni menyangkut kepuasan masyarakat, integrasi layanan, dan penyelenggaraan pelayanan secara *online*. Isu-isu tersebut diselesaikan lewat perubahan yang berdampak nyata. Beberapa kiat yang digunakan antara lain,

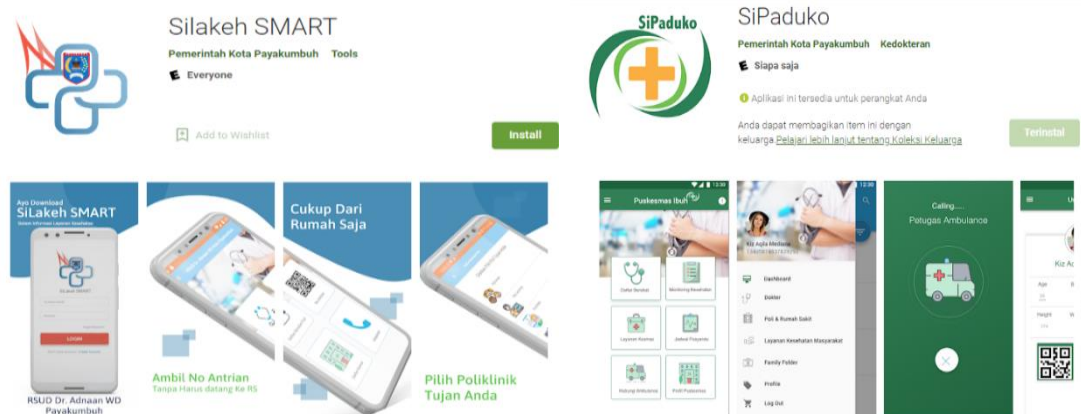


penyempurnaan regulasi pelayanan publik, penilaian penyelenggaraan pelayanan publik, serta penguatan inovasi yang berkelanjutan. Penghargaan kategori pelayanan prima bagi Kota Payakumbuh adalah suatu bentuk apresiasi tertinggi dari Pemerintah Pusat untuk daerah dalam hal penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan juga berkaitan langsung dengan pelayanan yang dilaksanakan pada Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh.

Keberadaan Mal Pelayanan Publik di Kota Payakumbuh sebagai wujud keseriusan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menghadirkan pelayanan prima sesuai kebijakan pusat untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia melalui kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan publik. Kemudahan dan penyederhanaan prosedur guna percepatan pelayanan publik dilaksanakan melalui digitalisasi operasional Mal Pelayanan Publik.

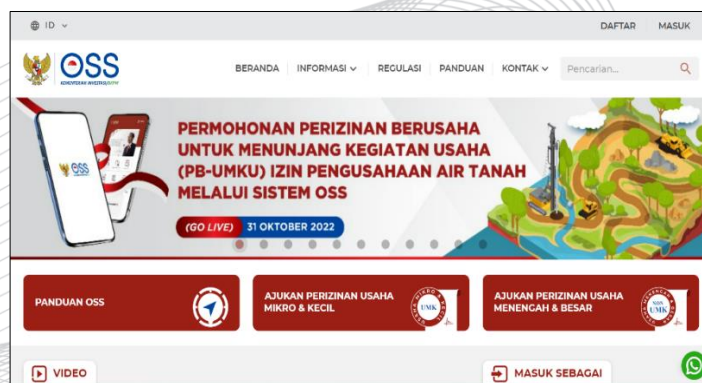
Selain itu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kota Payakumbuh juga menciptakan berbagai inovasi dalam percepatan pelayanan kepada masyarakat seperti di bidang kesehatan, terdapat inovasi digitalisasi layanan berupa inovasi Sipaduko (Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Kota Payakumbuh dan Silakeh SMART pada RSUD Adnaan WD Kota Payakumbuh). Kedua inovasi merupakan aplikasi mobile yang memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Payakumbuh untuk mendapatkan layanan kesehatan dan

informasi di Puskesmas dan dRSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, Dengan SiLakeh SMART dan SiPaduko masyarakat dapat mengambil nomor antrian layanan kesehatan yang anda inginkan tanpa harus datang ke puskesmas dan rumah sakit serta dapat melihat jadwal Poliklinik, dan informasi ketersediaan kamar rawat inap.



Gambar 3.20
Tampilan Aplikasi Silakeh SMART & SiPaduko

Peningkatan pelayanan publik juga dilaksanakan dengan memfasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Perizinan berusaha dimaksud



meliputi: kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan kegiatan usaha

dengan tingkat risiko tinggi. Penyelenggaraan perizinan melalui OSS-RBA ini mengakomodir perizinan berusaha dalam berbagai macam sektor usaha, yaitu: kelautan dan perikanan; pertanian; lingkungan hidup dan kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi kesehatan, obat dan makanan; pendidikan dan kebudayaan. pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem dan transaksi elektronik; pertanahan dan keamanan; dan ketenagakerjaan;

Disamping itu, Inovasi lain yang juga mendukung kemudahan pelayanan publik antara lain fasilitasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha diluar aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (non OSS RBA) melalui aplikasi SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Untuk Publik) pada DPMPTSP yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Selanjutnya pelayanan publik pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, dilakukan pemanfaatan peta digital untuk pertimbangan teknis dalam pelayanan PBG dan pelayanan informasi rencana kota berupa SIM BG (Sistem Informasi Bangunan), GISTARU (Geographic Information System Tata Ruang), Aplikasi Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARANG) dan Aplikasi Keterangan Rencana Kota Online (KRK ONLINE). Inovasi SITARANG ini pada tahun 2023 diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan memperoleh penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.



Gambar 3.21
Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023

Disamping itu, pada tahun 2023 Pemerintah Kota Payakumbuh juga memperoleh penghargaan dari Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana pada tahun 2023 penilaian diperluas tidak hanya pada pemenuhan Standar Pelayanan Publik namun juga pada pengukuran kompetensi penyelenggara, pemenuhan sarana dan prasarana, standar pelayanan serta pengelolaan pengaduan. Penilaian Tahun 2023 lebih

komprehensif dalam menakar mutu pelayanan publik mulai dari input, proses hingga output dan dampak pelayanan publik. Berdasarkan penilaian tersebut, Kota Payakumbuh memperoleh nilai kepatuhan 91,41 pada zona hijau, kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi. Hasil penilaian ini menempatkan Kota Payakumbuh pada urutan pertama tingkat kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI Tahun 2023 untuk seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada pada Tabel 3.68

Tabel 3.68
Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman RI
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Kategori	Zona/ Opini
1	Kab. Solok	95,08	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
2	Kab. Dharmasraya	93,77	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
3	Kab. Agam	92,58	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
4	Kab. Tanah datar	92,44	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
5	Kota Payakumbuh	91,41	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
6	Kota Padang Panjang	90,72	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
7	Kota Pariaman	90,64	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
8	Kab. Pasaman	90,42	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi
9	Kab. Lima Puluh Kota	85,59	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
10	Kab. Solok Selatan	84,95	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
11	Kota Solok	84,88	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
12	Kota Bukittinggi	84,79	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
13	Kab. Pasaman Barat	84,51	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
14	Kota Sawahlunto	82,76	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
15	Kota Padang	82,64	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
16	Kab. Padang Pariaman	81,23	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi

No	Kabupaten/ Kota	Nilai	Kategori	Zona/ Opini
17	Kab. Pesisir selatan	79,33	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
18	Kab. Sijunjung	78,78	B	Zona Hijau Kualitas Tinggi
19	Kab. Kepulauan Mentawai	67,03	C	Zona Kuning Kualitas Sedang
	Provinsi Sumatera Barat	91,71	A	Zona Hijau Kualitas Tertinggi

Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2023

Faktor-faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja indikator di atas antara lain :

1. Komitmen pemerintah Kota Payakumbuh untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan pelayanan prima;
2. Tersedianya Mal Pelayanan Publik yang representatif sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Payakumbuh;
3. Kesadaran unit kerja pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik.;
4. Kerjasama semua stakeholder terkait baik dari segi kebijakan maupun dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik;

Program yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pelayanan Penanaman Modal;
3. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
5. Program Penanggulangan Bencana;
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan & Pelayanan Publik;
7. Program Pendaftaran Penduduk;
8. Program Pencatatan Sipil;
9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
11. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
12. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
13. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tujuan 4 : Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan didukung oleh 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- b. Meningkatnya infrastruktur perkotaan
- c. Meningkatnya kualitas penataan kota

Tujuan Pembangunan ini diarahkan pada pembangunan dan penataan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan penataan dan pemanfaatan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya serta konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Sistem pemerintahan yang mengembangkan penataan kota melalui pembangunan yang berwawasan lingkungan dimaksudkan agar tercipta lingkungan yang nyaman untuk masyarakat karena dalam penciptaan inklusivitas perekonomian daerah tak lepas juga dari konektivitas adanya infrastruktur yang tersedia baik infrastruktur ekonomi maupun sosial dikarenakan infrastruktur ini sebagai jembatan dalam aksesibilitas pergerakan alur distribusi dari perekonomian yang ada

Disamping itu juga untuk meningkatkan konektivitas pengembangan wilayah/kawasan guna percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, sehingga sektor unggulan di Kota Payakumbuh dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan dasar masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara dan pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan memelihara cadangan air melalui penataan lingkungan hidup, penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, dan mengembangkan kapasitas lingkungan hidup dan peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup

Apapun bentuk pembangunan yang akan dilaksanakan haruslah memperhatikan dampak terhadap lingkungan, seoptimal mungkin diupayakan pembangunan tidak menimbulkan kerusakan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup dan sebaliknya dengan pembangunan justru kualitas lingkungan hidup dan lingkungan sosial Kota Payakumbuh akan semakin baik dan meningkat kualitasnya. Oleh karena itu segala upaya yang dilakukan dalam penataan kota, penyediaan infrastruktur dan fasilitas umum adalah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup bukan sebaliknya. Untuk mengukur sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan sejauh mana pembangunan yang dilakukan mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup digunakan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator kinerja pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup, IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environment Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, (2) Kualitas Udara dan (3) Kualitas Tutupan Lahan. Kriteria dan parameter untuk masing-masing indikator perhitungan IKLH sebagai berikut ini.

Tabel 3.69
Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH

No	Komponen Indeks	Parameter	Rumus
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)</p>
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ ; SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$ <p>PU = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂ PU = Indeks Pencemar Udara</p>

3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Hutan (TH); Tutupan Vegetasi Non-Hutan (TnH)	$IKL = 100 - \left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ <p>Rumus di Tutupan Hutan;</p> <p>W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{IKL_FLG_Kanal}$</p> <p>W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{IKL_FBG_Kanal}$</p> <p>W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Belukar}{IKL_FLG_Belukar}$</p> <p>W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Belukar}{IKL_FBG_Belukar}$</p>
----	-----------------------------	--	--

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Perhitungan Capaian Indikator

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dengan menggunakan rumusan di bawah ini :

$$IKLH \text{ Kota} = (0.376)IKA + (0.405)IKU + (0.219)IKL$$

Cara Perolehan Data :

1. **Data IKA** diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua.
2. **Data IKU** diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler.
3. **Data IKTL** diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

I. Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Perhitungan Indeks Kualitas Air Tahun 2023 Kota Payakumbuh dengan Perhitungan Indeks Kualitas vegetasi air dilakukan dengan mengambil 38 sampel uji kualitas air pada 7 (tujuh) sungai yang melintas di Kota Payakumbuh yaitu Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Talang, Sungai Baih dan Sungai Tembok Jua. Dengan hasil uji sebagaimana tabel 3.70 dan tabel 3.71.

Tabel 3.70
Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Jumlah Pemantauan yang memenuhi mutu air	Persentase Pemenuhan Mutu Air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air
Memenuhi	0	0%	70	0
Ringan	35	100%	50	44,21
Sedang	0	0%	30	0
Berat	0	0%	10	0
Total	35	100%		
Indek Kualitas Air				44,21

Sumber : Hasil Analisis 2023

Berdasarkan hasil uji Kualitas Air yang telah dilakukan di Kota Payakumbuh dengan titik sampling sebanyak 35 dimana didapatkan hasil Kualitas air di Kota Payakumbuh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni yakni 44,21 di kategorikan Indek Kualitas Air = **Kurang**, hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak juga daerah hulu karena Kota Payakumbuh merupakan daerah perlintasan sungai.

Tabel 3.71
Indeks Kualitas Air Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKA	Keterangan
1	Kota Pariaman	44.21	
2	Kota Bukittinggi	23.85	
3	Kota Payakumbuh	44.21	kurang
4	Kabupaten Solok Selatan	59.60	
5	Kabupaten Dharmas Raya	54.00	
6	Kabupaten Solok	59.41	
7	Kabupaten Sijunjung	55.15	
8	Kabupaten Lima Puluh Kota	56.92	
9	Kabupaten Pasaman	57.14	
10	Kabupaten Pesisir Selatan	65.28	
11	Kabupaten Padang Pariaman	60.59	
12	Kabupaten Tanah Datar	60.87	
13	Kota Sawah Lunto	48.89	
14	Kota Solok	46.47	
15	Kabupaten Pasaman Barat	60.00	
16	Kota Padang	69.77	

17	Kabupaten Agam	65.00	
18	Kota Padang Panjang	47.21	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Perhitungan Indeks Kualitas Udara diambil dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler. Nilai IKU Kota Payakumbuh ini merupakan kontribusi dari data kualitas udara ambien yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel 3.72 berikut;

Tabel 3.72
Indeks Kualitas Udara Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKU	KETERANGAN
1	Kota Pariaman	93.70	
2	Kabupaten Pesisir Selatan	93.20	
3	Kabupaten Solok	89.96	
4	Kabupaten Solok Selatan	91.42	
5	Kabupaten Sijunjung	94.78	
6	Kabupaten Tanah Datar	89.74	
7	Kabupaten Padang Pariaman	93.58	
8	Kabupaten Agam	91.40	
9	Kabupaten Lima Puluh Kota	90.24	
10	Kabupaten Pasaman	93.38	
11	Kabupaten Kepulauan Mentawai	95.43	
12	Kabupaten Dharmas Raya	83.28	
13	Kabupaten Pasaman Barat	94.25	
14	Kota Solok	91.24	
15	Kota Sawah Lunto	89.80	
16	Kota Padang Panjang	91.60	
17	Kota Bukittinggi	88.12	
18	Kota Payakumbuh	90.92	
19	Kota Padang	74.11	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh pada tahun 2023 berada di angka 90,92 merupakan angka yang berada di urutan ke empat dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kota dan di peringkat ke

12 (dua belas) di Provinsi Sumatera Barat. Walaupun Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya tapi masih dalam kategori dapat dikendalikan.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan diperoleh dari analisis foto citra satelit terhadap tutupan vegetasi. Data ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang setiap tahun melakukan penghitungan IKTL Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum pada tabel 3.73:

Tabel 3.73
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten dan Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	IKL	KETERANGAN
1	Kabupaten Agam	50.93	
2	Kabupaten Dharmas Raya	43.14	
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	94.55	
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	62.47	
5	Kabupaten Padang Pariaman	41.99	
6	Kabupaten Pasaman	76.18	
7	Kabupaten Pasaman Barat	42.20	
8	Kabupaten Pesisir Selatan	70.07	
9	Kabupaten Sijunjung	65.61	
10	Kabupaten Solok	77.34	
11	Kabupaten Solok Selatan	71.99	
12	Kabupaten Tanah Datar	58.26	
13	Kota Bukittinggi	36.63	
14	Kota Padang	73.20	
15	Kota Padang Panjang	62.04	
16	Kota Pariaman	31.71	
17	Kota Payakumbuh	27.63	
18	Kota Sawah Lunto	38.12	
19	Kota Solok	39.18	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota pada tahun 2023 diangka 27,63 meningkat sebesar 1,87 dari tahun sebelumnya ini merupakan bukti bahwa Kota Payakumbuh komit dalam pelaksanaan

gerakan penanaman pohon serta peningkatan Ruang Terbuka (RTH) setiap tahunnya untuk mengimbangi perkembangan permukiman.

Analisis Capaian Indikator

Dengan telah diperolehnya angka untuk Indeks Kualitas Air (IKA) adalah **44,21** Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah **90,92** dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah **27,63** maka perhitungan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,376) \text{IKA} + (0,405) \text{IKU} + (0,219) \text{IKTL} \\ \text{IKLH} &= (0,376 \times 44,21) + (0,405 \times 90,92) + (0,219 \times 27,92) \\ \text{IKLH} &= 16,62 + 36,82 + 6,11 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tabel diatas, maka **nilai IKLH** adalah **59,50**

Tabel 3.74
Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Capaian 2022	2023				Target Akhir RPD	Capaian tahun 2023 terhadap Akhir RPD (%)
		Target	Realisasi	Capaian %	Kategori		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,09	58,00	59,50	102,58	Sangat Tinggi	58.28	102,09

Sumber : Hasil Analisis, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian Index Kualitas Lingkungan hidup pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 64,09, bila dibandingkan dengan target tahun 2023 dengan target pada RPD sebesar 58,00 capaiannya IKLH pada tahun 2023 adalah 102,58% dan capaian bila dibandingkan dengan target Akhir masa RPD capaiannya sebesar 102,09% dengan kategori **sangat tinggi**,

Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Pengklasifikasian peringkat IKLH disusun secara Nasional berdasarkan Nilai IKA, IKU dan IKTL . Predikat IKLH dikategorikan dalam beberapa klas

sebagai mana dapat dilihat pada Tabel 3.75 berikut :

Tabel 3.75
Predikat Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 < IKLH ≤ 60
5	Sangat Tidak Baik	40 < IKLH ≤ 50
6	Waspada	30 < IKLH ≤ 40

Sumber : IKLH Nasional, 2018

Dengan melihat perbandingan angka IKLH Payakumbuh Tahun 2023 dengan Predikat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditetapkan, maka Nilai IKLH sebesar **59,50** berada pada Predikat **KURANG BAIK**.

II. Capaian Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan

Dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap
2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan

Kenyamanan suatu kota membutuhkan kelengkapan infrastruktur yang memadai sebagai pendukung aktifitas masyarakatnya termasuk konektivitas antar wilayah. Konektivitas yang baik adalah terciptanya integrasi antara jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota sampai ke jalan lingkung sehingga mampu meningkatkan pembangunan cakupan wilayah administratif perkotaan yang mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat secara merata di seluruh pelosok Kota Payakumbuh. Rencana dan pembangunan jalan tidak terlepas dari usulan kebutuhan masyarakat yang disampaikan salah satunya melalui musyawarah pembangunan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan jalan kota mempedomani aturan pelaksanaannya, antara lain :

- Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis jalan.

Infrastruktur Perkotaan juga dilihat dari ketersediaan Fasilitas umum yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses sarana dan prasarana kota yang dibangun oleh Pemerintah. sarana dan prasarana yang terbangun di Kota Payakumbuh antara lain : jalan, drainase kota dan lingkungan, trotoar jalan, penataan kawasan Batang Agam, beserta pengadaan tanah secara bertahap, termasuk persiapan dan perencanaan teknisnya.

Kemudian untuk meningkatkan giat olahraga masyarakat telah dibangun GOR Nan Ompek di kawasan Batang Agam dan Payakumbuh Bugar di Kawasan Padang Kaduduak. Fasilitas olahraga yang dibangun sudah mendukung beberapa cabang olah raga, seperti : sepakbola, tenis, badminton, basket, sepatu roda, tenis meja, dan atletik. Dengan sudah dilengkapinya sarana olahraga diharapkan mampu meningkatkan prestasi atlet Kota Payakumbuh.

Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pada pusat perbelanjaan Kota Payakumbuh dilaksanakan penataan pusat perdagangan, antara lain ; Kawasan Pasar Pusat dan kawasan Pasar Ibh serta Kawasan Pasar Pusat di Padang Kaduduak, sehingga dengan meningkatnya kenyamanan pusat perdagangan diharapkan mendongkrak perekonomian masyarakat. Kebutuhan akan tersedianya sarana ibadah berupa masjid Agung Kota Payakumbuh, telah dilaksanakan pembebasan lahan dan secara bertahap dilengkapi dengan dokumen persiapan dan perencanaannya.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya infrastruktur perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.76
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	84,08	84,88	85,19	100,37	Sangat tinggi	87,52	97,13
2	Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan	71,98	73,09	71,98	98,48	Sangat tinggi	77,78	92,54

Sumber : Hasil Analisis 2023

III. Capaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penataan Kota

Dengan Indikator Sasaran : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kota sebagai pusat dari perekonomian wilayah sudah seharusnya untuk ditata dan dilakukan pembenahan. Karena semakin baik penataan dari sebuah kota maka, berbagai sistem yang terdapat di dalamnya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Manfaat dari adanya tata kota akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan social. Ketika sarana dan prasarana yang sudah dibangun dapat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan warganya. Maka, tata kota yang telah direncanakan, dikelola dan diatur dapat dikatakan berhasil. Bukan hanya masyarakat yang menjadi sejahtera akan tetapi, wajah tampilan kota akan lebih terlihat rapi dan memberikan suasana nyaman.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pencapaian kinerja indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mempedomani aturan :

1. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Perda No. 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038
4. Perda No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda No.1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030.

Tata kota memiliki beberapa tujuan agar dapat membuat berbagai pembangunan sarana dan prasarana dapat berjalan dengan maksimal.

Tujuan dari tata kota bisa disimak berikut ini diantaranya:

1. Menjadikan ruang wilayah nasional aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia.
3. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana.
4. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan

kabupaten atau kota.

5. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada secara seimbang dan tepat. Demi mendukung peningkatan dari kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tujuan ini maka, perencanaan tata kota akan lebih jelas dan terarah. Sehingga perkembangan dan kemajuan dari sebuah kota yang diharapkan dan ditargetkan dapat tercapai. Bukanlah sebuah hal yang mudah namun, proses penataan harus bisa terus untuk dilakukan

Tabel 3.77
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan Kota

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir RPD	Capaian Th 2023 thdp RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)			
1	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	80,15	80,23	80,24	100,01	Sangat tinggi	80,62	99,63

Sumber : Hasil Analisis 2023

Pencapaian target kinerja Tujuan **Meningkatnya keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan** dengan indikator Tujuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri dari 3 sasaran tahun 2023 didukung oleh :

a. Dukungan Dinas Lingkungan Hidup melalui 7 (tujuh) Program

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Pengelolaan Persampahan

b. Dukungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui 4 (empat) Program

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

c. Dukungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui 9 (sembilan) Program

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Permukiman
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. Program Penyelenggaraan Jalan
9. Program Penatagunaan Tanah

d. Dukungan Dinas Perhubungan melalui 1 (satu) Program

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Permasalahan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh tahun 2023 jika dibandingkan pada target yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 telah melebihi, namun cenderung menurun dari tahun sebelumnya dan jika dilihat dari IKLH Propinsi Sumatera Barat masih jauh. Beberapa permasalahan yang mungkin jadi penyebab IKLH mengalami penurunan adalah :

1. Dari tiga indikator yang menjadi agregat pembentuk IKLH, Indikator Kualitas Udara, Indikator Kualitas Tutupan Lahan dan Indikator Kualitas Air pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Untuk sampel yang diambil sama dengan taun 2023 yakni 7 sungai sampel yang diambil sebanyak 35 titik dimana 10 titik memenuhi, 24 titik tercemar ringan dan 1 tercemar sedang, secara indek mengalami

kenaikan namun masih ada status tercemar ringan dan sedang. Dari pengamatan dilapangan masih ditemukan di beberapa titik yang berdekatan dengan sempadan sungai terdapat beberapa industri-indutri kecil pengolahan makanan dan perbengkelan yang masih belum melakukan pengolahan terhadap limbahnya.

2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat pelaku indutri kecil menengah maupun indutri rumah tangga dan pelaku usaha perbengkelan dan cucian mobil dan motor tentang pentingnya penanganan limbah yang mereka hasilkan dari aktifitas usaha mereka.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pengetahuan pengolahan sampah rumah tangga sehingga belum mampu mengurangi timbulan sampah serta pemilahan sampah dari sumber rumah tangga secara simultan.
4. Masih banyaknya terdapat septictank yang belum kedap, sehingga masih berpotensi mencemaran air tanah dan air sungai.
5. Masih rendahnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di daerah hulu diluar wilayah Kota Payakumbuh sehingga memepengaruhi mutu air di Payakumbuh karena Kota Payakumbuh merupakan daerah perlintasan sungai.

Strategi Pemecahan Masalah/Rencana Aksi

Terkait dengan capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di tahun 2023 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, diperlukan beberapa rekomendasi perbaikan yang bisa dijadikan sebagai pedoman kinerja ditahun mendatang, antara lain :

1. Peningkatan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran.
2. Meningkatkan peran Masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan pencemaran air serta pelaksanaan pengelolaan air limbah.
3. Penyiapan fasilitas pengukuran kualitas air dan kualitas udara yang terstandarisasi dan terakreditasi sehingga dapat menghasilkan data ukuran yang absah. Hal ini menjadi dasar berpijak dalam pengembangan lualitas air dan udara di beberapa titik di wilayah kota Payakumbuh.
4. Penguatan sumber daya manusia yang mengelola kegiatan pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pendidikan serta latihan.
6. Perlunya peningkatan pemahaman pelaku industri pengolahan makanan skala IKM dan pelaku usaha perbengkelan dan cuci motor tentang penanganan limbah yang mereka hasilkan agar tidak sampai mencemari air permukaan.
7. Peningkatan pemahaman masyarakat untuk tetap menjaga kualitas udara dan kualitas air, menyiapkan resapan-resapan yang baik, membudayakan penanaman kembali pepohonan di lahan-lahan masyarakat untuk mendapatkan tutupan lahan yang semakin baik.
8. Menyiapkan program-program konservasi di Dinas Terkait secara berkesinambungan.
9. Peningkatan pembangunan Septictank aman dan kedap sesuai standar teknis yang telah ditetapkan.
10. Koordinasi dan Kerjasama dengan Pusat serta daerah hulu Sungai untuk pengelolaan Sungai dan berkaitan dengan pencemaran Sungai.

Gambar 3.22
Beberapa Kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama tahun 2023



Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan Gerakan penanaman pohon seribu pohon Bersama Kapolres dan Forkopimda



Kelurahan	Napar
no. Stiker	2022313760300050264
Date	2022-08-04
Koordinat	0,2119, 100,6244
No. Absen	5

Pemerintah Kota Payakumbuh Melalui Dina Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pembangunan Tank Septic Aman



Pengelolaan Lumpur Tinja di IPLT Kota Payakumbuh yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Pembangunan TPS3R Bantuan BPPW Sumatera Barat Kementerian PUPR



Penyediaan bibit pohon



Momentum Momentum hari Ulang tahun kota dan Bulan menanam pohon serta Pelaksanaan Kegiatan Starategi Sanitasi Kota Payakumbuh



Momentum hari Peduli Sampah Nasional , melakukan pembersihan sepantaran Sungai Batang Agam Bersama Pj. Walikota



Kegiatan Pengawasan terhadap Usaha



Sosialisasi Pengelolaan Persampahan



Pengangkutan dan pengelolaan sampah



Kegiatan Pengambilan sampel uji kualitas air



Kegiatan Pengujian Kualitas Udara



Bangunan Alat pemantau kualitas air di Sungai Batang Agam



Alat Onlino pemantau kualitas air



Gotong royong pengumpulan sampah disepanjang Sungai Batang Agam



Gotong Royong Komunitas Peduli Sungai (KOMPAS) Kota Payakumbuh



Kegiatan Drainase dilengkapi trotoar yang nyaman



Jalan Protokol Sudirman



GOR Nan Ompek di Kawasan Sungai Batang Agam



Sarana Olahraga Payakumbuh Bugar



Pasar Pusat Kota Payakumbuh



Pasar Tradisional Ibh



Kegiatan Rencana Mesjid Agung



Kegiatan RTH Kawasan Batang Agam



Penataan kawasan Batang Agam



Pusat Kota tertata rapi terlihat malam hari

Tujuan V : Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

Pembangunan masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan, pembangunan akhlak mulia dan berbudaya memiliki posisi dan peran yang strategis sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan. Akhlak mulia yang berasal dari pengamalan ajaran agama mendorong manusia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, mendidik manusia agar berbuat baik dan mencegahnya berbuat buruk. Pengamalan ajaran agama seseorang mampu memahami keberadaan Tuhan dan mengabdikan kepada-Nya serta bersikap empati kepada sesama yang salah satunya dapat diwujudkan melalui kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat baik melalui lembaga zakat maupun secara swadaya.

Sasaran Strategis dari tujuan V ini adalah meningkatnya ketahanan sosial budaya yang berlandaskan ABS SBK, dengan 2 indikator kinerja utama.

Sasaran 12 : Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

Sasaran ini merupakan upaya untuk mencapai tujuan kelima dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 yaitu Meningkatnya tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya. Sasaran ini didukung oleh indikator Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya dan indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik.

Pencapaian kinerja sasaran dapat dilihat dari realisasi indikator kinerja berikut ini :

Tabel 3.78
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya ketahanan social budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir	Capaian tahun 2023 terhadap RPD (%)
			Target	Realisasi	Nilai Capaian %			
1	Persentase lembaga Adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100	100	100	100%	Sangat Tinggi	100	100
2	Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik	29,81	51,06	56,44	110,54	Sangat Tinggi	53	106,49

Sumber : Dinas Parpora dan Dinas Pendidikan Tahun 2023

Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya (100)

a. Perhitungan Capaian Indikator

Capaian Indikator Persentase lembaga Adat yang aktif dihitung dengan menggunakan rumusan dibawah ini :

$$= \frac{\Sigma \text{ lembaga adat yg aktif menjalankan fungsinya (KAN)}}{\Sigma \text{ KAN keseluruhan}} \times 100\%$$

b. Cara Perolehan Capaian Indikator

Perolehan capaian indikator Persentase lembaga adat yang aktif didapat dari laporan yang disampaikan KAN se Kota Payakumbuh kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kota Payakumbuh kondisi Desember 2023. Lembaga adat yang aktif menjalankan fungsinya dapat diukur dengan menggunakan 3 kriteria yakni : a. Melaksanakan Rapat Internal KAN, b. Menyelenggarakan kegiatan Pelestarian adat & budaya dan c. Menyelesaikan sengketa adat.

Dari data yang disampaikan oleh KAN se kota Payakumbuh kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 3.79
Kriteria lembaga adat yang aktif

No	Nama KAN	Kriteria			
		20 Melaksanakan Rapat Internal	40 Penyelesaian Sengketa Adat		40 Menyelenggarakan kegiatan Pelestarian adat & budaya
			Kasus	Selesai	
1.	Koto Nan Ampek	Ada	2	2 selesai	1 kegiatan
2.	Limbukan	Ada	2	1 selesai	1 kegiatan
3.	Aua Kuniang	Ada	1	1 selesai	1 kegiatan
4.	Koto Nan Gadang	Ada	1	1 selesai	1 kegiatan
5.	Aia Tabik	Ada	2	1 selesai	1 kegiatan
6.	Tiakar	Ada	3	1 selesai	1 kegiatan
7.	Payobasuang	Ada	8	8 selesai	1 kegiatan
8.	Sungai Durian Lamposi	Ada	1	1 selesai	1 kegiatan
9.	Koto Panjang Lamposi	Ada	1	1 selesai	1 kegiatan
10	Parambahan Lamposi	Ada	1	1 selesai	1 kegiatan

Sumber data : Dinas Parpora Kota Payakumbuh Tahun 2023

c. Analisis Capaian Indikator

Dari tabel di atas, diperoleh hasil bahwa semua KAN yang ada di Kota Payakumbuh memenuhi kriteria aktif, sehingga hasil perhitungan realisasi indikator kinerja Persentase Lembaga Adat yang aktif pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\Sigma = \frac{10}{10} \times 100$$

$$\Sigma = 100$$

d. Evaluasi Capaian Indikator

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Kota Payakumbuh aktif dalam menjalankan fungsinya melestarikan adat dalam tata kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuan KAN dalam menangani sengketa dan konflik adat serta melaksanakan program kerja dan kegiatan pelestarian adat.

Dari data dan analisa capaian kinerja indikator yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka diperoleh hasil capaian kinerja Indikator Persentase lembaga adat yang aktif (KAN) dapat dicapai 100% dari 100% yang ditargetkan dengan capaian kinerja 100 % dengan kategori **sangat tinggi**.

Faktor Pendorong Keberhasilan Pencapaian Indikator

1. Meningkatnya kesadaran lembaga adat lokal tentang pentingnya peran KAN ditengah masyarakat adat di Kota Payakumbuh.
2. Makin meningkatnya perhatian pemerintah Kota Payakumbuh terhadap penguatan kelembagaan adat.

Program Pendukung Pencapaian Indikator Sasaran :

1. Pengelolaan kekayaan budaya daerah
2. Pengelolaan keragaman budaya
3. Pengembangan nilai budaya

Rencana Aksi

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan Nagari-Nagari yang ada di Kota Payakumbuh.

Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik (51,06)

Pelaksanaan Pendidikan karakter ini telah dilaksanakan disekolah-sekolah yang ada di Kota Payakumbuh dengan capaian indikator sebesar 84,62 % dari target sebesar 51, 06 % pada Perjanjian Kinerja Kota Tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110,54 % dengan kategori **Sangat Tinggi**. Hal ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena melebihi dari target yang telah dijanjikan.

Analisis dan Capaian Kinerja Indikator :

- a. Perhitungan Capaian Indikator

Capaian Indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik dihitung dengan menggunakan rumusan dibawah ini

:

$$= \frac{\Sigma \text{sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik}}{\Sigma \text{sekolah keseluruhan}} \times 100\%$$

b. Cara Perolehan Capaian Indikator

Perolehan capaian indikator didapat dari laporan bulanan yang masuk melalui bidang Pendidikan Dasar kondisi Desember 2023. Data sekolah dengan Pendidikan karakter di Kota Payakumbuh terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.80
Capaian Kinerja Indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik

No	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Melaksanakan Pendidikan Karakter berkategori Baik
1	SD	84	70
2	SMP	20	18
	Jumlah	104	88

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2023

c. Analisis Capaian Indikator

Dari Tabel diatas, terlihat bahwa jumlah sekolah di Kota Payakumbuh kondisi akhir Tahun 2023 adalah sebanyak 104 Sekolah dan jumlah sekolah yang sudah melaksanakan pendidikan karakter berakategori baik adalah sebanyak 88 sekolah sehingga Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik adalah sebagai berikut :

$$= \frac{88}{104} \times 100\% = (84.62)\%$$

d. Evaluasi Capaian Indikator

Evaluasi capaian indicator diperoleh dengan membandingkan antara capaian dan target indicator dan factor penyebab berhasil atau tidaknya capaian target yang dimaksud. Analisis evaluasi capaian indicator berdasarkan target RPD terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.81
Target dan capaian kinerja indicator persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik

No	Indikator	Capaian tahun 2022	2023			Kategori	Target Akhir	Capaian tahun 2023 terhadap RPD (%)
			Target	Realisasi	%			
2	Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	29,81	51,06	56,44	110,54	Sangat Tinggi	53	106,49

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2023

Dari Tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator Persentase sekolah dengan Pendidikan karakter berkategori baik sudah melebihi target yang telah ditetapkan dengan hasil **sangat tinggi**.

Faktor Peningkatan Pencapaian Indikator

1. Tersedianya jumlah sarana dan prasarana Pendidikan yang cukup memadai di SD/MI dan SMP/MTs
2. Adanya peran orang tua siswa dalam peningkatan Pendidikan karakter pada anak

Hambatan / masalah yang menghambat

1. Pemerataan dan kualitas guru pada tingkat SD/MI dan SMP/ MTs berdasarkan wilayah belum maksimal.
2. Paradigma masyarakat tentang “sekolah favorit” pada setiap jenjang Pendidikan, tidak bisa dihilangkan sehingga terjadi penumpukan jumlah siswa pada sekolah tertentu.
3. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran
4. Kurangnya perhatian orang tua terhadap Pendidikan anak

Rencana Aksi

1. Pemerataan jumlah guru di setiap tingkat Pendidikan harus secara profesional berdasarkan kebutuhan dan jumlah rombel/ mata pelajaran.
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Guru melalui Pendidikan dan latihan.
3. Membuat system penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang lebih profesional.
4. Adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
5. Memberi pencerahan kepada orang tua pentingnya Pendidikan untuk perbaikan masa depan anak.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.85
Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Yang Menunjang Pencapaian
Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	76.444.886.960,00	68.239.066.675,00	89,27
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	45.672.847.299,00	40.005.975.004,00	87,59
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	1.186.370.430,00	890.057.003,00	75,02
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	8.120.634.422,00	7.341.481.190,00	90,41
5	Meningkatnya sektor strategis	20.712.997.900,00	19.917.940.024,00	96,16
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	691.161.620,00	639.154.860,00	92,48
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	562.027.483.801,00	507.371.513.504,00	90,28
8	Meningkatnya Pelayanan pulik yang prima	23.624.933.798,00	21.859.486.575,00	92,53
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	49.926.591.111,00	48.516.670.011,00	97,18
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	16.516.844.247,00	15.352.441.827,00	92,95
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	1.246.319.318,00	1.223.653.190,00	98,18
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	2.158.837.960,00	1.956.950.856,00	90,65
JUMLAH		808.329.908.866,00	733.314.390.719,00	90.72

Sumber Data : BKD Kota Payakumbuh Tahun 2023

Dari tabel 3.85 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Jumlah Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar Rp. 808.329.908.866,- untuk menunjang 12 (dua belas) sasaran strategis daerah.
2. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 untuk menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis yang

ditetapkan dalam Revisi Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 sebesar Rp. 808.329.908.866,- dan terealisasi sebesar Rp. 733.314.390.719,- atau sebesar 90,72%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 75.015.518.147,- atau 9.28%. Secara umum, efektifitas anggaran terhadap pencapaian Misi Pemerintah Kota Payakumbuh dapat disimpulkan bahwa, anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja organisasi.

3.3 CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2023



Kegiatan Penganugerahan SAKIP dan Reformasi Birokrasi (RB) Award, Pemerintah Kota Payakumbuh meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai Instansi **Pemerintah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik Pada Semua Tema Tahun 2023**. Kota Payakumbuh menjadi satu-satunya pemerintah daerah di Sumatera yang berhasil mendapatkan penghargaan di kategori tersebut dan untuk perolehan nilai **SAKIP dengan Prediket BB** sedangkan nilai indek **RB juga mendapat prediket BB** tahun 2023 merupakan nilai RB tertinggi di

Prov. Sumbar. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kepada Pj. Wako Payakumbuh Drs. Jasman, MM diwakili Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M.Si di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (06/12/2023).

2. Penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Pj.Walikota Payakumbuh Drs. Rida Ananda, M.Si, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Drs. Syafwal, MM dan Kepala Inspektorat Andri Narwan, S.Sos, MM, CGCAE menerima penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan (LKPD) Tahun 2022 yang diserahkan pada 14 April 2023 oleh Gubernur Sumbar Didampingi Kepala BPK Perwakilan Prov.Sumbar di Padang, penghargaan WTP tersebut diterima Pemko Payakumbuh yang ke 9 kali secara berturut-turut.

3. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya pada Tahun 2023 dan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Nindiya



Pemko Payakumbuh dibawah kepemimpinan Pj. Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM, terus diganjar berbagai prestasi bergengsi di kancah nasional dengan penghargaan Anugerah Parahita Ekpraya (APE) 2023 kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Bintang Puspayoga kepada Pj. Wako Drs. Jasman, MM di Gedung Metro TV Lantai 3, Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/12/2023).

4. Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2023



Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil mendapatkan Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Senin (08/01/2024). Penghargaan bergengsi dibidang pelayanan publik tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah yang didampingi Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Yefri Heriani kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM. Pemko Payakumbuh mendapat kategori nilai A dengan kualitas tertinggi dan total nilai 91,41.

5. Penghargaan Kota Peduli HAM.

Penghargaan Kota Peduli HAM yang ke-6 secara berturut-turut, dari Kementerian Hukum dan HAM Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh menerima piagam penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

(Kemenkumham RI) yang diserahkan pada peringatan Hari HAM sedunia tahun 2023 di Kanwil Kemenkumham Sumbar, Senin (18/12/2023).



6. Penghargaan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Sangat Baik dengan Nilai -A untuk Dinas Sosial, Kec. Payakumbuh Timur dan RSUD Dr. Adnaan WD Kota Payakumbuh (dari Kemenpan-RB)

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Payakumbuh Tahun 2023 yaitu sebesar 4,41 dengan predikat A, kategori Sangat Baik dengan rincian Kecamatan Payakumbuh Timur memperoleh nilai 4,44 (Predikat A)-, Dinas Sosial dengan nilai 4,36 (Predikat A-) dan RSUD dr. Adnaan WD dengan nilai 4,42 (Predikat A-). Kota Payakumbuh berada pada urutan ke-28 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Indonesia dan menempati posisi pertama untuk di wilayah Sumatera.

7. Piala Nirwasita Tantra, Penghargaan pengelolaan Lingkungan Hidup terbaik Nasional Green Leadership



Pemerintah Kota Payakumbuh sukses meraih penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra Tahun 2022 kategori Pemerintah Daerah Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda

mengungkapkan rasa syukur atas penghargaan dari KLHK dan merupakan penghargaan kelima kalinya bagi Kota Randang.

8. Penghargaan Universal Health Coverage (UHC)



Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak Bulan September 2022, sebanyak 137.599 jiwa penduduk Kota Payakumbuh telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 141.813 jiwa atau sebesar 97.03%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Payakumbuh telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Atas prestasi itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin memberikan penghargaan kepada 22 Provinsi, 334 Kabupaten dan Kota yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

9. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sumbar



Peringkat pertama kategori kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan menjadi satu-satunya kota dari Sumatera Barat yang berhasil masuk ke 14 besar dalam penilaian PPD 2023 Nasional tahap I, bahkan sudah sukses pula dinilai untuk tahap II, sehingga kini sudah masuk 10 besar untuk penilaian tahap III. Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kepada Penjabat Wali Kota Rida Ananda saat Musrenbang RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang digelar di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang, Selasa (21/3).

10. Penghargaan Inovasi Tepat Guna (14 Juni 2023)



Kota Payakumbuh memborong 2 penghargaan inovasi teknologi Tepat Guna, Melalui acara Sumbar Innovation Awards Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Pangeran beach Kota Padang. Bersamaan dengan Acara PENAS XVI 2023 Dengan tema “Inovasi dan Teknologi Pertanian berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian pangan menuju indonesia lumbung pangan dunia 2045”. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan ajang penjangkaran inovator-inovator yang tersebar diseluruh pelosok kabupaten dan Kota yang berada wilayah provinsi sumatera barat.

Acara dihadiri dan dibuka langsung oleh Bpk. Gubernur Sumatera barat serta memberikan selamat bagi pemenang lomba inovasi dan terus peka terhadap kemajuan zaman dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

11. Penghargaan Dari KPK RI (12 Oktober 2023)



Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pemerintah Daerah dengan jumlah Penerbitan Prasarana, Sarana dan Utilitas

(PSU) Terbanyak Tahun 2022 di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal itu diketahui saat acara Pembukaan Roadshow Bus KPK tahun 2023 di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (12/10/2023).

12. Penghargaan Swasti Saba Penghargaan Dari Kemenkes RI



Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil mendapatkan Penghargaan Kota Sehat kategori Swastisaba Wistara dari Kementerian Kesehatan bersama 27 Kabupaten dan Kota lainnya se-Indonesia di Kempinsky Grand Indonesia

Ballroom Jakarta, Selasa (28/11/2023). “Alhamdulillah hari ini (Selasa) Kota Payakumbuh berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Kesehatan,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM, Selasa (28/11/2023) malam. Penghargaan bergengsi di bidang kesehatan tersebut diserahkan pada Malam Anugerah Tanda Penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Award 2023.

13. Penghargaan pengendalian inflasi tahun 2023
14. Penghargaan kesejahteraan masyarakat tahun 2023, dan
15. Penghargaan sebagai pemerintah daerah tercepat dan terinovatif dalam penyelesaian/penandatanganan berita acara rekonsiliasi pajak pusat atas belanja daerah semester I tahun 2023.
16. Penghargaan Terbaik I Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD) Tk. Prov. Atas EPPD tahun 2022



Hasil Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (EPPD) Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil merai skor 3,3922 atau dengan status sedang. Dengan skor tersebut Kota Payakumbuh menjadi yang terbaik di antara kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat dan di peringkat 20 antar pemerintah kota secara nasional. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor : 100.2.1.7.6646 tahun

2023 tentang hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota pada tahun 2022.

17. Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Adiwiyata Nasional



18. Terbaik I Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tk. Prov. Sumatera Barat



Kota Payakumbuh Terbaik I Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tk. Prov. Sumatera Barat yang diserahkan oleh Gubernur Sumbar kepada PJ. Walikota Payakumbuh Drs. Drs. Jasman, MM, MM pada 21 Desember 2023 di Auditorium Gubernur Sumbar

19. Kota Inovatif Tk. Prov. Sumatera Barat



Kota Payakumbuh dianugrahi Kota Inovatif Tk. Prov. Sumatera Barat yang diserahkan oleh Gubernur Sumbar kepada PJ. Walikota Payakumbuh Drs. Drs. Jasman, MM, MM pada 21 Desember 2023 di Auditorium Gubernur Sumbar.

20. Penghargaan sebagai Kota terbaik di Indonesia dalam percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023.



Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan penghargaan sebagai Kota terbaik di Indonesia dalam percepatan penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2023 yang diserahkan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di Istana Wakil

Presiden, Kamis (09/11/2023). Atas keberhasilan yang telah didapatkan ini, selanjutnya Pemko Payakumbuh diganjar lagi dana Insentif Fiskal sebesar Rp6,78 miliar.

21. Penghargaan Meritokrasi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia.



Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil meraih Anugerah Meritokrasi 2023 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia yang diterima langsung Pj Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM di Kraton Grand Ballroom Yogyakarta Marriot Hotel, Yogyakarta, Kamis (07/12/2023).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KASN RI Agus Pramusinto yang didampingi oleh Wakil Ketua KASN RI Tasdik Kinanto. Penghargaan tersebut dalam rangka mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan kategori baik dan sangat baik. Pj Wali Kota Payakumbuh Drs. Jasman, MM mengatakan pada anugerah meritokrasi Tahun 2023 ini Pemerintah Kota Payakumbuh mendapatkan kategori Baik dengan nilai 260.

22. Pj. Kepala Daerah Terinovatif terhadap Pengendalian Inflasi dari Majalah Tempo



Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Rida Ananda mendapatkan penghargaan dari majalah tempo sebagai salah satu Pj kepala daerah inovatif yang diserahkan langsung oleh Mendagri Tito

Karnavian di The Ritz Carlton Hotel Jakarta, Selasa (29/08/2023) malam.

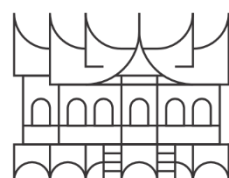
Terdapat beberapa kategori penghargaan yang diberikan majalah Tempo dalam giat malam Apresiasi Tokoh Indonesia tersebut seperti kategori Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pendidikan, percepatan infrastruktur, pariwisata berkarakter, pembangunan digitalisasi, pendorong ekonomi kerakyatan, pendorong daerah 3T, dan Pejabat Kepala Daerah Inovatif, kesuksesan dari Pemko Payakumbuh dalam mengendalikan inflasi yang sebelumnya juga mendapatkan penghargaan insentif fiskal dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri

23. Piagam Penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.



Inovasi SITARANG ini pada tahun 2023 diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB dan memperoleh penghargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2023. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh selama tahun 2023 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dalam RPD 2023-2026 dan telah memenuhi 12 (dua belas) sasaran strategisnya sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran.

Kategori penilaian keberhasilan capaian 19 (Sembilan belas) indikator kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan kategori sangat tinggi (>91.00%) dan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kategori sedang.

Anggaran program yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) indikator kinerja adalah sebesar Rp. 808.329.908.866,- dan terealisasi sebesar Rp. 733.314.390.719,- atau 90,72%. Artinya dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menunjang pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 75.015.518.147,- atau 9.28%. yang mencerminkan cukup baiknya perencanaan dan penganggaran terhadap program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat memperoleh gambaran kinerja yang dicapai dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023. Di masa mendatang, Pemerintah Kota Payakumbuh akan melakukan langkah-langkah perbaikan yang terus menerus (continuous improvement) seperti peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Payakumbuh yang selaras dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan dan sistem penganggaran serta peningkatan kompetensi SDM Aparatur agar terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara transparan dan akuntabel seperti yang diharapkan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh Tahun 2023 ini, secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Payakumbuh, 28 Maret 2024

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH



[Handwritten signature]

Drs. JASMAN, M.M



WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 060.2/177/Wk-Pyk/2023

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023-2026

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 maka perlu ditetapkan kembali Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2023-2026 sesuai dokumen RPD yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Republik Indonesia dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17) ;
11. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : Menetapkan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : IKU sebagaimana dimaksud pada diktum kedua wajib digunakan sebagai dasar untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
 - b. menyusun dokumen Penetapan Kinerja;
 - c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan;
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 10 Maret 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat c/q. Kepala Biro Organisasi di Padang.
2. Sdr. Kepala OPD se Kota Payakumbuh
3. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
: 060.2/177/Wk-Pyk/2023
: 10 Maret 2023
: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN 2023-2026

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	1 Angka harapan lama sekolah	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	HLS t a = Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t adalah Faktor koreksi pesantren (FK) dikali (sygma anak umur a sd tahun n dikali denngan hasil pembagian antara jumlah penduduk umur a pada tahun t dibagi jumlah anak umur a di tahun t) $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ dimana: HLS _a ^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E _i ^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, n) FK = Faktor koreksi pesantren	Dinas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Indonesia pada tahun 2016 sebesar 12,72 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2016 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,72 tahun atau setara dengan Diploma I.
		2 Rata-rata lama sekolah	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	RLS = 1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali jumlah total penduduk dengan lama sekolah penduduk ke I yang berusia 25 tahun. $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ dimana : RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x _i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.	Dinas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3 Angka Harapan Hidup	Tahun	Sebagai dasar untuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur-x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku	BPS/Bappeda/ Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan
		4 Prevalensi stunting	%	Target Nasional penurunan prevalensi stunting setiap tahun harus berkisar 2,7%	Jumlah anak balita stunting di bawah 5 tahun dibagi jumlah anak balita dikali 100 persen $PAB(5)SPstunting = \frac{JAB(5)SPstunting}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan: PAB(5)SPstunting = Prevalensi anak balita yang menderita sangat pendek (stunting) JAB(5)SPstunting = Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada suatu tertentu JAB(5) = Jumlah anak balita sera waktu yang sama	Dinas Kesehatan	stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1.000 hari pertama kehidupannya
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai/ indeks	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Persentase sumbangan perempuan dalam PDRB percapita ditambah persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen dan jumlah perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan	DP3AP2KB	Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan melalui indikator perempuan sebagai tenaga manajerial, professional, administrasi, dan teknis.

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6 Tingkat Kemiskinan	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan dibagi total jumlah penduduk dikali 100 persen $P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	BPS/Bappeda	Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan
		7 Tingkat Pengangguran	Persentase	Mendukung sasaran pokok pembangunan nasional	(Jumlah angkatan kerja yang menganggur : jumlah angkatan kerja keseluruhan) x 100 %	BPS/Naker	Penganggur terbuka, terdiri dari Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.
5	Meningkatnya Sektor Strategis	8 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB 9 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase Persentase	Sektor strategis adalah sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh perlu dilakukan peningkatan produktivitas sektor strategis	$\frac{(\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n \text{ dikurangi Nilai PDRB Sektor Strategis tahun } n-1)}{\text{Nilai PDRB Sektor strategis tahun } n-1} \times 100\%$	BPS, Dinas Koperasi dan UKM BPS, Dinas TK & Perindustrian,	kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10 Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	Milyar	Untuk mencapai target indikator tujuan laju pertumbuhan ekonomi kota Payakumbuh	Nilai realisasi investasi tahun n	BPS, DPM-PTSP	penanaman modal atau dana dengan harapan mendapatkan keuntungan (return) di masa mendatang, tidak hanya bagi pengusaha tetapi juga peningkatan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	11 Nilai Evaluasi AKIP Kota 12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Prediket/ Nilai Indeks/ Nilai	Sesuai amanat Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemendagri mengharapkan IPKD dapat memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, melalui pengukuran 6 dimensi pelaporan	Nilai Evaluasi SAKIP Kota Payakumbuh Hasil Evaluasi/Penilaian Pengelolaan Keuangan Daerah oleh Kemendagri	Setdako BKD	Nilai Evaluasi AKIP Kota Payakumbuh oleh Kemenpan RB RI satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu, mempedomani permendagri no 19 tahun 2020
8	Meningkatnya Pelayanan publik yang prima	13 Indeks SPBE 14 IKM	Nilai/ indeks Kategori	Sesuai Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menuju e-government Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg pelayanan publik	Nilai Evaluasi SPBE Kota Payakumbuh Tahun-n Nilai rata-rata IKM Kota Payakumbuh tahun-n	KemenPANRB/ Kominfo Semua Perangkat Daerah	SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik Kualitas pelayanan publik yang prima

Tujuan IV : Meningkatnya Keberlanjutan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15 Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	Persentase	Untuk peningkatan Konektivitas dan memperkuat daya saing infrastruktur dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan perekonomian dan pusat - pusat pertumbuhan lainnya	(Panjang jalan dalam kondisi baik : Panjang jalan keseluruhan) x 100%	DPUPR	Dalam menghitung panjang jalan dalam kondisi mantap digunakan status jalan baik dan sedang yang dibandingkan panjang jalan keseluruhan
		16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	Persentase	1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010 -2030. 2. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2038	(Jumlah fasilitas umum perkotaan yang tersedia : Jumlah fasilitas umum sesuai Standar Pelayanan Perkotaan) x 100%	DPUPR	Kriteria yang digunakan dalam menghitung ketersediaan fasilitas umum perkotaan dengan menghitung jumlah fasilitas umum yang terdiri dari (1) Tempat ibadah (2) Fasilitas Transportasi (3) Fasilitas kesehatan (4) Taman dan fasilitas kebersihan (5) Fasilitas pendidikan (6) fasilitas komersil (7) fasilitas hiburan , yang dibandingkan dengan fasilitas sesuai standar.
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	17 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Nilai/ indeks	Rekomendasi KLHS dan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	30 % IKA + 30% IKU + 40 % ITL	DLH, DPKP, Dinas Perhubungan	Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persentase	Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	(Luas penggunaan lahan sesuai RTRW : luas wilayah Kota) x 100%	DPUPR	

Tujuan V : Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Agamis, Berkarakter dan Berbudaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19 Persentase lembaga adat yang aktif	Persentase	Optimalisasi fungsi lembaga adat	Jumlah lembaga adat yang aktif menjalankan fungsinya (KAN) dibagi jumlah KAN keseluruhan	Dinas Parpora	KAN (kerapatan Adat Nagari) sesuai fungsinya sebagai mitra dari pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan nagari. KAN sebagai lembaga adat tertinggi akan dapat menengahi permasalahan dan menelaraskan kepentingan yang mungkin terjadi dalam tahap perencanaan serta yang telah terjadi pada tahap koordinasi dalam membangun masyarakat
		20 Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik	Persentase	Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia/ berkarakter sejak dini	(Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter berkategori baik : Jumlah sekolah keseluruhan) x 100%	Dinas Pendidikan	Pendidikan karakter diutamakan dalam membangun kebiasaan dan berakhlak serta berbudi pekerti luhur bagi siswa



Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA



PEMERINTAH
KOTA PAYAKUMBUH

PERJANJIAN KINERJA 2023



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. JASMAN, MM**
Jabatan : **PJ. WALIKOTA PAYAKUMBUH**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Payakumbuh, 31 Oktober 2023



PJ. WALIKOTA PAYAKUMBUH

Drs. JASMAN, M.M

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2023**

Tujuan I : Terwujudnya Pembangunan Manusia yang berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas SDM yang berdayasaing	1 Angka harapan lama sekolah	14,29	Dinas Pendidikan
		2 Rata-rata lama sekolah	11,14	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3 Angka usia harapan hidup	74,18	Dinas Kesehatan
		4 Prevalensi stunting	16	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender	5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,01	DP3AP2KB

Tujuan II : Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
4	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	6 Tingkat Kemiskinan	5.52	Bappeda/BPS
		7 Tingkat Pengangguran	6,05	Dinas Naker Perind/BPS
5	Meningkatnya sektor strategis	8 Pertumbuhan PDRB Sektor industri	2,85	Dinas Naker Perind/BPS
		9 Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	4,03	Dinas Koperasi & UKM/BPS
6	Meningkatnya iklim usaha dan investasi di Kota Payakumbuh	10 Nilai Realisasi Investasi (Milliar Rupiah)	220,0	DPM-PTSP

Tujuan III : Terwujudnya Pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
7	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	11 Nilai Evaluasi AKIP Kota	BB	Setdako
		12 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	75	BKD
8	meningkatkan Pelayanan pulik yang prima	13 Indeks SPBE	2,50	Dinas Kominfo
		14 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,41	Setdako

Tujuan IV : Meningkatkan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatnya infrastruktur perkotaan	15 Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap	84,88	Dinas PUPR
		16 Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan	73,09	Dinas PUPR
10	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	17 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,00	Dinas LH
11	Meningkatnya kualitas penataan kota	18 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	80,23	Dinas PUPR

Tujuan V : Meningkatkan tata kehidupan masyarakat agamis, berkarakter dan berbudaya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SUMBER DATA/PD PENANGGUNG JAWAB
12	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	19 Persentase Lembaga adat yang aktif dalam melestarikan nilai budaya	100	Dinas Parpورا
		20 Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	51,06	Dinas Pendidikan

Payakumbuh, 31 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA PAYAKUMBUH



Drs. JASMAN, MM

NO	PROGRAM TAHUN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	135.584.676.720,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	67.589.107.250,00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	393.588.500,00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	305.561.060,00
5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	-
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	169.371.044.072,00
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	40.088.267.240,00
8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	760.839.200,00
9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	437.647.099,00
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.447.931.050,00
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.812.193.952,00
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	10.279.944.150,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	195.361.940,00
14	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.114.342.352,00
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	12.069.739.541,00
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	7.335.911.760,00
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.008.867.082,00
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	14.080.403.604,00
20	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	503.985.016,00
21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.099.078.468,00
22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.065.534.078,00
23	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	626.975.160,00
24	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.847.495.020,00
25	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	185.434.594,00
26	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.987.247.229,00
27	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.327.553.492,00
28	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	848.708.578,00
29	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.512.858.130,00
30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.283.863.180,00
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	285.753.620,00
32	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	505.167.970,00
33	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	5.660.104.570,00
34	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	17.882.300,00
35	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	72.006.540,00
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.463.866.791,00
37	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	59.993.776,00
38	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	440.189.118,00
39	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	112.996.026,00
40	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	27.617.300,00
41	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.408.490.556,00
42	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	61.287.900,00
43	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	33.817.200,00
44	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.026.960.930,00

NO	PROGRAM TAHUN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN
45	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	9.390.750,00
46	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	42.491.850,00
47	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	12.421.800,00
48	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.628.409.882,00
49	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	71.013.850,00
50	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	670.059.112,00
51	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	197.850.240,00
52	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	68.830.650,00
53	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	47.527.700,00
54	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	99.713.150,00
55	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.422.890.230,00
56	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	419.598.800,00
57	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	901.892.772,00
58	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.851.814.904,00
59	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	32.997.860,00
60	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	35.299.000,00
61	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.954.800,00
62	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	33.601.900,00
63	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	7.778.950,00
64	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.377.658.135,00
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.340.358.201,00
66	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	294.608.864,00
67	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	348.960.195,00
68	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	248.577.560,00
69	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	36.751.180,00
70	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	116.322.050,00
71	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.417.841.650,00
72	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.335.168.360,00
73	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.804.020.900,00
74	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.452.378.018,00
75	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.187.920.576,00
76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.470.358.900,00
77	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.674.837.690,00
78	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.081.449.099,00
79	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	32.316.510,00
80	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	14.999.730,00
81	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	473.993.550,00
82	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	264.999.920,00
83	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	276.040.510,00
84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.358.952.254,00
85	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	149.284.160,00
86	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	111.677.710,00
87	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	344.151.410,00

NO	PROGRAM TAHUN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN
88	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	380.199.920,00
89	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	49.999.830,00
90	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	849.629.020,00
91	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	6.968.904.795,00
92	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	456.559.325,00
93	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51.306.150,00
94	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	83.367.970,00
95	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.719.909.300,00
96	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	30.340.160,00
97	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	15.000.000,00
98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.633.006.472,00
99	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	273.439.030,00
100	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	1.686.480,00
101	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	131.797.420,00
102	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	6.810.860,00
103	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	3.325.000,00
104	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.149.521.806,00
105	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	137.127.310,00
106	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.673.693.936,00
107	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.173.244.152,00
108	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	529.999.660,00
109	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	235.984.850,00
110	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.659.507.579,00
111	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.638.992.802,00
112	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	6.540.877.809,00
113	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	1.204.512.729,00
114	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	378.698.860,00
115	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	32.572.440,00
116	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.286.248.170,00
117	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	19.679.710,00
118	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	917.247.993,00
119	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.184.033.790,00
120	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	62.316.950,00
121	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	390.653.890,00
122	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.411.096.619,00
123	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	357.838.140,00
124	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-
125	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.833.556.026,00
126	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.365.753.600,00
127	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	568.042.690,00
128	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.772.878.720,00
129	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	12.675.296.920,00
130	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.403.568.995,00
131	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.140.066.590,00
132	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	516.034.120,00
133	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.734.726.177,00

NO	PROGRAM TAHUN 2023	ANGGARAN PERUBAHAN
134	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.351.896.790,00
135	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.234.083.380,00
136	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	922.559.155,00
137	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.897.541.370,00
138	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	816.589.680,00
139	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	792.581.790,00
140	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	479.539.190,00
141	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.836.598.478,00
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	483.970.000,00
143	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	698.426.700,00
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	43.119.144.788,00
145	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	290.541.914,00
146	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.445.875.945,00
147	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	103.071.460,00
148	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	543.404.360,00
149	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.637.189.152,00
150	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	111.358.500,00
151	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	9.488.220.063,00
152	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	163.251.330,00
153	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	414.927.500,00
154	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	660.623.110,00
TOTAL		808.329.908.866



Payakumbuh, 31 Oktober 2023
WALIKOTA PAYAKUMBUH

(Handwritten signature)
Drs. JASMAN, M.M



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
INSPEKTORAT

Alamat: Jl. Puti Elok Kel. Tigo Koto Diate Kec. Payakumbuh Utara
Email inspektoratpyk@gmail.com Website inspektorat.payakumbuhkota.go.id

**Pernyataan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024**

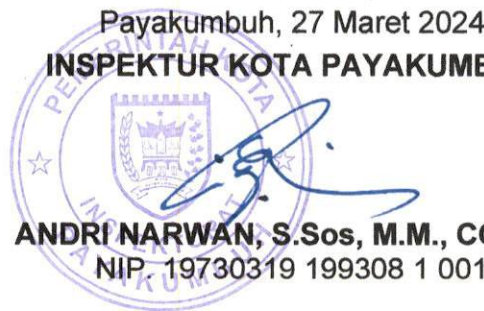
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk Tahun Anggaran 2024, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Pemerintah Kota Payakumbuh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Payakumbuh, 27 Maret 2024

INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE.
NIP. 19730319 199308 1 001

CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List	
I	Format	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2	LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme	1	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit Penyusunan LKj	√
		4	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√
		5	Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
		6	Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
III	Substansi	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-
		10	IKU dan IK telah SMART	√

Payakumbuh, 27 Maret 2024
INSPEKTUR KOTA PAYAKUMBUH



ANDRI NARWAN, S.Sos, M.M., CGCAE.
NIP. 19730319 199308 1 001



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)

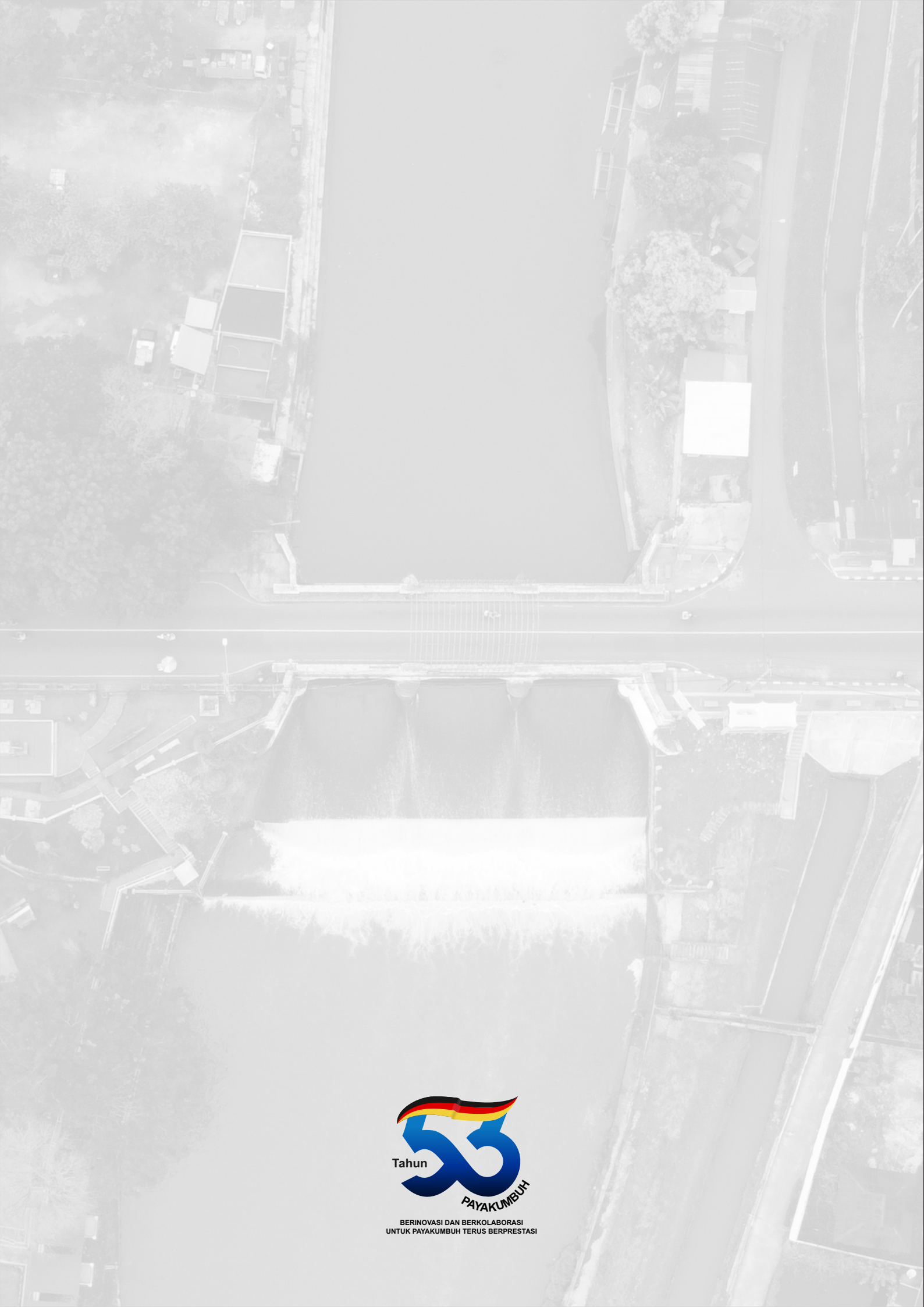
TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	740.546.410.861	741.409.901.903,01	100,12	704.772.804.629,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	116.297.319.145	123.216.492.558,01	105,95	126.962.402.643,00
4.1.01	Pajak Daerah	21.384.377.235	23.089.810.971,00	107,98	22.033.326.343,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.350.647.654	6.247.762.192,00	85,00	5.833.854.340,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.226.634.662	11.226.634.662,00	100,00	9.493.460.178,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	76.335.659.594	82.652.284.733,01	108,27	89.601.761.782,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	116.297.319.145	123.216.492.558,01	105,95	126.962.402.643,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	622.449.091.716	616.393.409.345,00	99,03	576.910.401.986,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	581.503.864.013	585.451.254.645,00	100,68	538.515.001.673,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.945.227.703	30.942.154.700,00	75,57	38.395.400.313,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.800.000.000	1.800.000.000,00	100,00	900.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.800.000.000	1.800.000.000,00	100,00	900.000.000,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.800.000.000	1.800.000.000,00	100,00	900.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	740.546.410.861	741.409.901.903,01	100,12	704.772.804.629,00
5	BELANJA DAERAH	808.329.908.866	733.314.390.719,00	90,72	695.915.964.175,00
5.1	BELANJA OPERASI	718.439.767.792	649.290.098.516,00	90,38	577.363.467.901,00
5.1.01	Belanja Pegawai	387.787.990.506	341.982.146.872,00	88,19	328.320.458.462,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.420.937.220	274.100.551.170,00	93,10	235.849.841.467,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.974.340.066	28.555.400.474,00	92,19	11.869.567.972,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.256.500.000	4.652.000.000,00	88,50	1.323.600.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	718.439.767.792	649.290.098.516,00	90,38	577.363.467.901,00
5.2	BELANJA MODAL	89.140.141.074	83.816.101.803,00	94,03	118.552.496.274,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.476.811.530	3.281.712.722,00	94,39	22.029.941.027,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.788.004.781	25.428.835.045,00	91,51	19.429.430.097,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.750.118.492	19.738.743.460,00	90,75	19.802.166.485,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.820.539.830	33.067.838.045,00	97,77	55.351.575.875,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.304.666.441	2.298.972.531,00	99,75	1.939.382.790,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	89.140.141.074	83.816.101.803,00	94,03	118.552.496.274,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000	208.190.400,00	27,76	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	750.000.000	208.190.400,00	27,76	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	750.000.000	208.190.400,00	27,76	0,00
	JUMLAH BELANJA	808.329.908.866	733.314.390.719,00	90,72	695.915.964.175,00
	SURPLUS/DEFISIT	(67.783.498.005)	8.095.511.184,01	(11,94)	8.856.840.454,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	67.783.498.005	77.023.078.757,00	113,63	68.166.238.303,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.783.498.005	77.023.078.757,00	113,63	74.306.238.303,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.783.498.005	77.023.078.757,00	113,63	74.306.238.303,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	67.783.498.005	77.023.078.757,00	113,63	74.306.238.303,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0,00	0,00	6.140.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0,00	0,00	6.140.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0,00	0,00	6.140.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	67.783.498.005	77.023.078.757,00	113,63	68.166.238.303,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0	85.118.589.941,01	0,00	77.023.078.757,00

Kota Payakumbuh, 17 Januari
2024
Kepala Badan Keuangan DaerahDrs. SYAFWAL_MM
NIP. 196901161990091001



Tahun

BERINOVASI DAN BERKOLABORASI
UNTUK PAYAKUMBUH TERUS BERPRESTASI